

KOMUNISME DI INDONESIA

JILID III

**KONSOLIDASI DAN INFILTRASI
PKI
(1950 - 1959)**



PUSJARAH TNI
BEKERJASAMA DENGAN
YAYASAN KAJIAN CITRA BANGSA (YKCB)
Jakarta 2009

KOMUNISME DI INDONESIA

Jilid III

Konsolidasi dan Infiltrasi PKI
(1950-1959)

JAKARTA 2009

TIM PENULIS BUKU

Editor : Saleh As'ad Djamhari

Penulis :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Saleh As'ad Djamhari | - Artinur Setiawati |
| - Suparmo | - Sutrisminingsih |
| - Variani | - Sri Suyanti |
| - Yusmar Basri | - A. Yusuf |
| - Ariwiadi | - M. Adiono |
| - G. Ambar Wulan | - A. Rusli |
| - Agus Sosro | - Konsuwensih |
| - I Gde Putu Gunawan | - Syafril Lubis |
| - Syarif Rahmadi | - YP. Tarigan |
| - P. Hasibuan | - Purwanto |
| - Arief Sulistyio | |

Disusun Oleh : Pusjarah TNI

Diterbitkan Oleh : Pusjarah TNI, bekerjasama dengan :
Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)

Desain Visual & Tata Letak
(Materi Siap Cetak) : Sidisi, Jakarta

No ISBN : 978-602-95565-2-0



PANGLIMA TNI

**SAMBUTAN TERTULIS PANGLIMA TNI
PADA BUKU
"KOMUNISME DI INDONESIA"
PUSAT SEJARAH DAN TRADISI (PUSJARAH) TNI**

Dengan mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, selaku Panglima TNI dan pribadi saya menyambut gembira, terbitnya buku "*Komunisme di Indonesia*" yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, sebagai hasil revisi atas buku "*Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*", yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.

Pada hemat saya buku ini merupakan hasil refleksi atau perenungan kembali atas "*sepenggal*" perjalanan sejarah TNI. Sudah barang tentu, sebagai bagian dari mata rantai peristiwa ~ walaupun hanya "*sepenggal*" ~ tetap saja menjadi bagian dari rangkaian perjalanan sejarah secara utuh menyeluruh. Namun demikian, di atas segala-galanya, hikmah terpenting dari setiap "*episoda*" sejarah, adalah sampai sejauh mana setiap pelaku sejarah ~ dalam konteks ini TNI ~ dapat memetik "*hikmah dan pelajaran*" dari setiap peristiwa sejarah itu sendiri. Sampai di sini, apa yang disebut sebagai "*obyektivitas*" dan/atau "*kebenaran*" sejarah, menjadi sangat relatifs dan dapat diperdebatkan, karena sifatnya yang dinamis namun setting peristiwanya di batasi oleh dinding ruang dan waktu ~ kapan peristiwa itu terjadi.

Pertanyaannya sekarang, apa "*hikmah dan pelajaran*" yang dapat dipetik oleh TNI, atas *sepenggal* sejarah nasional dan/atau

sejarah TNI yang berkenaan dengan Komunisme di Indonesia? Atas pertanyaan kritis tersebut, mari kita renungkan kembali beberapa pelajaran berharga berikut ini, agar setiap peristiwa sejarah tidak semakin memperlemah melainkan justru semakin mendorong dan memperkuat motivasi pengabdian serta kohesi persatuan dan kesatuan yang semakin kuat dan kokoh.

Pertama, Di depan pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) pada tanggal 5 Oktober 1949, Panglima Besar Sudirman ketika hendak meninggalkan Yogyakarta menuju Magelang karena sakit yang semakin serius, beliau memberi amanat : *'pelihara TNI, pelihara Angkatan Perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga'*. (Pusat Sejarah TNI, 2004:50). **Kedua**, Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman, pada tanggal 12 Nopember 1945, di depan konverensi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), memberi amanat : *'tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga'* (Pusat Sejarah TNI, 2004:32).

Ketiga, Amanat dalam rangka pengumuman Markas Besar Tentara di Yogyakarta, tanggal 4 Juli 1946, Jenderal Besar Sudirman mengatakan : *'supaya memegang teguh disiplin tentara, dan jangan sekali-kali tentara kita mendengarkan dan atau menjalankan perintah dari siapapun juga, kecuali perintah dari pimpinan tentara sendiri'*. (Pusat Sejarah TNI, 2004). **Keempat**, Dengan amat lugas dalam buku War and Management, **Sun Tzu** mengatakan : *'para Jenderal (militer) adalah kaum pengabdian bangsa. Bila pengabdiannya utuh, negara kukuh. Bila pengabdiannya cacat, negara runtuh'*. (Boedidharmo, 1993:106).

Oleh sebab itu menurut pandangan saya, hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita peroleh dari tragedi komunisme di Indonesia, adalah : **Pertama**, jangan pernah lagi terjebak dalam perangkap *"politik Praktis"* yang sangat merugikan pembinaan profesionalisme keprajuritan. **Kedua**, jangan pernah lagi mempertaruhkan *"loyalitas"* militer selain hanya kepada bangsa dan

negara atau loyalitas "*tegak lurus*" demi "*soliditas*" militer dan "*integritas*" nasional.

Dalam kerangka itu semua, tentunya TNI tidak ingin mengulangi sejarah masa lalu yang cukup memprihatinkan berkenaan dengan *Komunisme di Indonesia* yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semoga buku sejarah ini bermanfaat terutama bagi kader pimpinan dan generasi penerus TNI, maupun setiap warga negara Republik Indonesia khususnya bagi generasi muda pewaris masa depan bangsa dalam melanjutkan perjuangan demi tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sekian dan terima kasih.



Jakarta, September 2009

Panglima Tentara Nasional Indonesia

Djoko Santoso
Djoko Santoso
Jenderal TNI



KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT SEJARAH TNI

Apabila kita simak proses perubahan dalam era informasi dewasa ini, nampak adanya perubahan struktur peta politik dunia secara total. Memasuki abad 21, isu ideologi telah terdesak isu global yakni demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Begitu kuatnya perhatian masyarakat dunia terhadap isu global dewasa ini menyebabkan masalah ideologi tergeser dan menjadi tidak populer lagi.

Bagi negara-negara maju dengan masyarakatnya sudah dewasa barangkali ideologi politik bukan lagi menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan. Bahkan sejak berakhirnya perang dingin di kawasan Asia Tenggara pada sebagian masyarakat telah terbentuk opini bahwa bahaya laten komunisme tidak perlu dirisaukan lagi.

Berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, ideologi masih menjadi persoalan bangsa. Ideologi bahkan kadang diperalat sebagai kendaraan untuk meraih kepentingan dan tujuan politik tertentu. Oleh karena itu adanya opini bahwa kita tidak lagi perlu mencemaskan bahaya laten komunis bagi masyarakat Indonesia, khususnya TNI tentu patut dipertanyakan karena bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun TNI bersama Rakyat dituntut untuk selalu memelihara dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ideologi komunisme yang mengancam ideologi Pancasila serta kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Sikap waspada itu perlu dimiliki oleh setiap individu, perlu dibina serta ditingkatkan demi terwujudnya ketahanan nasional yang mantap. Dengan terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh, kita harapkan mampu meredam berbagai bentuk ancaman terhadap Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan selalu berorientasi kepada kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional kita akan lebih peka menghadapi timbulnya setiap gejolak serta mencegah kemungkinan terulangnya peristiwa kelam yang pernah menjadi mala petaka bangsa kita.

Salah satu tragedi akibat dari kekurangwaspadaan kita terhadap ideologi dan gerakan komunis adalah peristiwa pemberontakan kedua kalinya yang dilancarkan oleh PKI pada tahun 1965 atau dikenal dengan G. 30 S/PKI. Dengan merenungkan dan mengambil hikmah serta pelajaran dari rangkaian peristiwa pengkhianatan PKI sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 dan Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, yang kemudian terulang kembali pada tahun 1965, mudah-mudahan bisa semakin menyadarkan masyarakat Indonesia, khususnya segenap anggota TNI bahwa sampai kini ideologi komunisme terus berkembang, dengan gaya barunya (Neo Komunisme).

Khusus bagi generasi muda yang tidak mengalami kedua peristiwa yang tragis tersebut, perlu memahami sejarah tingkah laku politik PKI dan pengkhianatan PKI dari masa pergerakan nasional hingga tahun 1965 agar lebih peka sehingga mampu mendeteksi setiap gejala awal munculnya bahaya laten komunisme.

Kehadiran kembali buku Komunisme di Indonesia yang merupakan revisi dan cetak ulang ini terdiri dari lima jilid pada awalnya merupakan pelaksanaan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/53/I/1991 tanggal 17 Juni 1991 kepada Kapusjarah ABRI untuk menyusun naskah "Bahaya Laten Komunisme di Indonesia", dengan pelbagai pola gerakan legal dan gerakan ilegal PKI dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Kapusjarah TNI dengan Nomor Sprin/195/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 untuk melaksanakan revisi dan cetak ulang terhadap buku ini.

Dengan memahami berbagai sepele terjang tingkah laku politik PKI, yang diungkapkan dalam buku ini, diharapkan kita dapat lebih memahami perjalanan sejarah bahwa TNI pernah dimainkan oleh politik, sehingga dalam catatan sejarah TNI pernah terjadi berbagai

DARI PENERBIT

Berbicara mengenai sejarah politik Indonesia, tentu kita tidak bias melupakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai mengusung ideologi komunis ini, sepak-terjangnya telah “menghujamkan luka” yang sangat dalam melalui aksi pemberontakannya, Yakni, Pemberontakan PKI Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965/PKI-dengan tujuan mendirikan Republik Indonesia yang berazaskan Komunisme dan mengganti Dasar Negara Pancasila.

Dokumentasi tertulis dan kesaksian-kesaksian atas gerakan PKI di Indonesia pada saat ini banyak tersedia di banyak pusat-pusat dokumentasi, buku-buku terbitan tokoh-tokoh yang terlibat dan mengetahui peristiwa tersebut, merupakan bagian penting bukti perjalanan sejarah politik Indonesia. Sebab itu, ketika Tim Penulis Pusat Sejarah TNI berkeinginan menerbitkan buku Komunis Di Indonesia melalui **Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)**, kami menyambut gembira rencana tersebut. Mengingat buku berjudul *Komunisme Di Indonesia* yang terdiri dari lima jilid, mampu menghadirkan sejarah Komunisme dengan bukti-bukti otentik sebagai salah satu syarat penulisan sejarah yang obyektif.

Buku ini menjadi sangat penting bagi pemahaman sejarah secara utuh pada masa kini dan masa mendatang. Karena, generasi muda yang memiliki jarak waktu dengan aksi-aksi PKI dan perkembangan Komunisme di Indonesia, akan bisa memahami secara komprehensif, bahwa ideologi komunis, Marxisme/Leninisme memang tidak bisa diterapkan di Indonesia, yang prulalis namun juga religius. Seperti diketahui, pada masa sekarang banyak tokoh yang terlibat dalam PKI, pemerhati sejarah dan generasi muda, bergerak untuk menghidupkan kembali Komunisme di Indonesia.

peristiwa tragis karena adanya intervensi partai Komunis Indonesia. Mudah-mudahan tingkat kepekaan masyarakat Indonesia khususnya anggota TNI terhadap bahaya laten komunis tidak akan pernah lekang dimakan jaman.

Kehadiran kembali buku Komunisme di Indonesia yang merupakan revisi dan cetak ulang terdiri dari lima jilid, buku sejarah ini mengungkapkan adanya upaya-upaya komunis dalam melakukan infiltrasi agar berpihak kepadanya. Adapun judul buku yang direvisi dan cetak ulang tersebut adalah sebagai berikut :

- Jilid I : Komunisme di Indonesia, Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)
- Jilid II : Komunisme di Indonesia, Penumpasan Pemberontakan PKI (1948)
- Jilid III : Komunisme di Indonesia, Konsolidasi dan infiltrasi PKI (1950 - 1959)
- Jilid IV : Komunisme di Indonesia, Pemberontakan G. 30 S/PKI dan Penumpasannya.
- Jilid V : Komunisme di Indonesia, Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya

Kami menyadari bahwa tidak ada satupun karya dari tangan manusia yang lahir dalam keadaan sempurna, dan sudah barang tentu, buku "Komunisme di Indonesia" yang telah direvisi dan dicetak ulang ini masih banyak kekurangannya. Untuk menjadi kewajiban kita bersama untuk menyempurnakannya apabila masih ditemui kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan buku ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Jakarta, September 2009

Kepala Pusat Sejarah TNI



Pamudjo

Brigadir Jenderal TNI

Secara khusus kami haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso** yang telah meluangkan waktu menulis Kata Sambutan, **Tim Penulis Pusat Sejarah TNI** dan **Bapak Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto)** yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku *Komunisme Di Indonesia* ini. Semoga dengan terbitnya buku *Komunisme Di Indonesia*, bisa bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara di masa depan.

Jakarta, September 2009

Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PANGlima TNI

KATA PENGANTAR KAPUSJARAHI TNI

DARI PENERBIT

DAFTAR ISI V

BAB I

PENDAHULUAN 1

BAB II

KONSOLIDASI ORGANISASI DAN BERGESERNYA

KEPEMIMPINAN 5

1. Beralihnya Kepemimpinan PKI 5

2. Membangun Partai Massa 11

3. Aksi-Aksi PKI dan Razia Agustus 1951 13

4. Peristiwa Tanjung Morawa 28

BAB III

DARI GARIS ZHDANOV KE GARIS STALIN 37

1. "Wajah Baru" Dalam Membangun Partai 37

2. Program Mengubah Imbangan Kekuatan 41

3. Tesis PKI Tentang Masyarakat Indonesia dan Revolusi
Indonesia (MIRI) 42

BAB IV

STRATEGI FRONT PERSATUAN NASIONAL 49

1. Usaha-usaha dan Taktik PKI menjelang Pemilu
Tahun 1955 49

2. Mencaplok Organisasi Buruh 61

3. Pendekatan PKI Terhadap Petani 66

4. Pendekatan PKI Terhadap Organisasi Pemuda,
Mahasiswa dan Pelajar 70

5. Pendekatan PKI Terhadap Organisasi Wanita.....	75
6. Pendekatan PKI Terhadap Intelektual dan Veteran	80
7. Pendekatan PKI Terhadap Seniman dan Budayawan....	82

BAB V

AKSI-AKSI PKI DALAM BADAN LEGISLATIF	85
1. Aksi-aksi PKI dalam Parlemen	85
2. Aksi-aksi PKI dalam Konstituante	96

BAB VI

PENUTUP.....	109
DAFTAR SUMBER.....	111
INDEKS	115

BAB I PENDAHULUAN

Buku Bahaya Laten Komunisme Jilid III ini, memfokuskan uraiannya mengenai gerakan PKI masa demokrasi liberal yaitu periode pasca perang kemerdekaan 1950 sampai pada tahun 1959. Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai organisasi politik yang bersifat internasional, bekerja berdasarkan atas program maksimum dan program minimum. Program maksimum adalah program ideologi yang berlaku secara universal yaitu membentuk sistem ideologi dan politik dengan cara revolusi. Sedangkan program minimum adalah program yang menyangkut kepentingan praktis bagi pengembangan ideologi dan perluasan pengaruhnya. Kedua program ini saling berkait dan berhubungan satu sama lain antara ideologi maupun gerakannya.

Di Indonesia program maksimum komunis adalah mendirikan kekuasaan politik dan menanamkan ideologi komunisme kepada masyarakat. Program minimum pada periode ini adalah usaha menghidupkan kembali PKI dengan cara melakukan konsolidasi organisasi dan aksi-aksi memperluas pengaruhnya ke seluruh lapisan masyarakat dengan strategi front persatuan. Proses pencapaian kedua program itu menurut istilah komunis disebut "masa transisi". Kapan awal dan akhir masa transisi itu, sulit untuk dikatakan, karena ciri pokok dari setiap gerakan yang dilakukannya selalu tertutup dan rahasia.

Dalam alam pikiran orang-orang komunis dan juga PKI, ideologi bangsa Indonesia terbagi atas tiga golongan :

- golongan progresif (golongan berideologi progresif yaitu PKI).
- golongan tengah (golongan yang tidak memusuhi komunis).
- golongan kepala batu (golongan yang anti komunis).

Di samping ketiga golongan ini, masih ada golongan lain yang belum tentu berideologi komunis, namun mereka dianggap sebagai sumber dari kekuatan komunis. Mereka itu adalah :

- golongan miskin (*roofless proletariat*), yaitu kaum gelandangan, pengemis, orang-orang miskin kota, penganggur akibat urbanisasi.
- golongan cendekiawan yang frustrasi dan resah (*frustrated intellectuals*), golongan terpelajar yang merasa tidak mendapat tempat dalam masyarakat, seperti penganggur intelektual, pensiunan, seniman, budayawan.
- golongan petani yang tidak lagi memiliki tanah atau buruh tani.

Berdasarkan pembagian golongan-golongan dalam masyarakat ini, PKI mengembangkan suatu taktik dan teknik untuk mendekati golongan ini yang sesuai dengan situasi, kondisi, psikologi tempat dan waktu. Situasi dan kondisi yang dianggap amat menguntungkan apabila di dalam masyarakat terdapat :

- adanya kelompok masyarakat yang membenci terhadap sesuatu kekuasaan.
- adanya keinginan untuk mengadakan perubahan secara cepat.
- pertumbuhan proletariat yang cepat.
- korupsi yang merajalela.
- adanya instabilitas ekonomi dan politik.
- adanya kesenjangan antara golongan kaya dan miskin.
- adanya perasaan ketidakadilan dan perasaan tertindas di dalam masyarakat.

Apabila dalam masyarakat tumbuh gejala-gejala sebagaimana disebut di atas, orang-orang komunis mulai melakukan penilaian yang kemudian dikembangkan taktik dan teknik pelaksanaannya, dengan :

- membentuk kelompok awam, yang melakukan aksi propaganda secara halus dan menarik perhatian masyarakat.
- melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah, tetapi tidak mau mengkritik kawan seideologi, atau lawan setujuannya.

- melakukan penetrasi, infiltrasi terhadap organisasi politik, organisasi massa, birokrasi dan Angkatan Bersenjata.
- Menciptakan kultus individu, pemujaan pahlawan (hero-worship), mendewa-dewakan seorang pemimpin.
- memanfaatkan konflik-konflik sosial, dalam organisasi massa, birokrasi dan Angkatan Bersenjata.
- melaksanakan propaganda yang terus menerus sampai orang lain percaya akan kebohongannya, untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap komunis.
- memasalahkan ideologi negara Pancasila, mengingkari kebenarannya, memutar balikkan sejarah secara terbuka dan tertutup.
- mempropagandakan hak-hak azasi manusia, untuk mengangkat citra bahwa komunis adalah pendekar dan pembela hak-hak azasi.

Adapun sasaran pokoknya adalah golongan dalam masyarakat yang masih lemah ketahanan ideologinya, khususnya kelompok pemuda, pemimpin-pemimpin organisasi pemuda, mahasiswa yang berjiwa liberal, perwira-perwira muda Angkatan Bersenjata.

Demikianlah taktik dan teknik komunis dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan program minimumnya dengan strategi front persatuan dan parlementer, yang dilakukan oleh PKI maupun organisasi-organisasi massanya. Pada periode ini PKI sengaja mengurangi aksi-aksi kekerasan karena fokus kegiatannya menggalang, merangkul, membujuk organisasi massa lain untuk berpihak kepada PKI.

Namun usaha PKI itu tidak selalu berhasil. Tantangan dari golongan masyarakat yang lain juga kuat karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, yang sulit untuk menerima ideologi asing, seperti komunisme. Ideologi komunisme tersebut berlawanan dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Dalam rangka menghadapi bahaya laten komunis ini apabila kita menemukan pertautan gejala atau peristiwa yang tidak biasa, patut kita perhatikan dan perlu kita waspadai. Di samping kita sadari bahwa lahirnya gejala tersebut hampir sama dengan gejala perubahan masyarakat, yang tengah berangkat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Pertautan beberapa gejala dalam perubahan masyarakat ini patut diperhatikan, karena orang-orang komunis sangat lihai dalam memanfaatkan situasi dan kondisi serta momentum yang tepat. Mereka bisa berganti-ganti wajah setiap saat sebagai upaya pencapaian tujuannya. Partai komunis adalah sebuah wadah dari ideologi komunisme. Partai komunis bisa hancur dan bisa runtuh ataupun dilarang, namun komunisme dan sistemnya tetap ditawarkan oleh para pengikutnya kepada masyarakat, kapanpun dan di manapun.

Di dalam era globalisasi, demokratisasi, transparansi informasi dewasa ini, perlu kita antisipasi bahwa pengikut komunis akan memanfaatkan peluang itu untuk kembali menawarkan ideologi komunis kepada bangsa Indonesia sebagai ideologi alternatif. Di sinilah letak pentingnya kita mengetahui sejarah dan aksi-aksi komunis di Indonesia dalam rangka kewaspadaan nasional dan melestarikan ideologi Pancasila.

BAB II

KONSOLIDASI ORGANISASI DAN BERGESERNYA KEPEMIMPINAN

1. Beralihnya Kepemimpinan PKI.

Dalam situasi kacau setelah gagalnya pemberontakan di Madiun (Madiun Affair) pada tahun 1948, dalam tubuh PKI terjadi kekosongan pimpinan. Sebagian pemimpin serta kader partai mati terbunuh dalam pemberontakan dan ada yang masih dipenjarakan di rumah penjara di Surakarta, Yogyakarta dan beberapa tempat lain di Jawa Tengah. Sebagian pimpinannya yang tidak tertangkap di antaranya D.N. Aidit dan M.H. Lukman menyembunyikan diri. Mereka berhasil melarikan diri ke Vietnam tinggal bersama pasukan-pasukan Ho Chi Minh. Sebelum kembali ke Indonesia, merekapun sempat tinggal di Cina.¹

Sementara status PKI dalam KNIP setelah melakukan pemberontakan belum dipastikan. Masalah ini menjadi perdebatan sengit dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1949, mengenai kelangsungan dan hak hidup Partai Komunis Indonesia (PKI) sesudah pemberontakan Madiun 1948. Dalam perdebatan yang cukup lama akhirnya sidang memutuskan untuk memberikan kesempatan hidup bebas bergerak kembali kepada PKI dan organisasi massanya. Keputusan ini diambil karena adanya pendapat bahwa partai komunis "diperlukan" sebagai sekutu untuk menetralisasi modal-modal asing Belanda yang beroperasi di Indonesia. Di samping itu terdapat pula dorongan yang kuat dari para pemimpin untuk menyatakan kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia ke dunia luar dan Belanda khususnya, bahwa rakyat Indonesia sudah cukup matang untuk menghayati demokrasi. Oleh karena itu jika di negara Barat partai komunis tidak dilarang, maka di Indonesia pun harus mendapatkan hak hidup yang sama seperti partai-partai yang lainnya.

1. Peter Edman, *Komunisme Ala Aidit Kisah Partai Komunis Indonesia di bawah Kepemimpinan DN. Aidit, 1950-1965*, Center for Information Analysis, 2005, hal. 69.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo mengeluarkan pernyataan pada tanggal 7 September 1949, bahwa mereka-mereka yang terlibat dalam "Pemberontakan Madiun tidak akan dituntut, asalkan mereka tidak tersangkut dalam kejahatan-kejahatan kriminal. Kerjasama orang-orang komunis diperlukan dalam menghadapi bahaya-bahaya yang datang dari luar. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut, pemerintah dapat membenarkan adanya oposisi dalam kehidupan parlementer."

Sesudah dikeluarkannya pernyataan Menteri Kehakiman itu, Alimin tokoh senior PKI keluar dari persembunyiannya pada tanggal 10 September 1949. Dalam wawancara dengan wartawan Harian *Sin Po* yang pro komunis, ia menyatakan "bahwa PKI akan menjalankan garis kebijaksanaan yang hati-hati dan menyangkal bahwa PKI yang merencanakan revolusi Madiun. Pemerintah seharusnya tidak menyalahkan PKI, melainkan oknum-oknumnya". Pada kesempatan itu Alimin masih mengancam kepemimpinan Soekarno-Hatta. Ia mengatakan "*Kemenangan Indonesia bukanlah semata-mata karena kekuatan Republik tetapi karena kelemahan Belanda*". Sedangkan mengenai persetujuan Roem-Royen dan kembalinya Indonesia ke meja perundingan, ia menegaskan bahwa PKI tidak akan ikut bertanggung jawab atas hasil perundingan itu.

Setelah itu Alimin memegang pucuk pimpinan partai. Ia mengadakan perubahan politik dan strategi partainya dengan menempuh jalan tengah, yaitu dengan taktik dan strategi garis kiri yang fleksibel :

- a. Ke luar tetap konsekuen menentang feodalisme, imperialisme dan kapitalisme.
- b. Ke dalam berusaha memisahkan antara kapital asing dengan kapital pribumi (nasional).

Kebijakan ini diperlukan, karena menurut PKI, Indonesia setelah pengakuan kedaulatan masih merupakan negara setengah jajahan, dimana dominasi dan monopoli kapital asing masih menguasai kehidupan dan perekonomian Indonesia. Menurut

teori PKI, rakyat Indonesia terbagi atas 4 klas yaitu; klas tani, buruh, cendekiawan dan borjuis nasional. Klas-klas itu jika dipersatukan dalam suatu Front Persatuan Nasional, merupakan kekuatan untuk melawan kapitalisme asing. Dengan kebijakan ini, golongan borjuis dan kapitalis nasional mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi kapitalis asing, serta memperoleh tempat perwakilan dalam pemerintahan koalisi komunis yang akan datang. Untuk mempertegas kebijaksanaan ini, Politbiro PKI pada tanggal 7 Oktober 1949 mengeluarkan pernyataan :

“Jika RIS (Republik Indonesia Serikat) tidak akan menjadi negara semi kolonial, maka ia harus mempertahankan/tidak menyerahkan perusahaan-perusahaan asing yang telah dikuasainya sewaktu RI berhasil menduduki dan mengawasinya, sebelum RI dilebur ke dalam RIS. PKI tidak akan bermaksud untuk menghapuskan kapitalis nasional, hanya bermaksud akan mengecek pertumbuhannya. Untuk maksud-maksud inilah, maka negara dikontrol oleh rakyat.”

Sejak keputusan pemerintah tanggal 7 September 1949, tokoh-tokoh PKI mulai berani menampakkan diri. Mereka mulai berani mengeluarkan pernyataan yang bersifat menyerang kebijaksanaan pemerintah mengenai persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar). Program untuk melawan persetujuan KMB, yakni menggalang persetujuan “persatuan nasional” dan menentang imperialisme Barat. Dalam bidang demokrasi, PKI menuntut diakuinya hak-hak untuk bebas menyatakan pendapat, hak untuk mengadakan rapat atau berkumpul, berdemonstrasi dan melakukan pemogokan. Mengenai Angkatan Bersenjata, PKI menuntut dilakukannya nasionalisasi APRI demi untuk memperoleh tentara reguler yang baik, PKI menolak menerima penggabungan pasukan yang dulu ikut melawan pemerintah RI dan menolak penggabungan KNIL ke dalam APRIS.

Keberadaan Alimin sebagai pemegang Pimpinan Puncak PKI di mata para pemimpin muda PKI hanyalah sebagai simbol. Mereka kurang mempercayai kemampuan Alimin memimpin partai. Hal ini berkaitan dengan peranannya yang gagal dalam pemberontakan tahun 1926.

Dalam kepemimpinannya, Alimin mengecam kepemimpinan Musso sebagai otokritik, namun ia tidak pernah menyalahkan jalannya garis partai yang dilaksanakan oleh Musso. Kepemimpinan Alimin meninggalkan semua cara-cara yang melibatkan massa rakyat, membangun partai dalam kelompok-kelompok kecil, sebagai kritik terhadap *Jalan Baru Untuk Republik Indonesia* yang diajukan Musso. Menurutnya, PKI harus menjadi partai kader artinya partai tetap dibiarkan kecil dengan anggota yang militan, dan kepada anggota partai yang dipercaya kesetiaannya terhadap PKI diperintahkan untuk masuk menjadi anggota organisasi-organisasi massa lainnya seperti organisasi pemuda, buruh, tani dan wanita untuk mengusahakan agar organisasi-organisasi tersebut bergabung dalam satu front.² Pada masa peralihan dari Republik Indonesia Serikat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, PKI mendapatkan keuntungan politis yang besar. Pada tanggal 4 Februari 1950 pemerintah RIS menegaskan pendiriannya bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal, pemerintah berpendirian bahwa PKI tidak dilarang selama PKI mematuhi hukum dan tata tertib. Para pemimpin muda PKI muncul kembali pada pertengahan tahun 1950. Mereka adalah D.N. Aidit, Njoto, Lukman dan Munir. Kelompok ini berusaha merebut kepemimpinan dan kendali partai. Aidit dan Lukman kemudian menerbitkan majalah *Bintang Merah* sebagai media cetak dan berfungsi sebagai media komunikasi mereka dengan para anggota partai. Majalah ini diterbitkan oleh Sekretariat Agitasi dan Propaganda (Agitprop) CC PKI sejak 15 Agustus 1950 dengan Sekretarisnya Peris Pardede. Melalui media ini Aidit melancarkan tuduhan terhadap Alimin yang dianggap mematikan sikap kritik dan otokritik di lingkungan partai. Aidit tidak setuju dengan gagasan Alimin yang menginginkan PKI sebagai partai kecil yang militan. Sebaliknya Aidit menginginkan agar PKI menjadi partai yang besar dan dikenal rakyat, terutama buruh dan tani yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia. Aidit berpendapat kekuatan

2. Departemen Agitasi dan Propaganda CC PKI, *ABC Politik*, Departemen Agitasi dan Propaganda CC PKI, Jakarta, 1965, hal. 50-51.

massa tani dan buruh sangat besar, sangat penting bagi perjuangan PKI. Untuk itu Aidit berusaha untuk mendapatkan dukungan dari massa buruh dan tani.³

Adanya perbedaan aspirasi ini menyebabkan perpecahan antara golongan tua dan golongan muda. Terjadi persaingan antara pengikut kader muda dan kader-kader tua dalam merebut kekosongan kepemimpinan partai. Para kader muda PKI berambisi mengganti pimpinan PKI tua.

Pada bulan Juni 1950 PKI mengumumkan susunan sekretariat sementara yang dipegang oleh Sudisman dan seorang aktivis veteran PKI pada tahun 1920-an yaitu Djaetun. Kegiatan partai dalam rangka menghidupkan anggota belum dilakukan. Sedangkan kegiatan partai yang bersifat perlementer dilaksanakan oleh Tan Ling Djie. Ia bertindak sebagai pimpinan semacam sekretariat bersama golongan Marxis,⁴ (dulu Sayap Kiri) di Parlemen.

Pada sidang Pleno Central Comitee Partai (CC) tanggal 7 Januari 1951, Aidit dan kawan-kawannya berhasil merebut pucuk pimpinan dan sekaligus menguasai Politbiro. Kemenangan ini berarti pembaharuan terhadap garis politik lama (Alimin) yang meninggalkan semua cara-cara yang melibatkan massa rakyat serta membangun partai dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam Politbiro tersusun, Ketua: D.N. Aidit, Ketua II : Lukman, Ketua III : Njoto. Sedang dalam Central Comitee terdapat susunan sebagai berikut, Sekretaris Jenderal : D.N. Aidit, dan anggota-anggota lain terdiri dari Lukman, Njoto dan Sudisman. Di samping sebagai anggota CC, Njoto merangkap sebagai Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda (Agitprop).

Dalam struktur kepemimpinan baru ini kelompok tua diberikan status penasehat. Kelompok PKI '35, seperti Djokosudjono, Achmad Sumadi masih diberikan kedudukan sebagai anggota CC. Sedangkan kelompok Nederland, yang umumnya intelektual seperti Maruto

3. D.N. Aidit, *Konstitusi Partai Komunis Indonesia*, Djakarta, 1951, hal. 21.

4. Kementerian Penerangan, *Kepartaian di Indonesia*, Kementerian Penerangan, Yogyakarta, 1951. hal. 280.

Darusman, Setiadjud, Tan Ling Djie, Ir. Sakirman diberikan kedudukan sebagai anggota parlemen. Golongan tua praktis tergeser kedudukannya. Namun mereka masih diberi kesempatan untuk duduk di tempat kehormatan sebagai anggota CC yang tidak mempunyai kekuasaan.⁵ Dalam perkembangan kemudian, kedudukan Alimin tergeser dan digantikan oleh Ir. Sakirman yang semula menjadi wakil PKI di KNIP Yogya dan sebagai ketua fraksi PKI di Parlemen menggantikan Ngadiman Hardjosubroto.

Setelah Aidit dan kawan-kawannya berhasil menguasai kepemimpinan dalam Central Komitee (CC) PKI yang diumumkan pada tanggal 7 Januari 1951, maka Aidit mengajukan suatu program baru yang disebut "Jalan Baru". Tujuannya jelas untuk menunjukkan kepada rakyat, bahwa PKI berjuang melalui garis perlembagaan negara, menggunakan jalan damai dan demokratis dalam tindak-tanduk politiknya.⁶

Aidit menyadari bahwa perjuangan PKI melalui pemberontakan bersenjata tidak mungkin membawa kemenangan bagi PKI. Untuk itu ia menjalin kerjasama dengan golongan-golongan non komunis. Garis perjuangan politiknya ini sejalan dengan yang dilakukan Mao Tse Tung, walaupun tidak sepenuhnya diambil dari ajaran-ajarannya.⁷

Dalam menjalankan garis perjuangan, Aidit berangkat dari pemikiran, bahwa PKI harus menyesuaikan ajaran Marxisme-Leninisme dengan kondisi nyata setempat dalam hal ini Indonesia. Ia sangat terpengaruh oleh pemikiran Mao Tse Tung, di bidang gerakan politiknya. Pokok pemikiran Mao yang digunakan ialah, kaum tani sebagai soko guru revolusi, garis massa, front persatuan nasional dan teori kontradiksi.⁸

5. Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1964, hal. 20.

6. Departemen Penerangan RI, *Almanak Lembaga-Lembaga Negara dan Kepartaian*, Departemen Penerangan RI, Djakarta, 1961, hal. 641.

7. Abdul Salam, *Sejarah Partai Komunis Cina*, makalah tidak diterbitkan

8. Donald Hindley, *op.cit.*, hal. 30.

2. Membangun Partai Massa.

Empat bulan sesudah mengambil alih pimpinan, Aidit pada bulan April 1951 melakukan sidang pleno Central Komite. Sidang ini berhasil merancang konstitusi PKI. Rancangan konstitusi ini kemudian disampaikan kepada organisasi-organisasi bawahannya untuk dijadikan bahan diskusi yang luas di kalangan PKI. Tanpa menunggu pengesahan kongres, seluruh anggota CC yang didominasi oleh kelompok Aidit setuju menggunakan rancangan konstitusi sebagai pegangan dalam aktivitas pembangunan partai sehari-hari. Pengalaman-pengalaman praktis yang didapat dari pelaksanaan rancangan konstitusi itu dijadikan bahan-bahan untuk penyempurnaan (amandemen).⁹ Sejak tahun 1951 itu, Aidit berusaha melakukan propaganda untuk kegiatan partai hingga timbul kesan diluar bahwa PKI adalah suatu partai yang nasionalis, suatu partai yang anti kolonialis, suatu partai yang bersimpati terhadap agama, suatu partai yang bertanggungjawab, suatu partai yang menentang penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuan politik dan suatu partai yang membela tegas demokrasi. PKI mulai melaksanakan dua tugas pokoknya, yaitu penggalangan Front Persatuan dan pembangunan partai.

Sesuai dengan garis perjuangannya itu, Aidit memulai ofensifnya untuk menguasai buruh tani, yang dianggap sebagai kekuatan pokok front persatuan nasional. Buruh tani dinilai golongan yang paling tertindas dibandingkan dengan golongan lainnya. Dengan demikian PKI harus mendapat dukungan dari massa tani sebanyak mungkin dengan cara mobilisasi dan mengorganisasi buruh dan tani supaya mereka menjadi kekuatan pendukungnya. Dalam hal ini Aidit menjelaskan

9. D.N. Aidit, *Labirin PKI dan Perkembangannya*, Jajasan Pembaruan, Djakarta., 1955, hal. 40

sebagai berikut :

Jika persatuan kuat dan kebijakan benar-benar dituntun oleh Partai Komunis, kemudian jaminan yang pasti akan kekuatan front nasional yang bersatu akan segera terbakukan. Dengan cara yang sama kekuatan front nasional yang bersatu tersebut dapat dipastikan akan dapat memantapkan persatuan antara kaum buruh dan kaum petani, dan hal ini juga berarti memperkuat dan meningkatkan kemampuan Partai Komunis. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh "Radical Concentratie", PPKI, GAPI, Konsentrasi Nasional dan BPP timbul karena front-front nasional bersatu tersebut tidak berlandaskan pada persatuan yang kuat antara kaum buruh dan kaum petani.¹⁰

Guna mendapatkan dukungan dari massa tani, Aidit mengajukan tuntutan "kenaikan upah" dan "perubahan tata guna tanah". Untuk itu kader-kader PKI disebar dengan tugas melakukan peninjauan ke desa-desa. Untuk menarik simpati petani pada bulan November 1951 Aidit mengajukan tuntutan kepada pemerintah, agar diadakan perubahan tataguna tanah bagi kaum tani dengan menghapuskan sistem tuan tanah dan membagikan tanah dengan cuma-cuma kepada petani. Tuntutan perubahan tataguna tanah ini dijadikan bahan agitasi yang sehebat-hebatnya oleh PKI.

Sejalan dengan program baru PKI itu, Aidit melaksanakan kerjasama dengan golongan non-komunis, dan mencoba bersikap simpati terhadap golongan agama. PKI mencoba mendekati PNI yang sekalipun anti komunis, namun sebagai salah satu partai besar yang bisa dijadikan kawan bersaing melawan Masyumi. Selain PNI, PKI mencoba menjalin kerjasama dengan Nahdhatul Ulama yang baru berpisah dengan Masyumi. Aidit secara terarah memanfaatkan kelemahan dan kelengahan golongan non-komunis, yang dianggap sebagai borjuis nasional, dengan diktum : "Maju mundurnya partai dan maju mundurnya revolusi, tergantung pada hubungan partai dengan borjuasi nasional. Dalam bekerjasama dengan borjuasi nasional, PKI tidak boleh kehilangan kebebasannya

10. DN. Aidit, *"The National United Front and Its History"*, dalam *Selected Writing*, Vol. I, hal 54

dan tidak boleh melengahkan sekutu yang paling dipercayai dan paling banyak jumlahnya yaitu massa tani".¹¹

Dalam propagandanya untuk menarik golongan agama, PKI menyatakan dirinya sebagai sebuah partai yang "toleran dan simpati kepada agama, mau bekerjasama dengan pihak manapun dan mempertahankan kebebasan demokratis".¹² Hasil "kerja keras" trio Aidit, Njoto, Lukman ialah jumlah pengikut PKI meningkat. Barisan Tani Indonesia (BTI) yang semula dianggap organisasi independen yang beranggota 2000 orang berhasil dikuasai. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) pendukung kuat PKI sejak tahun 1945 menjadi pelopor penciptaan organisasi buruh baru. Organisasi Veteran, wanita, pemuda, mahasiswa, seniman, wartawan, baik lokal maupun nasional dibentuknya sebagai organisasi massa yang terbuka dan independen. Sebagai contoh organisasi wanita Gerakan Wanita Sosialis (Gerwis) yang dibentuk pada 4 Juni 1950 adalah sebuah organisasi yang dikatakan terbuka dan independen. Bertambahnya jumlah anggota PKI pada awal konsolidasi ini sejalan dengan strategi dan taktik "pura-pura berkawan".

3. Aksi-Aksi PKI dan Razia Agustus 1951.

a. Aksi Kekerasan dan Pemogokan.

Sesuai dengan program baru PKI, Aidit menitikberatkan pembinaan kekuatan massa terutama buruh. Di bawah pimpinan Njono, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang berada di dalam naungan PKI sejak berdirinya pada masa kepemimpinan Aidit maju pesat dibandingkan pada masa Alimin. Pada tahun pertama sesudah pengakuan kedaulatan, SOBSI mempunyai anggota 200.000 orang. Pada tahun 1951 PKI mengaku jumlah anggota SOBSI sudah mencapai 1 juta orang.

11. D.N. Aidit, *op.cit.*, hal 38.

12. Donald Hindley, *op. cit.*, hal. 131.

Keberhasilan ini membuat Aidit dan kawan-kawannya menggalang kekuatan kaum buruh di segala bidang. Isyu kepentingan buruh diangkat ke permukaan. Isyu ini mendapat sambutan dari kaum buruh, terutama organisasi buruh yang bernaung di bawahnya seperti Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI), Serikat Buruh Daerah Otonom (SEBDA), dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Organisasi massa PKI: melakukan pemogokan yang dipelopori oleh buruh perkebunan yang tergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI). Mereka menuntut kenaikan upah karena upah yang diterima sangat kecil tidak sesuai dengan harga pasar. Pemogokan umum SARBUPRI dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dimulai tanggal 20 Agustus 1950, hanya tiga hari setelah RI kembali ke negara kesatuan.¹³ Pemogokan antara lain dilakukan di Sumatra (kecuali Palembang). Di perkebunan Sumatera Timur, massa buruh yang berjumlah 260.000 orang yang tergabung dalam SARBUPRI serentak melakukan aksi mogok. Melalui SOBSI pada awal tahun 1951, PKI melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintahan, dengan aksi-aksi mogok di perusahaan-perusahaan, perkebunan milik Belanda, pabrik-pabrik gula, perusahaan-perusahaan minyak dan angkutan kereta api serta perhubungan udara (Garuda Indonesia Airways).¹⁴ Aksi-aksi itu berdalih klasik, menuntut perbaikan nasib buruh, kenaikan upah kerja yang menurut mereka tidak sesuai lagi dengan kondisi kerja. Aksi-aksi ini mempunyai dampak besar terhadap perekonomian negara, karena pemerintah sangat bergantung pada devisa dari sektor perkebunan. Di Jawa Barat pemogokan terjadi di daerah-daerah kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Cianjur, Bogor dan Tasikmalaya. Pemogokan ini meliputi 700.000, orang buruh perkebunan. SARBUPRI menuntut kenaikan upah yang wajar bagi kaum 'buruh, terhadap pengusaha-pengusaha perkebunan yang tergabung dalam Algemeene Landbouw Syndicaat (ALS,

13. *Sin Po*, 21 Agustus 1950, hal. 1.

14. *Abadi*, 16 Februari 1951

yaitu sindikat perusahaan perkebunan) yang diketuai oleh C.F.H. de Vries.¹⁵ Mereka menuntut upah minimum 3.25 gulden (rupiah Belanda) sedangkan pihak ALS hanya menetapkan upah 2,25 gulden. Akibat pemogokan-pemogokan tersebut menyebabkan kerugian baik bagi kaum buruh sendiri, maupun pihak pengusaha perkebunan, bahkan mengganggu keamanan dan ketertiban serta masyarakat pada umumnya.

Untuk mencegah meluasnya pemogokan, pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan mengeluarkan peraturan pelarangan mogok khususnya dalam perusahaan-perusahaan Jawatan dan Badan-badan vital di semua perusahaan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Djawatan Kereta Api, perusahaan-perusahaan penerbangan dan pelayaran, pelabuhan-pelabuhan, Pos, Telepon dan Telegraf (PTT) dan radio, perusahaan minyak tanah, Jawatan air minum, rumah-rumah sakit, rumah-rumah obat, percetakan-percetakan negara, perusahaan listrik dan gas, bank-bank negara Indonesia, bagian percetakan dan perusahaan-perusahaan yang mencetak uang dan materai untuk negara.¹⁶ Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 13 Pebruari 1951. Peraturan tersebut lengkapnya berbunyi: *"Barang siapa menjalankan pemogokan atau memerintahkan, menganjurkan, mengajak, memaksa atau memancing supaya diadakan pemogokan atau penutupan di dalam perusahaan, jawatan atau badan vital dapat dihukum kurungan (hechtenis) setinggi-tingginya satu tahun, denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah"*.¹⁷

Larangan pemogokan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Menteri Pertahanan Dr. A Halim), diprotes oleh Ketua Seksi Perburuhan dalam Parlemen dan wakil SARBUPRI K. Werdoyo. Ia memprotes pemerintah dengan dalih, bahwa pemerintah telah memilih jalan yang sesat dengan menutupi pelanggaran-pelanggarannya terhadap azas-azas demokrasi. Lebih lanjut K. Werdoyo mengatakan bahwa pemerintah hanya bisa berbuat mengatasi kegelisahan kaum buruh

15. *Ibid.*

16. *Sin Po*, 15 Pebruari 1951.

17. *Ibid.*

dengan kekuatan senjatanya, dan dengan ancaman hukuman yang berat. Itu merupakan suatu tanda ke arah "fasisme" yang diikuti rakyat. Pemerintah sama sekali belum berbuat apa-apa terhadap kaum buruh, termasuk undang-undang perburuhan untuk menjamin kegiatan dan keamanan kerja. Aturan dari Menteri Pertahanan tersebut hanya menunjukkan bahwa pemerintah untuk kesekian kalinya lebih rajin membuat "undang-undang memukul" daripada "undang-undang melindungi". Atau lebih tegas dikatakannya bahwa "creatie" pemerintah dalam hal ini ialah mementingkan menghantam dari pada "melindungi". Werdoyo juga mengatakan bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah akibat nyata dari ekonomi pemerintah yang tergantung seluruhnya pada modal raksasa asing, sebagai akibat yang sangat logis dari KMB. Seakan Werdoyo menegaskan bahwa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut jelas adalah mengadu domba antara pemimpin buruh dengan massa buruh, cara tersebut sebaliknya akan menjadi bumerang yang akan membalik kepada pemerintah sendiri. Ia menuduh Pemerintah telah menyeleweng dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.¹⁸

Dengan adanya larangan mogok itu, PKI secara terang-terangan menyambut dan menganjurkan kepada serikat buruh, serikat tani dan kepada "rakyat Indonesia" yang cinta demokrasi supaya memprotes tindakan pemerintah yang anti demokrasi itu. Partai tersebut menganjurkan supaya partai buruh mengadakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat untuk membuat suatu resolusi yang mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan pelanggaran pemogokan yang hanya menguntungkan kapital asing. Bersatu untuk memprotes perkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Bersatu untuk nasib yang lebih baik, untuk pembatalan perjanjian KMB, untuk kemerdekaan nasional dan perdamaian abadi.¹⁹

Langkah selanjutnya, wakil SARBUPRI dalam Parlemen, K. Werdoyo dan wakil ketua pucuk pimpinan SARBUPRI Ahem Erningpraja membuat sebuah mosi yang diajukan dalam sidang

18. *Sin Po*, 15 Pebruari 1951.

19. *Sin Po*, 15 Pebruari 1951.

parlemen pada bulan September 1951.²⁰ Mosi itu berisi permintaan agar soal pemogokan SARBUPRI dapat diselesaikan dengan segera. Sidang parlemen tanggal 23 September 1951 yang khusus membicarakan pemogokan SARBUPRI, gagal menemukan cara penyelesaian pemogokan tersebut.



Sebagian aksi kaum buruh komunis menentang Undang-undang larangan mogok.

Oleh karena parlemen belum dapat memutuskan, maka P.M. Natsir menempuh jalan tengah untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan damai. Untuk itu atas nama pemerintah Menteri Perburuhan R.P. Suroso mengadakan pertemuan antara SARBUPRI dengan para direksi perusahaan perkebunan yang tergabung dalam ALS, masing-masing diwakili oleh E. Cordian dan Suparna, CFH de Vries dan Wilmeer. Hasil pertemuan tersebut, SARBUPRI bersama pihak ALS menandatangani perjanjian tentang upah minimal 3 gulden sehari dan selama mogok hanya dibayar 50%.²¹

20. *Sin Po*, 15 September 1951.

21. *Sin Po*, 16 September 1951.

Kalangan politisi berpendapat persetujuan tersebut telah menaikkan pamor SARBUPRI di mata kaum buruh perkebunan khususnya dan kaum buruh Indonesia pada umumnya. Dengan demikian mempermudah SARBUPRI untuk menyempurnakan dan mengkonsolidasi organisasinya.

Selain melakukan aksi-aksi mogok, PKI melakukan aksi-aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 5 Agustus 1951 PKI melancarkan gerakan kekerasan di Tanjung Priok. Gerombolan bersenjata melakukan penyerangan terhadap Markas Mobiele Brigade (MB) Kepolisian di Tanjung Priok pada pukul 19.00. Para penyerang datang dari arah Cilincing, berkekuatan ratusan orang. Mereka membawa senjata tajam dan senjata api, serta mengenakan ikat kepala merah dengan lambang palu arit.²² Markas Mobiele Brigade Polisi di Jalan Jambi diserang secara tiba-tiba. Seorang anggota Mobiele Brigade/Polisi yang berada di pos jaga dilukainya dengan senjata tajam.²³ Dalam serangan ini seorang anggota gerombolan berhasil dibunuh, sedang seorang lagi dalam keadaan luka-luka terjun ke laut. Gerombolan kemudian bubar menuju ke arah timur Kali Sindang.

Untuk mengatasi situasi peristiwa ini, Komandan Militer Kota (KMK) Tanjung Priok meminta bantuan kepada Komandan Militer Kota Besar Djakarta Raya (KMKBDR) agar mengirimkan pasukan ke Tanjung Priok. Setibanya di tempat kejadian, kesatuan yang dikirim oleh KMKBDR serta dari Kesatuan Polisi segera melakukan pembersihan.

Dalam pembersihan ini dua orang anggota polisi menderita luka-luka. Petugas keamanan berhasil menangkap 30 orang anggota gerombolan dan menyita sejumlah dokumen yang berasal dari PKI Tanjung Priok. Setelah peristiwa itu pihak aparat keamanan mengumumkan berlakunya larangan ke luar rumah pada malam hari di wilayah Komando Militer Kota, atau KMK Tanjung Priok.²⁴

22. *Merdeka*, 7 Agustus 1951.

23. *Keng Po*, 7 Agustus 1951.

24. *Keng Po*, 7 Agustus 1951.

Dalam gerakan operasi pembersihan, pihak aparat keamanan berhasil menangkap tokoh penggeraknya bernama Eteh.²⁵ Ia adalah seorang pimpinan PKI daerah Tanjung Priok.



Sejumlah oknum PKI cs. terjaring dalam razia Agustus 1951 di Surabaya.

Operasi pembersihan dipimpin oleh Letnan Satu Subianto dari KMK Tanjung Priok, dan Komandan Kompi Mobiele Brigade Sumantri. Dalam operasi lanjutan, pihak aparat keamanan berhasil menangkap 50 orang pelaku di antaranya terdapat 2 orang wanita.²⁶

Dari proses pemeriksaan intensif terhadap para pelaku, mereka mengaku anggota PKI yang mendapat perintah dari pimpinannya untuk melakukan kerusuhan di Tanjung Priok. Salah satu sasarannya adalah merampas senjata dari Markas Mobiele Brigade. Setelah memperoleh senjata mereka akan melakukan aksi-aksi teror di dalam kota.

25. *Keng Po*, 7 Agustus 1951.

26. *Keng Po*, 7 Agustus 1951.

Peristiwa ini kemudian menjadi berita utama di harian-harian ibukota. Harian *Keng Po* dengan gamblang memberitakan bahwa gerakan itu didalangi oleh PKI.²⁷ PKI melalui *Harian Rakjat* membantah berita dengan memutar balikkan kenyataan dan secara terang-terangan menuduh, bahwa dalang dari gerakan itu adalah golongan Islam dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. (DI/TII) karena mereka memakai simbol-simbol huruf Arab.²⁸

Aksi PKI berikutnya berupa peristiwa pelemparan granat pada saat berlangsung pasar malam pendidikan di Gedung Nasional Bogor tanggal 6 Agustus 1951.²⁹ Tiga puluh orang pelakunya berhasil ditangkap dan diketahui bahwa mereka adalah anggota Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) dan Pemuda Rakyat. Dalam peristiwa penggranatan ini jatuh korban 80 orang luka-luka. Meskipun Pemerintah mengeluarkan ancaman hukuman keras terhadap para pelaku peristiwa tersebut, PKI sebagai dalangnya bersikap tidak tahu menahu dan lepas tangan.

Pada awal bulan Agustus itu juga di Banyuwangi (Jawa Timur) berhasil ditangkap beberapa orang yang melakukan gerakan-gerakan untuk mendirikan pemerintahan Sovyet. Sedang di Besuki berhasil ditangkap 11 orang pegawai kantor penerangan yang terlibat dalam gerakan di bawah tanah yang diorganisir oleh PKI.

Sehubungan peristiwa di Tanjung Priok, Bogor dan Banyuwangi itu, Perdana Menteri Sukiman bersama Wakil Perdana Menteri Suwirjo mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno.³⁰ Dalam pertemuan itu dibahas mengenai masalah perkembangan politik dan keamanan dalam negeri khususnya mengenai aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI dan organisasi massanya.³¹

Setelah pertemuan itu pada tanggal 7 Agustus 1951, Perdana Menteri Sukiman mengadakan Sidang Dewan Menteri yang

27. *Keng Po*, 9 Agustus 1951.

28. *Harian Rakjat*, 9 Agustus 1951.

29. *Merdeka*, 9 Agustus 1951.

30. *Antara*, 12 Agustus 1951.

31. *Antara*, 12 Agustus 1951.

dihadiri seluruh Menteri dan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Jenderal Mayor T.B. Simatupang, Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel AH. Nasution, Kepala Staf Angkatan Laut Kolonel R. Subijakto, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Surjadarma, Kepala Kepolisian Negara (KKN) Sukanto, dan Jaksa Agung Soeprapto. Dalam sidang itu diputuskan, bahwa terhadap segala perbuatan yang bersifat anti nasional atau merugikan kekuasaan pemerintah dan nama bangsa serta mengganggu keamanan dan ketentraman pemerintah, wajib diambil tindakan tegas sesuai dengan keterangan kabinet waktu yang lalu. Kepala alat-alat kekuasaan negara diberi instruksi untuk bertindak dengan tanpa ragu-ragu mengingat peraturan-peraturan yang mengancam pemogokan masih berlaku.

Sementara itu PKI terus-menerus melakukan aksi-aksi kekerasan. Keputusan Militer No. I, diabaikan. Di daerah Sumatra Timur, PKI mendalangi aksi-aksi kekerasan dalam upaya mendukung kebijakan Politbironya. Aksi-aksi ini mereka lakukan antara lain mengintervensi terhadap susunan pengurus Panitia Peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1951. Berbagai anak organisasi PKI antara lain Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB), Serikat Buruh Kementrian Penerangan (SB Kempen), menarik diri dari kepengurusan panitia. Sebaliknya mereka mendirikan Kesatuan Aksi Nasional (KAN) dengan slogan membebaskan negara dari intervensi imperialis, yang meliputi kolonialis politik dan ekonomi. Pada tanggal 8 Agustus 1951 PKI mengadakan rapat di stasiun kereta api Lubuk Pakam yang dihadiri oleh sejumlah organisasi massa PKI. Hadir dalam rapat itu Komisaris Central PKI Sumatra Utara Jusuf Adjitorop.

Kelanjutannya, pada tanggal 11 Agustus 1951, PKI bersama anak organisasinya melakukan pengacauan-pengacauan di berbagai perkebunan, di Sumatera Timur. Untuk menanggulangi situasi kacau ini, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan Angkatan Perang dan Polisi untuk melakukan pengamanan dan penangkapan. Pada operasi ini pihak aparat keamanan berhasil menangkap lebih kurang 600 orang dan semuanya anggota-anggota SOBSI, BTI, dan SARBUPRI.

Pihak PKI melancarkan protes keras. Tindakan pemerintah dianggap tidak demokratis. Keesokan harinya pada tanggal 12 Agustus 1951 berlangsung pemogokan serentak di seluruh perkebunan daerah Sumatera Timur yang dilakukan oleh para buruh SARBUPRI dan SOBSI. Pemerintah menyerukan agar mereka menghentikan pemogokan, tetapi mereka tidak menghiraukan.

b. Razia Agustus 1951.

Aksi-aksi yang dilakukan massa komunis itu jelas membahayakan negara oleh karena itu pada tanggal 15 Agustus 1951 Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan perintah penangkapan terhadap para anggota PKI dan golongan yang membahayakan negara. Lengkapnya Surat Perintah tersebut berbunyi sebagai berikut :

- a. Membaca surat perintah tanggal 13 Agustus 1951, No. 13491/ Amat Rahasia di mana dinyatakan oleh pemerintah bahwa berhubungan dengan situasi yang menghangat dewasa ini dianggap perlu secepatnya mengambil tindakan untuk menahan orang-orang yang dianggap berbahaya.
- b. Membaca laporan-laporan yang berisi bahwa akhir-akhir ini telah disusun suatu rencana untuk melancarkan coup de'etat di Jakarta dan sekitarnya yang akan disertai dengan penculikan para Menteri dan pegawai tinggi.

Menimbang dan mengingat Pasal 56 RG. bahwa untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum, maka menganggap perlu sekali mengadakan penggeledahan terhadap rumah dan kantor yang dianggap berbahaya serta menangkap dan menahan orang-orang yang dicurigai sambil menunggu perintah selanjutnya.³²

Dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan pada tanggal 15 Agustus 1951 tersebut, sebuah tim gabungan aparat keamanan yang terdiri dari Tentara, Polisi Militer (PM), Polisi

32. *Keng Po*, 16 Agustus 1951.

Negara melancarkan operasi penangkapan di Jakarta sejak pukul 03.00 dinihari tanggal 16 Agustus 1951. Operasi penangkapan ini ditujukan kepada orang-orang yang dicurigai khususnya anggota PKI dan golongan kiri lainnya,³³ baik yang berstatus swasta atau para pejabat dalam pemerintahan dan anggota parlemen yang diduga ikut mendalangi pelbagai peristiwa pengacauan itu. Lima belas orang anggota parlemen dari Fraksi PKI ditangkap,³⁴ antara lain Ir. Sakirman, Peris Pardede, Soewono, Sumadi, Nyonya Mudigdo, Tjugito dan Hutomo Supardan. Selain anggota PKI turut pula ditangkap beberapa tokoh SOBSI antara lain K. Werdojo dan Djoko Sudjono (SOBSI), Sidik Kertapati dan Siauw Giok Tjan (BAPERKI). Sedangkan dari partai Murba antara lain Sudiono Djojopranoto dan Maruto Nitimihardjo. Markas Besar PKI dan SOBSI digeledah. Tokoh Alimin berhasil meloloskan diri dari penangkapan. Di Jakarta razia dilaksanakan oleh Komando Militer Kota Besar Djakarta Raja (KMKBDR) di bawah pimpinan Letkol Taswin dan Kepala Komisariat Kepolisian Djakarta Raja, Komisaris Besar Polisi R. Atung Kartakusumah.³⁵ Di Sumatra operasi pembersihan dilakukan di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah masing-masing.

Pada tanggal 18 Agustus 1951, kabinet Sukiman mengadakan Sidang Istimewa. Dalam laporannya Perdana Menteri Sukiman menyatakan bahwa pemerintah telah menginstruksikan kepada alat negara, polisi dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penangkapan terhadap mereka yang dianggap terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok, Bogor dan peristiwa lainnya.³⁶ Tokoh-tokoh PKI yang berhasil ditangkap antara lain Sekretaris Jenderal CC PKI D.N. Aidit, Sumadi, A. Karim DP, Suhardjono (wartawan Sin Po), Situmeang (PERBURI) dan Supranoto (SARBUPRI).

Akibat tindakan ini, untuk sementara PKI berhasil dilumpuhkan. Namun PKI meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui

33. *Pedoman*, 24 Agustus 1951.

34. *Pedoman*, 24 Agustus 1951.

35. *Keng Po*, 16 Agustus 1951.

36. Arsip Nasional RI, *Rapat Istimewa Kabinet diadakan tanggal 18 Agustus 1951, Arsip Kabinet Perdana Menteri dan Presiden tahun 1951 - 1959* (Dokumen).

Harian Rakjat, PKI menuduh pemerintah, bahwa tindakan penangkapan tersebut merupakan suatu tindakan spekulasi karena mereka yang ditangkap sebagian besar adalah anggota dan calon anggota PKI.

Walaupun PKI melancarkan kecaman-kecaman, pemerintah tetap pada pendiriannya dan melanjutkan penangkapan dan penggeledahan terhadap segala unsur yang mendukung gerakan komunis di Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dikuatkan dengan pidato Presiden Sukarno pada Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1951. Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah berketetapan hati untuk menghancurkan gerombolan bersenjata, baik yang digerakkan oleh suatu ideologi tertentu maupun yang liar, baik yang bersifat kiri maupun yang kanan, baik yang merah komunis maupun yang hijau DI/TII.

Sejalan dengan penegasan Presiden tersebut, pemerintah meningkatkan usahanya menumpas gerakan komunis dengan memutuskan hubungan PKI dengan partai komunis luar negeri. Pihak petugas keamanan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap pengurus federasi Persahabatan Indonesia - Tiongkok.³⁷ Para anggota pengurusnya terdiri atas wakil-wakil PKI dan Partai Komunis Cina. Dalam operasi ini berhasil ditangkap beberapa orang anggota Partai Komunis Cina yang duduk dalam kepengurusan Federasi Persahabatan Indonesia - Tiongkok yaitu Tio Tji Nam, Chie Chian Than yang masing-masing menjadi ketua dan sekretaris.³⁸

Penangkapan selanjutnya juga dilakukan terhadap para anggota Pengurus Perkumpulan Pemuda Tiongkok Indonesia (PPTI).³⁹ Begitu juga terhadap lembaga pendidikan milik golongan Cina Komunis yang menjadi ajang kegiatan politik. Pemerintah telah melancarkan operasi pembersihan terhadap sekolah-sekolah milik lembaga tersebut dan membubarkan organisasi Persatuan

37. *Harian Rakjat*, 18 Agustus 1951.

38. *Sin Po*, 20 Agustus 1951.

39. *Sin Po*, 20 Agustus 1951.

Guru Tjina (PGT). Beberapa orang guru dan seorang siswa telah ditangkap.⁴⁰ Mereka dituduh melakukan kegiatan politik praktis, karena dalam organisasi Persatuan Guru Tjina (PGT) terdapat seksi yang bernama Seksi Keyakinan Ideologi Komunisme.

Dengan penangkapan-penangkapan ini, dapatlah diketahui dengan jelas hubungan PKI dengan partai komunis Cina. Untuk mencegah hubungan yang lebih lanjut dan menetralisasi keadaan, pemerintah mengirim surat kepada Kedutaan Besar Cina di Jakarta yang berisi permintaan agar warganegara Cina tidak mengibarkan bendera nasional Cina sehubungan dengan keadaan yang kurang menguntungkan bagi pemerintah RI. Selain itu pemerintah dengan berbagai upaya bermaksud mempersempit ruang gerak komunis di dalam negeri dan hubungannya dengan partai komunis Cina.⁴¹

Selain di Jakarta operasi penangkapan berlangsung pula di daerah-daerah. Di daerah Sumatera Utara penangkapan dilakukan oleh para petugas keamanan dari Komando Militer Kota Besar Medan (KMKBM). Dalam operasi penangkapan berhasil ditangkap 59 orang anggota PKI antara lain Abdul Xarim M.S. dan Jusuf Adjitorop, yang keduanya merupakan tokoh PKI dari Komite PKI Sumatera Timur.⁴²

Di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung tanggal 18 Agustus 1951 aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap antara lain Radi, Ketua PKI Distrik Bandung, dan Siswo Sumarto, anggota Gabungan Rakyat Petani yang juga anggota PKI. Di Subang ditangkap pula tokoh PKI Alkap dan Lei Tun Tjong dari SARBUPRI.⁴³

Di Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang anggota partai PKI antara lain Wikana, Tjokro sunarto dan Sekretaris PKI Seksi Komite Yogya Kuntri Fistadjid, dan Suyono (SOBSI),⁴⁴ Di Jawa Timur juga berlangsung penangkapan terhadap para

40. *Harian Rakjat*, 23 Agustus 1951.

41. *Arsip Nasional*, *op. cit.*, dokumen Perdana Menteri dan Presiden.

42. *Sin Po*, 14 Agustus 1951.

43. *Sin Po*, 19 Agustus 1951.

44. *Sin Po*, 21 Agustus 1951.

anggota PKI. Dari kota Surabaya 45 orang anggota PKI ditangkap bersama 21 orang keturunan Cina. Di Keresidenan Malang 5 orang anggota PKI dan 4 orang keturunan Cina, di keresidenan Kediri 11 orang anggota PKI. Dari keresidenan Madiun ditangkap 51 orang anggota PKI dan 2 orang keturunan - Cina sedangkan di keresidenan Bojonegoro 6 orang anggota PKI. Selain anggota PKI dan orang Cina, telah pula dilakukan penangkapan terhadap anggota pengurus anak organisasi PKI, seperti SOBSI cabang Surabaya, Pimpinan SBKA Surono dan Sutomo, kemudian Oloan Hutapea, ketua PKI Surabaya. Selain itu ditangkap pula Ruslan Widjajasastra (anggota PKI Surabaya) dan Mansyur, Perjani Ilham (Gerwani), Sei Chian Tan (Ketua Persahabatan Indonesia-Tiongkok).⁴⁵ Pada waktu yang sama telah ditangkap Go Hauw Gie, salah seorang penanggung jawab *Harian Rakjat*. Pihak Kepolisian Surabaya telah melarang beredarnya majalah *The New Times*, (terbitan Moskow) yang memuat gambar dan tulisan Musso.

Tindakan pembersihan yang dilancarkan oleh pemerintah ini mengancam kelangsungan hidup PKI. Politbiro yang baru terpilih tanggal 13 Januari 1951, belum melakukan konsolidasi dan aparatnya belum sempat menarik simpati massa, terutama massa petani. Beberapa pemimpin PKI yang berhasil lolos dari penangkapan aparat keamanan, terpaksa bekerja secara diam-diam selama kira-kira satu tahun. Tindakan razia pemerintah mengakibatkan propaganda PKI dalam usaha mendukung Korea Utara, terpaksa dihentikan.

Sebagai tindak lanjut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemogokan, pemerintah mengeluarkan beberapa Undang-Undang Darurat. Pada tanggal 17 September 1951 pemerintah menyatakan berlakunya kembali larangan mogok yang telah ditetapkan oleh kabinet terdahulu (Natsir). Kemudian disusul dengan ketetapan Undang-Undang Darurat No. 16, yang merupakan cara penyelesaian yang harus ditempuh apabila terjadi sengketa buruh. Pada tanggal 18 September 1951 pemerintah mengeluarkan Peraturan Tambahan/ Informasi No.2 yang melarang

45. *Sin Po*, 21 Agustus 1951

pegawai negeri melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk menetralsir pengaruh SOBSI dalam Serikat Buruh Pegawai Negeri.

Dengan dilancarkannya serangkaian tindakan preventif oleh pemerintah, maka praktis kegiatan komunis berhasil dilumpuhkan. Perdana Menteri Sukiman kepada wartawan *New York Times* mengatakan, bahwa komunisme di Indonesia tidak banyak dan pemerintah telah berhasil mematahkan setiap langkah dari gerakan mereka.⁴⁶ Penangkapan yang dilakukan adalah upaya untuk mengikis komunisme di Indonesia.

Pernyataan Perdana Menteri tersebut dibantah oleh PKI melalui surat kabarnya *Harian Rakjat*. PKI menyatakan bahwa pemerintah telah menyatakan perang terhadap komunis di Indonesia. Seperti biasanya, PKI menolak bukti-bukti yang diajukan oleh pemerintah, dan menuduh pemerintah melanggar hukum negara. Selanjutnya PKI menyatakan bahwa Program PKI sekarang menghendaki adanya suatu pemerintahan nasional koalisi yang terlepas dari KMB.⁴⁷ Dalam rangka memperoleh simpati masyarakat, *Harian Rakjat* menulis masalah yang sama setiap hari. Maksudnya membentuk opini publik agar bersimpati pada PKI dengan dalih demokrasi. Pemerintah dinilai telah menginjak-injak demokrasi dan melanggar hukum.

Perdana Menteri Sukiman dengan tegas menjawab semua kecaman PKI, baik yang melalui media massa maupun parlemen. Pada tanggal 29 Oktober 1951 Perdana Menteri Sukiman memberikan pertanggungjawaban pemerintah kepada Parlemen. Dalam pidato pertanggungjawaban itu, Perdana Menteri menyatakan bahwa rangkaian tindakan yang diambil sejak bulan Agustus 1951 ialah setelah pemerintah memperoleh cukup bukti yang meyakinkan adanya suatu gerakan kekerasan yang didalangi oleh PKI untuk membunuh Soekarno-Hatta dan para menteri lainnya. Peristiwa

46. *Harian Rakjat*, 23 Oktober 1951.

47. *Harian Rakjat*, 23 Oktober 1951.

Tanjung Priok, adalah merupakan bukti nyata tindakan teror mereka. Para pelakunya adalah orang-orang pimpinan partai politik PKI dan pimpinan Sarekat Buruh.⁴⁸ Suatu gerakan dengan modus operandi politik, terlihat ketika PKI berusaha untuk membentuk panitia dan mengadakan upacara sendiri dalam memperingati 17 Agustus 1951. Usaha itu terpaksa dilarang oleh pemerintah. Tindakan larangan pemerintah terhadap maksud PKI berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang akan mereka lakukan identik dengan taktik front persatuan komunis yang mulai menghimpun kelompok "revolusioner" dalam rangka perebutan kekuasaan politik.⁴⁹

Mayoritas anggota Parlemen dapat menerima penjelasan mengenai rangkaian kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah guna mengatasi situasi krisis. Kelompok yang merasa tidak puas dengan keterangan tersebut antara lain dari Partai Sosial Indonesia (PSI). Pihak PSI mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Namun mosi PSI ditolak oleh Parlemen dengan perbandingan suara 91 lawan 21 suara.

4. Peristiwa Tanjung Morawa.

Pada tahun 1952 timbul kasus tanah di Sumatra Utara khususnya di Sumatra Timur. Kasus tanah ini terutama menyangkut tanah-tanah perkebunan yang terlantar digarap oleh penduduk. Keadaan yang demikian itu dimulai sejak jaman pendudukan Jepang, ketika tanah-tanah perkebunan tersebut tidak lagi mendapat perhatian dari penguasa Jepang. Pada tahun 1950 pemerintah mengembalikan status tanah tersebut sebagai tanah perkebunan.

Dalam usaha ini, pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur Sumatra Utara Abdul Hakim untuk mengambil kembali tanah-tanah pemerintah yang digarap oleh penduduk. Walaupun pemerintah melakukan tindakan

48. *Harian Rakjat*, 20 Oktober 1951.

49. *Pedoman*, 1 November 1951.

pengambilalihan, namun pemerintah memberi ganti rugi kepada rakyat, penggarap tanah milik negara di daerah Sumatra Timur, yang berjumlah 30.000 kepala keluarga (KK). Melalui Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) sejak tahun 1952 telah berhasil dipindahkan sejumlah 9.000 KK dengan mendapat ganti rugi. Sebelum melaksanakan pemindahan, pemerintah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada penggarap agar mereka menghentikan penggarapannya untuk musim yang akan datang.⁵⁰

Pada mulanya para penggarap dapat menerima dan mematuhi ajakan pemerintah. Namun setelah adanya campur tangan kekuatan politik, yang berhasil memprovokasi rakyat keadaan menjadi berubah. Dalam situasi yang demikian di seluruh daerah Sumatra Timur khususnya di lingkungan penggarap tanah, Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) telah berhasil menanamkan pengaruhnya. Di samping kedua organisasi itu terdapat organisasi Rukun Tani Indonesia (RTI) dan Persatuan Tani Indonesia (Pertani) yang juga berusaha menanamkan pengaruhnya. RTI mempunyai massa yang seimbang dengan PKI dan BTI.⁵¹ Di samping itu di daerah ini juga terdapat warganegara Cina yang juga ikut melakukan penggarapan tanah milik negara itu. Mereka mempunyai organisasi yang bernama Cung Hua Cik Kong Hui (Persatuan Buruh Tani Cina).⁵² Namun organisasi yang lebih dominan di daerah ini adalah BTI dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).

Dengan kekuatan massa yang sudah mereka pengaruhi dan dibantu oleh massa Persatuan Buruh Tani Cina serta RTI dan Pertani, maka mereka berusaha menghalangi pembebasan tanah tersebut. Dengan dalih memperjuangkan tanah, BTI, PKI dan SOBSI mulai mencari keuntungan. Para penggarap tanah diwajibkan membayar Rp. 500,- sampai Rp. 1.500,- per orang

50. *Mimbar Umum*, 14 April 1953.

51. *Waspada*, 31 Juli 1952.

52. *Mimbar Umum*, 17 Maret 1953.

kepada BTI, PKI dan SOBSI. Selain itu mereka juga menghasut rakyat agar menolak setiap usaha pemerintah untuk memindahkan mereka dari lokasi tersebut.⁵³

Walaupun Pemerintah Daerah Sumatra Utara menghadapi kendala dalam menyelesaikan masalah tanah ini, pemerintah tetap berpendirian tidak akan merubah kebijakannya mengenai pembebasan tanah di daerah Sumatra Timur. Namun pemerintah dalam mengambil tindakan, tetap berusaha melakukan pendekatan secara persuasif untuk menghindari tindakan-tindakan kekerasan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini ternyata mengalami kegagalan karena PKI, BTI, SOBSI terus menerus *melakukan agitasi-agitasi* untuk menghasut rakyat agar menolak segala macam penyelesaian.

Oleh karena segala ajakan pemerintah ditolak oleh penggarap, mengakibatkan timbulnya ketegangan antara penggarap dengan pemerintah. Pada tanggal 30 Juli 1952, Gubernur Sumatra Utara Abdul Hakim memerintahkan agar segera membebaskan tanah di Patumbak Km. 13 Medan- Tanjung Morawa di bawah pengawasan polisi. Pada pukul 09.00 Waktu Sumatra Utara (WSU) petugas segera melakukan pentraktoran. Melihat tindakan ini para petani penggarap segera mengadakan perlawanan, dengan cara melempari petugas kepolisian dan mengambil sikap tidak mau mundur.⁵⁴ Para petani ini merupakan massa PKI, BTI dan SOBSI. Menghadapi sikap penggarap yang berjumlah 100 orang ini, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan ke udara. Dengan adanya tembakan ini, akhirnya mereka mengundurkan diri. Kejadian ini merupakan awal dari ketegangan.

Sebagai akibat dari peristiwa ini, timbul beberapa reaksi dari organisasi-organisasi petani, terutama dari PKI, BTI, SOBSI. Kasus ini menjadi pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam menghadapi masalah ini DPR telah mengirim komisi pencari

53. *Mimbar Umum*, 14 April 1953.

54. *Waspadu*, 31 Juli 1952.

fakta ke Sumatra Timur. Fraksi BTI di DPR mengajukan pertanyaan kepada pemerintah tentang kasus yang timbul di Patumbak tersebut. Sekretariat Bersama Tani Sumatra Utara yang sudah dipengaruhi PKI juga mengajukan tuntutan kepada Gubernur Sumatra Utara yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Mendesak agar pedoman pembagian tanah daerah Sumatra Utara dibekukan.
- b. Menghentikan segera pentraktor dan penangkapan.
- c. Mengajak organisasi tani menjadi anggota pembagian tanah.⁵⁵

Tuntutan Sekretariat Bersama Tani Sumatra Utara ini ditolak oleh Pemerintah Daerah.

Dalam situasi demikian PKI Deli Serdang memanfaatkan keadaan ini dengan jalan menghasut rakyat agar tidak mematuhi tindakan pemerintah. Kemudian mereka juga mempengaruhi warga negara Cina di daerah Tanjung Morawa agar ikut mendukung gerakan mereka untuk tidak mematuhi seruan pemerintah.

Bersamaan dengan situasi yang demikian Jawatan Pertanian Deli Serdang mengajukan permohonan untuk memperoleh tanah seluas 5 ha. Tanah ini akan dijadikan sebagai tanah percontohan. Di samping itu juga Jawatan Perikanan Deli Serdang juga mengajukan permohonan permintaan tanah seluas 1 ha untuk dijadikan tambak percontohan. Permintaan ini disetujui oleh gubernur Sumatra Utara. Namun lokasi tanah ini terletak di kawasan yang didiami oleh 10 kepala keluarga petani warga negara Cina, imigran gelap di daerah Sumatra Utara. Sebagai tindak lanjutnya gubernur memerintahkan kepada Camat di daerah itu untuk segera membebaskan tanah tersebut. Untuk itu pada tanggal 1 Februari 1953 Camat Tanjung Morawa memanggil 10 kepala keluarga yang menghuni lokasi tersebut dan memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 1953 sudah meninggalkan tempat itu dan menempati lokasi yang disediakan pemerintah di desa Tendi dan Koraga. Namun ke-10 kepala keluarga ini tetap menolaknya.⁵⁶

55. *Waspada*, 19 Oktober 1952.

56. *Mimbar Umum*, 11 April 1953.

Dalam pertemuan itu juga pemerintah menjanjikan akan memberi ganti rugi sejumlah Rp. 300,- terhadap semua tanaman mereka, namun tawaran ini tetap mereka tolak. Di samping itu mereka menolak bermusyawarah dengan pemerintah, tanpa mengikutsertakan Cung Hua, Cik Kong Hui. Pemerintah bersedia mengikuti keinginan para penggarap ini untuk berunding dengan Cung Hua Cik Kong Hui. Ternyata hasilnya tetap gagal meskipun pemerintah telah banyak mengalah.⁵⁷ Akhirnya pemerintah tetap melaksanakan pembebasan tanah tersebut. Pada tanggal 14 Maret 1953 kembali Camat Tanjung Morawa meminta supaya mereka segera pindah. Namun penggarap yang terdiri dari 10 keluarga imigran gelap Cina ini tetap membangkang. Sementara itu traktor dari Jawatan Pertanian sudah siap untuk melaksanakan tugasnya menggusur semua bangunan di lokasi yang akan dibebaskan. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1953 rencana pentraktorasi diketahui petani Cina dan petani-petani setempat. Untuk menghadapi kenyataan ini, para petani mulai melakukan demonstrasi untuk menghalangi usaha pentraktorasi tersebut. Sebagian penduduk yang bermukim di km 24, 25 jalan Medan - Lubuk Pakam adalah massa BTI, RTI dan SOBSI, yang berjumlah 1.500 orang.⁵⁸ Mereka inilah yang digunakan oleh PKI untuk menghalangi pentraktorasi tersebut.

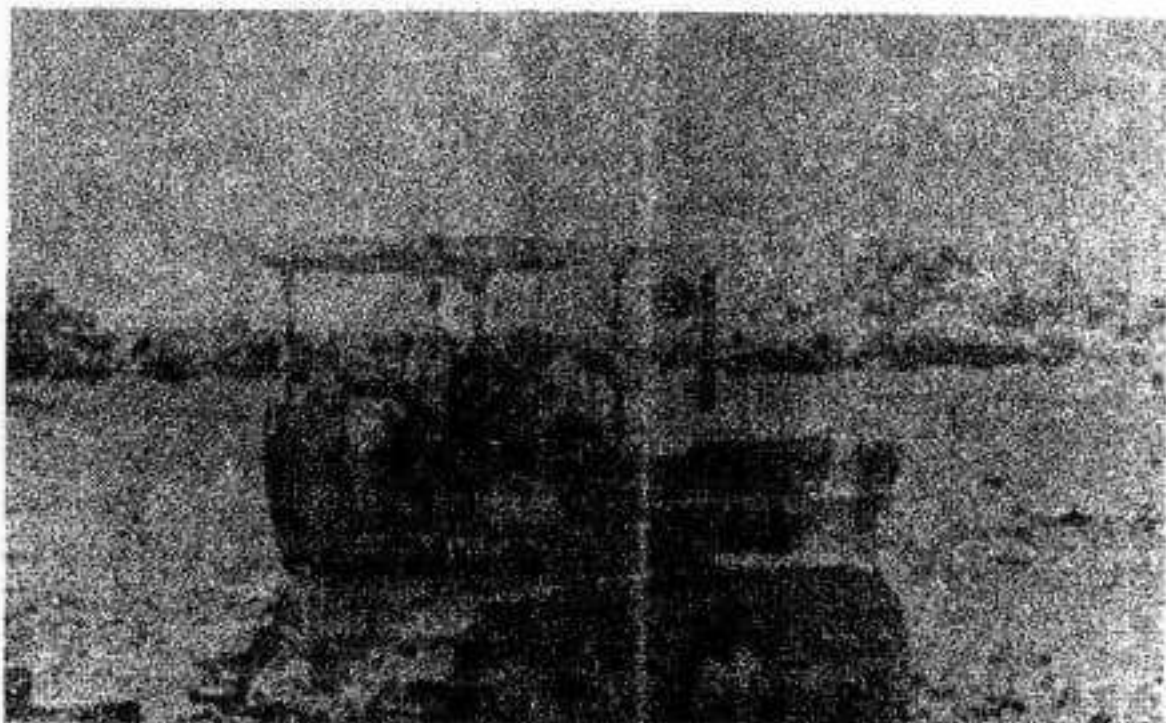
Demonstrasi ini kemudian berhasil dibubarkan oleh polisi. Akan tetapi pihak demonstrasi tetap membangkang, bahkan melakukan perlawanan terhadap polisi sambil berteriak : " Serbu saja ! Hidup Lenin, Hidup Stalin". Sebagian di antara mereka berjaga-jaga di pinggir jalan Km. 24, 25 Jalan Medan-Lubuk Pakam. Di lokasi itu ditempatkan sejumlah 60 orang polisi untuk menjaga keamanan. Pada tanggal 16 Maret 1953 pukul 08.15 WSU pentraktorasi dimulai, namun petani Cina dan petani PKI mencoba menghalangi. Para perusuh ini membuat rintangan agar supaya petugas kepolisian tidak maju terus.

Dalam keadaan yang demikian seorang petani yang bernama Achmad berusaha merebut senjata salah seorang anggota polisi. Dalam perkelahian itu anggota polisi terlempar hingga senjatanya berhasil

57. *Mimbar Umum*, 17 Maret 1953.

58. *Mimbar Umum*, 17 Maret 1953.

direbut oleh petani tersebut yang berusaha melarikannya. Akan tetapi senjata itu berhasil direbut kembali oleh polisi.



Traktor milik Perusahaan Perkebunan Negara yang dirusak oleh para demonstran komunis.

Keributan akibat dari tindakan kekerasan petani yang melakukan perlawanan, menyebabkan keadaan menjadi semakin tidak menentu. Untuk mencegah meluasnya aksi-aksi kekerasan, petugas kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara agar massa mundur. Namun yang terjadi keadaan sebaliknya. Massa terus menyerang. Dalam keadaan yang demikian tanpa diduga beberapa tembakan mengenai massa petani. Beberapa orang terkena peluru nyasar.

Dalam insiden ini 5 orang meninggal, 12 orang luka ringan dan 4 orang luka berat.⁵⁹ Pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kejadian tersebut. Pihak kepolisian Sumatra Utara melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku dari tindakan kekerasan ini. Dalam operasi pembersihan, pihak yang berwajib

59. *Mimbar Umum*, 17 April 1953.

menangkap Ketua PKI Deli Serdang Rustam Adji beserta 22 orang kawannya, di antaranya terdapat 5 orang warga negara asing Cina.⁶⁰ Kemudian berhasil disita sejumlah pamflet (surat selebaran) yang belum sempat disebarkan oleh PKI serta ditangkapnya Sekretaris PKI Deli Serdang Sanusi Sapulidi yang menggunakan nama samaran Willem.⁶¹ Surat selebaran itu berisi instruksi-instruksi dari pimpinan PKI Deli Serdang kepada para petani agar menentang setiap usaha pemerintah untuk membebaskan tanah yang mereka duduki. Selain surat selebaran ditemukan pula, surat yang berklasifikasi rahasia ditujukan kepada Ranting Comisariat (RC) PKI dan Fraksi-Fraksi Tani Wilayah Onder Seksi Comite (OSC) PKI Deli Serdang/Lubuk Pakam. Isi surat itu berupa instruksi agar setiap Ranting Comisariat, mempersiapkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa pada waktu menyambut kedatangan anggota-anggota DPR dari Jakarta, yang akan mengadakan peninjauan terhadap peristiwa tersebut. Di samping itu tiap-tiap kampung harus menyediakan spanduk-spanduk bernada tuntutan yang berbunyi :

- a. Hentikan pentraktoratan atas tanah garapan tani.
- b. Hentikan penangkapan pimpinan tani !
- c. Susun Undang-Undang Agraria Nasional progresif !
- d. Hukum, alat negara yang melanggar hukum kemanusiaan !
- e. Hai anggota parlemen ! Perjuangkan nasib tani !

Penutup dari surat rahasia itu berisi supaya pimpinan RC menjelaskan tujuan aksi dan memberi petunjuk kepada setiap peserta secara jelas. Kalau ada yang bertanya, siapa yang memimpin, jawabnya : "perut saya". Kalau ada yang menanyakan, siapa kepala atau pimpinan aksi, tunjuk kepala masing-masing.

Selain itu ditemukan sebuah surat lain, semacam surat mandat yang dikirimkan oleh Sanusi Sapulidi kepada Sidharta. Surat itu antara lain berbunyi " bahwa keputusan diskusi tanggal 14 Februari 1952 telah gagal. Oleh sebab itu diberikan mandat kepada Sidharta

60. *Mimbar Umum*, 29 Mei 1953.

61. *Abadi*, 23 Djuli 1953.

agar memberikan penerangan kepada anggota-anggota dan menggerakkan aksi.

Dengan memperhatikan sejumlah surat dan instruksi, peristiwa Tanjung Morawa benar-benar didalangi oleh PKI. Sementara itu pihak yang berwajib terus melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Setelah melalui pemeriksaan yang teliti beberapa orang dibebaskan, sisanya yang tinggal 10 orang ditahan. Dari 10 orang ini terdapat 3 orang warga negara asing, Cina. Mereka ini kemudian diajukan ke pengadilan.⁶²

62. *Mimbar Umum*, 23 April 1953.



BAB III

DARI GARIS ZHDANOV KE GARIS STALIN

1. “Wajah Baru” Dalam Membangun Partai.

Ibarat sebagai seorang penari, gerakan komunis internasional dapat meliuk ke kiri dan ke kanan. Sejak awal tahun 1951 terjadi perubahan garis kiri (Zhdanov) ke garis kanan (Stalin). Setelah setahun melalui masa percobaan, garis kanan secara formal disahkan pada kongres Partai Bolshevik ke - 19 yang diadakan pada tanggal 5 sampai 14 Oktober 1952. Pada kesempatan itu Stalin sendiri yang meletakkan garis kanan baru, tentang kerjasama dengan gerakan nasional atau gerakan non komunis lainnya.

Perubahan dari garis kiri (Zhdanov) ke garis kanan disebabkan adanya kondisi yang menuntut “fleksibilitas” dari gerakan komunis. Hal ini erat kaitannya dengan *ajaran* Lenin, bila perlu taktik dapat berubah berkali-kali dalam waktu 24 jam, kecuali strategi, sasaran dan tujuan perjuangan. Dalam mengembangkan garis kanan (Stalin) ini, PKI mempertahankan dua jalur klasik, yaitu jalur *legal* dan jalur *illegal*. Jalur pertama secara politis disebut jalur parlementer (secara konstitusional) dan yang kedua jalur revolusi sebagai jalan guna mencapai tujuan strategisnya, yaitu kekuasaan politik.

Setelah pemberontakan PKI Madiun 1948, di mata bangsa Indonesia PKI adalah pengkhianat. Mendapatkan citra sebagai “pengkhianat”, adalah suatu “pekerjaan” yang memerlukan waktu untuk merehabilitasinya. Dalam kondisi ini rupanya Aidit selaku Sekretaris Jenderal CC PKI menyadari PKI masih lemah, untuk dihadapkan dengan musuh-musuhnya yang kuat. Aksi-aksi dan tindak kekerasan yang diuji cobakan dari bawah gagal secara politis maupun gerakannya. Oleh karena itu untuk sementara waktu PKI tidak menempuh politik dengan aksi kekerasan. Dalam jangka pendek, programnya adalah konsolidasi organisasi dan dalam jangka panjang mengubah imbalanced kekuatan politik. Oleh karena itulah PKI menempuh garis kanan sebagaimana yang digariskan oleh

Moskow, yaitu jalan legal parlementer dengan dilengkapi taktik merangkul golongan non komunis tertentu.

Tahap pertama penerapan jalan baru, PKI menciptakan tema kegiatan "Menyelesaikan tuntutan-tuntutan revolusi Agustus 1945". Maksudnya, mengubah pendapat umum dengan menyentuh emosi rakyat, khususnya mereka yang tidak puas terhadap cara-cara penyelesaian revolusi kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan dinyatakan belum selesai, karena masih berwatak borjuis, bukan berwatak proletariat sosialis, oleh karena itu Revolusi Agustus 45 menurut PKI harus diubah menjadi "Revolusi Demokrasi Baru" atau "Revolusi Demokrasi Rakyat".¹ Dalam rangka melakukan perubahan secara fundamental, PKI memperoleh suara mayoritas dalam parlementer yang stabil. Dalam pelaksanaannya, PKI berusaha menempuh prosedur politik parlementer dan UUDS 1950 yang berlaku.

"Garis baru" dimasukkan oleh Aidit ke dalam percaturan politik di parlemen, melalui dukungannya kepada Kabinet Wilopo (PNI) dan kemudian Kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI).² Di sini PKI memanfaatkan persaingan antara PNI dengan Masyumi yang merupakan dua partai besar di parlemen. Dukungan PKI kepada PNI, menyebabkan PNI cenderung memberikan peluang kepada PKI. Di lain pihak PKI berusaha menjatuhkan kabinet Sukiman (Masyumi) yang bersikap sangat anti komunis. Cara ini menurut pimpinan PKI sejalan dengan tahap perjuangan yang disebut sebagai "Revolusi Demokratis", yang akan disusul revolusi lainnya, yaitu "Revolusi Sosialisme-Komunisme". Rencana strategi PKI ini bersumber pada strategi komunis Internasional yang berpusat di Moskow dan Beijing. PKI yakin kekuatan komunis di parlemen dapat memberikan pengaruh yang berskala nasional. Berlakunya demokrasi liberal, dengan bentuk pemerintahan parlementer sangat menguntungkan PKI. Pimpinan PKI, Aidit, Lukman, dan Njoto

1. D.N. Aidit, *Menuju Indonesia Baru*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955, hal. 66.

2. D.N. Aidit, *Labinya PKI dan Perkembangannya 1920 - 1955*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955, hal. 42.

belum dapat memainkan peranan yang berarti dalam kehidupan politik tanpa menunjukkan toleransi dan kesediaan bekerjasama dengan golongan-golongan non komunis. PKI belum memperoleh waktu dan kebebasan bergerak. Untuk memperoleh dukungan dan simpati dari massa golongan non komunis maupun kaum "borjuis nasional", PKI ke luar dengan "penampilan" baru sebagai usaha menghapuskan citra pengkhianat akibat pemberontakan di Madiun pada tahun 1948.

Front persatuan nasional merupakan program yang dibangun untuk menguatkan citra dan kedudukannya dalam membangun partai. Kerjasama dengan golongan non komunis semakin ditingkatkan, berdasarkan tuntutan-tuntutan ekonomi dan politik yang kongkrit. Dengan pendekatan yang luwes dan memanfaatkan permasalahan-permasalahan yang menguntungkan, PKI berpura-pura menampakkan "wajah baru". Aksi-aksi dengan kekerasan dihentikan. Garis kanan, diterapkan sesuai dengan instruksi Moskow, yang menyatakan peralihan ke sosialisme melalui parlemen. Sekretaris Jenderal CC PKI D.N. Aidit dalam pidatonya pada HUT PKI ke-23 yang diselenggarakan tanggal 23 Mei 1952 di Jakarta, menyatakan, " bahwa tiap-tiap bangsa akan melalui jalannya sendiri-sendiri untuk menuju ke sosialisme dengan berdasarkan perkembangan keadaan nasionalnya, politik, ekonomi dan kebudayaan. Untuk itu bentuk-bentuk perjuangan yang digunakan PKI adalah kegiatan yang bersifat terbuka dan legal, yang diperbolehkan oleh UU dan peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan adat-istiadat di dalam masyarakat serta mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keadilan yang menguntungkan".

Di samping menampakkan "wajah baru", PKI melakukan konsolidasi ke intern baik dalam bidang ideologi maupun organisasi. Pemahaman Marxisme-Leninisme dipadukan dengan kondisi Indonesia. Pelatihan kader melalui pelbagai program pendidikan, sesuai dengan tingkatannya. Sebagai contoh, adanya program pendidikan bagi calon anggota yang buta huruf. Selain itu ada pula sekolah-sekolah partai untuk calon anggota dan anggota baru, yang

diselenggarakan oleh CC (Comite Central) dan Comite Propinsi dan kursus-kursus di tingkat CS (Comite Seksi) dan CSS (Comite Sub Seksi). Konferensi-konferensi dan diskusi merupakan bentuk lain dari salah satu usahanya membina kader. Di bidang organisasi yang menjadi pokok perhatian adalah melaksanakan semua pedoman kerja yang telah diinstruksikan dengan mengutamakan "memadukan pimpinan dengan massa". Pedoman kerja ini mewajibkan agar anggota CC dan Comite-Comite bawahannya ikut bertanggung jawab mengurus kehidupan resort atau CSS di tempat tinggalnya masing-masing.³

Sumber keuangan utama organisasi diperoleh dari iuran anggota maupun calon anggota. Pemasukan uang iuran dikelola oleh CSS sebagai organisasi terkecil partai. Hasilnya kemudian dikirim ke Comite Propinsi yang selanjutnya diteruskan ke CC sesuai dengan ketentuan pembagian. Selain iuran, PKI mengadakan kampanye pengumpulan dana yang unik. Pada pemilihan umum 1955 untuk memilih calon anggota parlemen yang pertama dilaksanakan kampanye-kampanye. Kampanye itu dinamakan kampanye "Pohon partai", "Kebun Partai", "Ayam partai", "Kambing Partai", artinya pohon, kebun, ayam dan kambing dihibahkan kepada partai, yang disebarluaskan hingga ke tingkat-tingkat bawah dan dijadikan sebagai tradisi. Itulah cara-cara merekrut dana yang diintroduksi PKI, sekalipun secara material hasilnya kecil namun secara moral PKI berusaha menebalkan semangat cinta partai pada anggota dan pengikutnya.

Selain upaya konsolidasi, dan memupuk militansi anggotanya, PKI melakukan "gerakan penyesuaian" terhadap situasi yang berkembang, sebagai salah satu syarat dalam "memadukan hubungan pimpinan partai dengan massanya". Langkah awal gerakan tersebut dimulai dari lembaga pimpinan serta kader-kader partai, kemudian dikembangkan ke seluruh partai dan seluruh organisasi, massanya dari tingkat CC sampai ke Comite paling bawah melakukan gerakan ini.

3. Sudisman, *Konsolidasi Kerapiban dan Militansi Organisasi Partai*, Hal. 2, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964, hal 2.

Menurut Sudisman, untuk keberhasilan gerakan penyesuaian ini disusun kepemimpinan kolektif, penempatan, kader yang efektif, pembagian pekerjaan yang lebih rasional, perbaikan sistem dan mekanisme organisasi, ke dalam pengertian tentang teori revolusioner, dan kejernihan ideologi para kader.⁴ Namun persoalan terpenting adalah mengeratkan hubungan antara CC dan Komite Pulau dengan CS, antara CS sendiri dengan CSS, antara CSS dengan CR (Komite Resort). Perhatian dicurahkan pada "pekerjaan" membantu group-group dan resort partai sebagai organisasi basis partai. Organisasi basis inilah yang memegang peran aktif dalam aksi-aksi massa setempat dan selanjutnya membuat gerakan massa di lingkungannya. Pembinaan hubungan hingga ke comite-comite bawahan menjamin terpeliharanya kebulatan pikiran, kesatuan tindakan, disiplin maupun jalannya kepemimpinan dan pekerjaan harian partai. Demikianlah jabaran dari wajah baru PKI, di bawah kepemimpinan Aidit, Njoto, Lukman dan Sudisman sejak tahun 1951.

2. Program Mengubah Imbalance Kekuatan.

Di samping melalui jalur Parlemen, masih ada jalur-jalur lain guna mencapai tahapan "Revolusi Demokratis"-nya. Jalur lain itu merupakan langkah persiapan menuju tahapan revolusi, yang disebut : " pekerjaan membangkitkan, memobilisasi massa". Massa diibaratkan sebagai benteng baja yang mutlak harus direbut, sebagai sarana untuk mengubah imbalance kekuatan lawan. Lawan komunisme adalah imperialisme-kapitalisme, komprador, kapitalis birokrat dan feodalisme. Keempat lawan itu disebutnya sebagai *empat bukit setan* yang harus dilawan dengan "kekuatan rakyat". Dalam rangka menghadapi *empat bukit setan* itu, PKI bekerjasama dengan kelompok "borjuis nasional" yang memiliki obsesi terhadap kehancuran imperialisme.

Upaya PKI mengubah imbalance kekuatan dimulai sejak 1954, dengan disahkannya program baru oleh Kongres Nasional V bulan

4. *Ibid.*

Maret 1954. Program baru ini berisi antara lain:

- Sistem pemerintahan
PKI menganggap bahwa sistem negara (pemerintah) RI sampai 1954, merupakan pemerintah yang anti komunis. Dalam hal ini PKI mulai menetralsir ucapan Bung Kamo : "semua buat semua".
- Demokrasi
PKI mengecam demokrasi barat yang berlaku di Indonesia karena masih "dikuasai oleh borjuis nasional." Yang diinginkan PKI adalah "demokrasi memusat" atau sentralisme demokrasi, sebagaimana yang berlaku di negara-negara komunis.
- Angkatan Bersenjata
PKI masih menganggap bahwa Angkatan Bersenjata masih menjadi alat untuk "menindas rakyat" (baca komunis) dan berusaha membentuk "junta militer".

Dari program umum PKI tahun 1954 ini, dapat dilihat perkembangan baru strategi PKI. Kerjasama dengan "borjuis nasional" mulai dilonggarkan sekalipun tidak ditinggalkan. Presiden Sukarno mulai didekati, dengan menstir pelbagai ucapan dan pidato presiden yang menguntungkan garis politiknya. PKI tetap mencurigai Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan lawan, khususnya TNI-Angkatan Darat. Perlu dicatat sampai tahun 1954, PKI masih menganut garis kanan Stalin, yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

3. Tesis PKI Tentang Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI).

Akibat razia Agustus 1951, PKI mengalami kehancuran total. Oleh karena itu dalam tubuh PKI sudah timbul pemikiran tentang konsepsi revolusi Indonesia.⁵ Tesis PKI tentang revolusi Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang belum merdeka

5. DN. Aidit, *Kibarkan Tinggi Pandji Revolusi*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964. hal. 72.

penuh. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal. Oleh karena itu dalam kongres tersebut ditetapkan mengenai sasaran-sasaran revolusi Indonesia, tugas-tugas revolusi serta kekuatan-kekuatan pendorong, karakter dan perspektifnya. Kemerdekaan nasional penuh serta perubahan-perubahan demokratis perlu dicapai, sehingga bagi PKI pembentukan Front Persatuan Nasional atas dasar persekutuan buruh dan tani adalah sangat penting.⁶

Pada Kongres V PKI di Jakarta pada bulan Maret 1954, DN. Aidit mengemukakan tiga hal pokok yaitu: pertama, konsep tentang revolusi Indonesia; kedua, dasar-dasar untuk pekerjaan partai dalam menggalang front persatuan nasional, dan ketiga, pembangunan partai. Oleh karena itu dalam kongres tersebut ditetapkan mengenai sasaran-sasaran revolusi Indonesia, tugas-tugas revolusi serta kekuatan-kekuatan pendorong, karakter dan perspektifnya.

Menurut PKI sasaran-sasaran pokok atau musuh pokok revolusi Indonesia seperti tercantum dalam program PKI adalah imperialisme dan feodalisme terutama imperialisme Belanda. Revolusi Indonesia tidak hanya melawan borjuasi besar di negara-negara imperialisme dan tuan tanah di dalam negeri, tetapi juga melawan kaum komprador atau agen-agen imperialisme asing yang terdiri dari orang-orang Indonesia sendiri. Untuk lebih mengenal dan saling mengerti antara PKI dengan lain-lain partai dan organisasi rakyat, maka CC PKI selalu memberikan ceramah-ceramah di daerah-daerah yang pada pokoknya merupakan analisa bahwa buruknya nasib semua golongan rakyat pada waktu ini bukan karena kemerdekaan Indonesia masih baru, akan tetapi karena Indonesia sekarang ini adalah negeri jajahan model baru. Menurut PKI perjanjian KMB merupakan perjanjian untuk mewujudkan penjajahan model baru dan sama sekali bukan perjanjian untuk menyerahkan kedaulatan yang penuh. Bagi PKI yang harus dilakukan adalah harus merubah keadaan dari penjajahan model baru menjadi kemerdekaan nasional

6. *Berita Indonesia*, 10 Oktober 1953.

yang penuh. Hal ini hanya mungkin dengan jalan mewujudkan dan menggunakan satu organisasi yang mempersatukan kekuatan semua golongan-golongan rakyat mulai dari desa-desa, yaitu organisasi Front Persatuan Nasional. Untuk mewujudkan Front Persatuan Nasional ini, maka organisasi-organisasi tani, pemuda, wanita, kebudayaan dan lain-lain harus didirikan dan dikuatkan sampai ditiap desa. Disamping ini perlu dibentuk badan-badan atau panitia-panitia yang dapat mengatur adanya kerjasama antara pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota dari berbagai partai dan organisasi masa di desa-desa, kabupaten-kabupaten, propinsi-propinsi seluruh Indonesia.⁷

Selain itu Indonesia dinilai masih berada dalam cengkeraman krisis ekonomi, termasuk juga pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial. Di samping imperialisme asing, harus dilihat pula kaum komprador karena kaum komprador merupakan kaki tangannya imperialis yang ada di berbagai sektor antara lain : di pemerintahan, jawatan ekonomi, keuangan, kebudayaan, universitas, ormas, pers, angkatan perang, kepolisian, kepanitiaan resmi dan tidak resmi, badan penyelidik, keagamaan, gerombolan bandit dan lain-lain.⁸ Konsep tentang revolusi Indonesia yang disusun oleh DN. Aidit ini kemudian diterbitkan dengan judul Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI).

Menurut PKI kaum imperialisme tidak mungkin digulingkan tanpa menggulingkan tuan tanah feodal. Untuk dapat menggulingkan tuan tanah feodal diperlukan Front Persatuan Nasional anti imperialisme yang terdiri dari front buruh dan anti feodal. Dengan berpegang teguh pada teori Lenin mengenai tugas pokok partai komunis dalam revolusi di negara-negara jajahan atau setengah jajahan, Aidit berpendapat, agar PKI sukses dalam melawan imperialisme dan feodalisme, maka PKI perlu menghimpun berbagai unsur-unsur di dalam masyarakat yang

7. *Harian Rakyat*, 28 Januari 1953.

8. DN. Aidit, *Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1957, hal. 52.

dianggap sudah di “rugikan” oleh imperialisme dan feodalisme, yaitu kaum buruh, kaum tani, berjuasi kecil di kota dan borjuasi nasional di dalam suatu jajaran yang disebut Front Persatuan Nasional.

Untuk dapat keluar dari keadaan setengah jajahan dan setengah feodal, dan untuk membentuk pemerintah “rakyat”, sesuai dengan program PKI adalah mengubah imbalanced kekuatan antara kaum imperialisme, kelas tuan tanah dan borjuasi komprador di satu pihak dan kekuatan rakyat di pihak lain. Jalan keluarnya menurut PKI terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani.⁹ PKI sangat memerlukan dukungan dari massa buruh dan tani dalam perjuangannya.¹⁰ Hal ini disebut dengan *garis massa*.

Menurut PKI kaum buruh adalah kekuatan pokok revolusi yang “paling revolusioner” dan dianggap “terpercaya”. Sedangkan kaum tani menurut PKI adalah golongan yang paling terhisap dan paling tertindas apabila dibandingkan dengan lapisan-lapisan masyarakat lainnya. Oleh karena itu tugas pokok PKI adalah mendapatkan dukungan dari massa buruh dan massa tani sebanyak mungkin dengan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi kaum buruh dan tani dengan berbagai macam dalih dan propaganda agar mereka menjadi kekuatan pokoknya.

Pada Kongres V PKI, tahun 1954 itu Aidit menyatakan tekadnya untuk “meng-Indonesiakan Marxisme-Leninisme” dan menempuh taktik komunis yang klasik, yaitu “front persatuan nasional”.¹¹ Artinya PKI bekerjasama dengan golongan-golongan non komunis dan bersedia mendukung pemerintah (kabinet) sekalipun dianggap berjuasi nasional. Taktik ini sejalan dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Uni Sovyet dan

9. D.N. Aidit, *Labirnya PKI dan Perkembangannya (1920-1955)*, Pidato untuk Memperingati Ulang Tahun ke-35 PKI, diucapkan tanggal 23 Mei 1955 di Jakarta, Jajasan Pembaruan, Jakarta, 1955, hal. 45.

10. D.N. Aidit, *Konstitusi Partai Komunis Indonesia*. Jakarta, 1951, hal. 21; Lihat juga dalam “ABC Politik”. Depagitprop CC PKI, Jakarta, 1965, hal. 50-56.

11. Kolonel D. Soegondo, *Komunisme di Indonesia*, Lembaga Pertahanan Nasional, 1981, hal. 20.

RRC terhadap negara-negara baru merdeka di Asia yang dianggap netral, (termasuk Indonesia) dalam rangka "global strategy" gerakan komunis internasional.¹²

Front Persatuan Nasional yang diterapkan oleh kaum komunis adalah garis politik yang diterapkan berdasarkan penilaian atas semua kekuatan kelas di suatu negara dan berdasarkan pengalaman gerakan komunis internasional. Lenin membedakan revolusi di negeri imperialis dan revolusi di negeri jajahan dan negeri "tergantung"¹³ yakni negeri-negeri yang menderita penindasan imperialis dari negara-negara lain, sebagai berikut :

- a. Revolusi di negeri-negeri imperialisme muncul karena di negara-negara itu borjuasinya adalah penindas bangsa-bangsa lain, dianggap kontra revolusioner dalam segala tingkatan dari revolusi. Elemen nasional sebagai suatu elemen perjuangan untuk emansipasi, tidak terdapat di negeri-negeri ini.
- b. Revolusi di negeri-negeri jajahan dan negeri-negeri tergantung, karena penindasan yang dilakukan oleh imperialisme negara-negara lain adalah salah satu faktor dari revolusi.

Borjuasi nasional pada tingkatan tertentu dan untuk masa tertentu, bisa menyokong gerakan revolusioner di negerinya dalam melawan imperialisme. Revolusi di Rusia ditujukan terhadap borjuasi liberal yang kontra revolusioner karena pada zaman Tsar, Rusia juga menjajah bangsa-bangsa lain. Kaum komunis tidak bisa membikin blok dan bekerjasama dengan borjuasi liberal. Pada revolusi Cina kaum komunis bisa membikin blok dan bekerjasama dengan borjuasi nasional, karena Cina adalah negeri yang ditindas dan negeri setengah jajahan. Berdasarkan perbedaan kedua revolusi tersebut, untuk melawan imperialisme asing dalam revolusi di negeri jajahan termasuk Indonesia maka kelas buruh bisa dan perlu membikin blok serta mengadakan kerjasama dengan borjuasi nasional.¹⁴ Di

12. Drs. Soemadi, *Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*, Yayasan Tanjung Pura, 1974, hal. 16.

13. M.H. Lukman, *Tentang Front Persatuan Nasional*, Jajasan Pembaruan, Cetakan ke 2, Djakarta, 1962, hal. 7.1

14. *Ibid*, hal. 9.

dalam Sidang Pleno ke-4 Komite Central bulan Oktober 1953, PKI merumuskan program tuntutan : "Selesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya."

PKI menganalisa kekuatan kelas-kelas. Disimpulkan bahwa di Indonesia ada tiga macam kekuatan politik yang mempunyai konsepsi sendiri-sendiri. Tiga macam kekuatan tersebut adalah :

- Kekuatan "Kepala Batu", yaitu kekuatan yang menolak "perjuangan" PKI, yaitu "kaum komprador" dan "feodal", yang bertujuan untuk membikin Indonesia menjadi satu negara yang hanya bentuknya saja merdeka, tetapi pada hakekatnya tunduk pada imperialisme, membela kepentingan-kepentingan kapitalis asing dan tuan tanah.
- Kekuatan Progresif atau kekuatan maju, yang mendukung "perjuangan" PKI, yaitu proletariat dan "rakyat pekerja" antara lain kaum buruh, tani, borjuasi kecil di kota, kaum miskin, pedagang kecil, dan kaum terpelajar yang revolusioner. Kekuatan ini, sebagaimana dikatakan oleh Aidit, bertujuan untuk : "Menyelesaikan Tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya.
- Kekuatan Tengah, yaitu kekuatan yang hanya mendukung "perjuangan" PKI, apabila massa luas mendukungnya. Mereka adalah borjuasi nasional.

PKI berusaha menggabungkan dua kekuatan yaitu kekuatan tengah dan kekuatan progresif untuk melawan kekuatan "Kepala batu".¹⁵ Berdasarkan analisa ini, Kongres Nasional V PKI memutuskan, membentuk front persatuan dari semua "kekuatan nasional dari revolusi" yaitu kaum buruh, kaum tani, borjuasi kecil dan borjuasi nasional.

Selanjutnya berangkat dari front persatuan nasional lapisan bawah ini, PKI berilusi menciptakan pemerintah Demokrasi Rakyat yang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani di bawah pimpinan kelas buruh.

15. D.N. Aidit, *Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1957, hal. 57.



BAB IV

STRATEGI FRONT PERSATUAN NASIONAL

1. Usaha-usaha dan Taktik PKI Menjelang Pemilu Tahun 1955

Sesuai dengan garis strategi barunya, dalam menghadapi Pemilihan Umum yang pertama ini (1955), PKI mengadakan aliansi dengan PNI, juga mendekati partai NU, suatu partai pecahan Masyumi untuk bersama-sama menghadapi Masyumi, musuh utama PKI. PKI berusaha memanfaatkan persaingan antara PNI dan Partai Masyumi, partai yang besar pada waktu itu dan juga berusaha memanfaatkan kecenderungan-kecenderungan partai atau fraksi yang bersedia bekerjasama dengan PKI dan yang menolak bekerjasama bahkan bersikap anti komunis. PKI menarik garis siapa lawan dan siapa yang dapat dijadikan kawan untuk sementara waktu.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politiknya, langkah pertamanya PKI berusaha mencegah Masyumi dari kemungkinan bekerjasama dengan PNI. PKI menuduh Masyumi sebagai golongan borjuis besar yang melayani kepentingan kapitalis besar luar negeri dan mengemukakan adanya hubungan yang erat antara gerakan Darul Islam dengan Masyumi. Dengan meningkatnya gerakan-gerakan DI-TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh, kedudukan Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam yang besar juga mengalami kegoncangan karena diserang oleh PKI maupun PNI. PNI di bawah pimpinan Sidik Djojokusarto lebih cenderung memilih bekerjasama dengan PKI daripada dengan Masyumi. Alasannya karena PNI menganggap Masyumi sebagai saingan yang paling besar dalam menghadapi Pemilu, dan hanya dengan menggunakan PKI pengaruh Masyumi dapat diminimalkan.

Satu peristiwa yang ikut memperlancar usaha-usaha PKI dalam mengisolasi Masyumi adalah keluarnya Nadhlatul Ulama (NU) dari Masyumi.¹ Selanjutnya NU bersama-sama dengan PSII

1. *Sin Po*, 1 April 1952.

(Partai Syarikat Islam Indonesia) dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti) membentuk satu koalisi yang dikenal dengan nama “Liga Muslimin”.

Sesuai dengan garis strategi kanannya, maka PKI pada tanggal 22 April 1952 segera mengeluarkan pernyataan bahwa PKI mendukung kabinet Wilopo.² Dukungan tersebut segera diikuti oleh “tindakan yang nyata” yaitu pimpinan PKI melarang SOBSI melakukan aksi-aksi pemogokan, pada tanggal 30 April 1952. Dengan adanya larangan tersebut, pemogokan-pemogokan yang dilakukan buruh (SOBSI) berakhir.³

Untuk menjajagi kemungkinan didirikannya Front Persatuan Nasional, Aidit menugasi Alimin. Alimin kemudian mendekati rekannya sewaktu di SI yang juga pimpinan tertua Masyumi H. Agus Salim untuk bekerjasama, namun H. Agus Salim menolak. Berbeda dengan Masyumi, Ketua PNI Sidik Djojokusarto menyetujui gagasan PKI tersebut. Sidik Djojokusarto sudah lama tidak mengakui adanya kerjasama PNI dengan Masyumi. Ia sedang berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar pada kesempatan pembentukan Kabinet berikutnya PNI tidak perlu lagi harus bekerjasama dengan Masyumi. Sidik Djojokusarto berpendapat bahwa kerjasama dengan PKI lebih menguntungkan terutama dalam menghadapi masa-masa kampanye pemilihan umum. Ia berkeyakinan bahwa dengan dukungan PKI, PNI dapat membentuk kabinet seperti yang dikehendaknya. Dengan demikian PNI dapat bertindak leluasa dalam Parlemen, sebaliknya di pihak PKI dapat dengan leluasa mengorganisasi massa untuk kepentingan partainya.

Dalam rangka program Front Persatuan Nasional, PKI mulai melakukan pendekatan terhadap PNI. Hal ini dimulai pada kesempatan memperingati hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1952, PKI beserta 62 organisasi massanya mengajak PNI untuk ikut serta dalam suatu panitia bersama. Pimpinan PNI

2. *Harian Rakjat*, 1 Juli 1952; *Sin Po*, 20 Juni 1952.

3. *Sin Po*, 9 April 1952.

menerima ajakan PKI tersebut, dan dibentuklah suatu komite yang beranggotakan 17 orang di mana tiga di antaranya adalah tokoh-tokoh FDR 1948 seperti Tjugito, Sutanti, Utaryo, sedang dari PNI Sabilal Rasjad. Komite bersama ini kemudian mengeluarkan satu statement bersama yang isinya antara lain mengharapkan supaya kehidupan demokrasi di terapkan pada setiap lapangan kehidupan, dan mengajak semua rakyat untuk bersatu dalam kerjasama untuk *merebut kembali Irian Barat*.

Sewaktu diadakan resepsi untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Istana Negara, Alimin tokoh tua PKI hadir mewakili partainya. Kehadiran tokoh PKI dalam Istana Presiden ini merupakan yang pertama kalinya setelah peristiwa Madiun. Presiden Sukarno, pada waktu itu tidak begitu senang dengan peristiwa ini beserta kegiatan-kegiatan PKI lainnya. Rupanya beliau masih trauma oleh peristiwa Madiun, serta marah atas tindakan-tindakan PKI dan ormas-ormasnya yang melancarkan aksi-aksi pemogokan (tahun 1950-1952). Oleh karena jengkelnya Presiden Sukarno menyerukan kepada Ketua Fraksi PNI di Parlemen Manai Sophiaan untuk memboikot pertemuan antara partai-partai yang ikut serta dalam komite yang dibentuk PKI bersama PNI tersebut.

Kemarahan Presiden Sukarno tersebut tidak menyebabkan gerakan PKI menjadi kendor. Bahkan dalam resepsi Hari Ulang Tahun PKI yang ke 32 pada tanggal 23 Mei 1952 di Gedung Kesenian Jakarta, Aidit menandatangani kembali strategi kanannya. Ia menganjurkan supaya dibentuk Front Persatuan Nasional yang mencakup segenap kehidupan dan kepartaian di Indonesia. Ia menjanjikan bahwa PKI tidak akan mencampuri urusan intern masing-masing partai yang tergabung dalam front tersebut. Tokoh tua PKI Alimin dalam Hari Ulang Tahun tersebut ikut berbicara pula, ia meneriakkan slogan-slogan "Hidup Bung Karno, Hidup PKI",⁴ yang diikuti oleh massa yang hadir. Peristiwa itu merupakan awal pendekatan PKI terhadap Presiden Sukarno, Peristiwa ini

4. *Sin Po*, 26 Mei 1952.

mempunyai makna yang sangat penting. PKI mengubah sikap politiknya terhadap Presiden Sukarno. PKI tidak lagi menganggap Presiden Sukarno sebagai antek imperialisme, sebaliknya Wakil Presiden Hatta dan Sjahrir ditempatkan sebagai lawan politiknya, karena mereka dianggap menentang PKI.

Peristiwa yang lain dalam rangka pelaksanaan program Front Persatuan, ialah usaha keras PKI untuk menjadi Panitia Hari-hari Besar Nasional. Upaya PKI sukses, Wakil dari PKI Sumardi terpilih menjadi Ketua Panitia Perayaan 17 Agustus 1952. Pemilihannya berlangsung di Balai Kota Jakarta Raya pada tanggal 3 Juli 1952.⁵ Sebagai wakil ketua terpilih wakil SOBSI, PNI dan wakil Persatuan Marhaen Indonesia (PERMAI) sebagai Sekretaris. Sedangkan Masyumi dan PSI tidak turut ambil bagian dalam panitia tersebut.

Terpilihnya wakil PKI sebagai pimpinan pada kepanitiaan tersebut mendapat reaksi dari organisasi politik dan organisasi massa lainnya. Pada tanggal 16 Juli 1952 Masyumi cabang Jakarta, bersama 15 Organisasi Islam di Jakarta mendirikan pula sebuah panitia perayaan 17 Agustus yang dinamakan "Panitia Pembela Hari Proklamasi".⁶ Dalam statementnya yang pertama panitia ini menyatakan akan melebarkan dirinya dengan seluruh gerakan-gerakan Islam dan gerakan-gerakan yang non komunis di Jakarta untuk bekerja membela hari Proklamasi menurut isi yang sebenarnya.

Masyumi menilai kepanitiaan yang dibentuk tanggal 3 Juli tersebut sangat bersifat komunistis. Masyumi menuduh PKI hendak memakai perayaan 17 Agustus sebagai kesempatan propaganda politiknya.

Sejalan dengan strategi dan taktik PKI menjelang pemilihan umum, Aidit mengatakan bahwa "kewajiban kaum komunis yang pertama-tama ialah menarik kaum tani ke dalam Front Persatuan

5. *Harian Rakjat*, 14 Juli 1952.

6. *Harian Rakjat*, 19 Juli 1952.

Nasional". Untuk mempengaruhi petani, PKI mengadakan propaganda besar-besaran dengan tema melenyapkan sisa-sisa feodalisme, dan anti tuan tanah. Kaum tani yang tak bertanah, dan petani miskin, diiming-imingi akan diberi tanah sebagai milik perseorangan mereka, apabila PKI menang dalam pemilihan umum,⁷ merupakan propaganda sehari-hari.

Janji-janji muluk PKI kepada petani ini, untuk membujuk agar petani "menusuk" PKI. Propaganda dengan pembagian tanah terutama bagi petani miskin di Jawa sangat menarik, sehingga mereka mau menjadi anggota BTI atau organisasi massa PKI yang lain. Perluasan keanggotaan partai ini merupakan program yang ditangani secara serius oleh PKI. Aidit berpendapat, PKI harus menjadi partai yang besar, dan banyak anggotanya agar dapat mempengaruhi partai yang lain. Oleh karena itu dalam Konperensi Partai bulan Mei 1952 diputuskan untuk memperluas keanggotaan partai menjadi 100.000 orang dalam waktu 6 bulan. Pada bulan Maret 1952 anggotanya baru berjumlah 7.910 orang. Hasil propaganda terhadap kaum tani, telah meningkatkan secara spektakuler jumlah anggota PKI. PKI telah siap menyongsong Pemilu kapanpun akan diselenggarakan.

Landasan utama strategi PKI mendekati petani berdasarkan penafsiran Lenin terhadap Marxisme, mengenai petani. Petani disejajarkan dengan kaum buruh. Petani dianggap sebagai golongan yang dieksploitasi melalui faktor-faktor produksi. PKI membedakan masyarakat pedesaan menjadi dua bagian yaitu kelas revolusioner dan kelas "reaksioner".⁸ Yang termasuk kelas revolusioner menurut PKI ialah kaum "intelektual" desa yang terdiri dari guru-guru desa, para pengrajin dan tukang, pedagang kecil, pekerja kantor, buruh perkebunan, buruh industri dan petani. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelas "reaksioner" adalah tuan tanah, lintah darat, tukang ijon, tengkulak, kapitalis birokrat dan petani kaya.⁹

7. D.N. Aidit, *Djalan ke Demokrasi Rakyat Bagi Indonesia*, Jujuran Pembangunan, Djakarta, 1955, hal. 368.

8. Arbi Sanit, *Kegiatan PKI di Kalangan Petani Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 50-an*, *Majalah Persepsi*, Desember 1989, hal. 148.

9. Aidit, "Pokok-pokok Kesimpulan dari Riset Hubungan Agraria di Jawa", *Harian Rakyat*, 1 September 1964.

Untuk menarik simpati kelompok pamong desa, PKI berubah mendekati organisasi Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) yang dibentuk tahun 1946. Badan Persatuan tersebut berhasil dikuasai tahun 1951. Selain itu PKI mendapat simpati dari organisasi Marhaenis, yang tergabung dalam organisasi politik "PERMAI". Organisasi inipun berhasil dikuasai PKI. Sejak tahun 1952 dilaksanakan program tanah untuk petani, melalui taktik "kecil tapi berhasil". Salah satu usahanya ialah menghasut para petani supaya mempertahankan atau menguasai tanah milik perkebunan dan hutan reboisasi sebagai tanah garapan,¹⁰ sebagaimana yang terjadi di Tanjung Morawa atau ditempat lain. Pelaksanaan taktik ini dimaksudkan untuk memperoleh simpati dari 28.000 keluarga petani yang menggarap 80.000 hektar tanah perkebunan peninggalan Belanda di Jawa dan sekitar 400.000 hektar di Sumatra. Oleh karena itu PKI menuntut kepada pemerintah yang hendak menertibkan tanah bekas perkebunan Belanda dan hutan reboisasi melalui pelaksanaan Undang-Undang No.8 tahun 1954 supaya petani tidak diusir begitu saja dari tanah garapannya, melainkan pemerintah harus memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi atau menyediakan tanah pengganti.

Pada tahun 1957 dari 5.527.380 orang pemilik tanah sawah, 14 % adalah pemilik tanah seluas antara 1 sampai dengan 20 hektar lebih. Yang 86 % hanya memiliki tanah seluas 0,5 hektar sampai 1 hektar. Begitu pula dengan tanah daratan (lahan kering) keadaannya hampir Sama. Dari 9.155.367 pemilik tanah jenis tersebut, yang memiliki tanah seluasnya 1 sampai 20 hektar lebih sebanyak 20 %, dan sisanya ± 80 % pemilik tanah di antara 0,5 sampai dengan 1 hektar.¹¹ Kesenjangan ini secara rasional dimanfaatkan oleh PKI.

Dalam rapat umum PKI Priangan tahun 1953 di lapangan Tegallega Bandung, DN. Aidit Sekretaris Djenderal CC PKI dalam pidatonya tentang, apa sebab PKI menyokong pemerintah

10. PKI; *Tuntutan Untuk Pekerja Dikalangan Kaum Tani*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955, hal. 44.

11. Arbi Sanit, *op. cit.*, hal. 148 – 149.

Ali Sastroamidjojo dan program terpenting dari PKI, yang terbagi dalam kupasan-kupasan mengenai soal keamanan Front Persatuan Nasional, masalah kaum tani, DI dan TII. Mula-mula Aidit menyampaikan penghargaan PKI terhadap perjuangan rakyat Priangan yang dikatakan telah dengan berani dan telah membasmi gerombolan-gerombolan bersama dengan tentara.

Untuk membasmi pemberontak DI/TII, PKI bersedia bekerjasama dengan segala golongan juga anggota Masyumi, anggota PSI. Aidit menerangkan perlunya terbentuk Front Persatuan Nasional, dimana kaum tani harus turut serta untuk membatalkan KMB karena PKI sendirian tidak bisa membatalkannya mengenai kedudukan dan masalah kaum tani, Aidit mengatakan bahwa kaum tani harus dibawa serta dalam revolusi dan harus dikasih tanah oleh revolusi dengan cuma-cuma sebagai milik pribadinya. PKI juga akan bekerja mati-matian dan bersumpah setia akan menjadi hamba rakyat.¹² Dalam pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo ini pula, PKI dalam rencana programnya mengajukan dua belas tuntutan :

1. Memberikan kebebasan-kebebasan demokrasi yang seluas-luasnya kepada rakyat dan organisasi rakyat. Membatalkan semua undang-undang yang membatasi kebebasan gerakan patriotik dan terutama menghapuskan SOB.
2. Mengadakan pemilihan umum secepat-cepatnya untuk konstituante. Membentuk suatu komisi, dalam mana termasuk kaum komunis dan wakil-wakil semua partai-partai progresif, untuk membikin rencana konstitusi atas dasar prinsip yang sedemokratis-demokratisnya. Rencana konstitusi ini harus diumumkan untuk didiskusikan seluruh negeri.
3. Menjamin semua hak dan kebebasan kepada kaum buruh untuk membela kepentingan-kepentingannya yang syah. Membatalkan "undang-undang Tedjasukmana" dan undang-undang lainnya yang melarang kaum buruh mogok. Sokongan bagi kaum penganggur membayar dari kas negara

12. *Berita Indonesia*, 13 Oktober 1953.

uang pemilihan kepada kaum buruh dan pegawai-pegawai pemerintah.

4. Memperbaiki keadaan kaum tani dengan mewajibkan tuan-tuan tanah menurunkan sewa tanah. Melarang perampasan tanah dari kaum tani yang dulunya milik perkebunan-perkebunan asing tapi yang sudah lama dikerjakan oleh kaum tani. Dengan cuma-cuma memberikan dan membagikan tanah kosong kepada kaum tani tak bertanah dan tani miskin. Menghapuskan ordonansi persewaan tanah yang memberikan kekuasaan kepada menteri dalam negeri. Untuk menentukan jumlah sewa tanah dari tanah kaum tani yang disewa untuk ditanami rosela, gula dan tembakau oleh tuan-tuan perkebunan asing. Sewa tanah harus ditentukan oleh tani dan organisasi tani sendiri dan harus dijamin oleh pemerintah. Membeli tanah partikelir dengan harga dan cara pembayaran yang ditentukan oleh pemerintah, dan membagi-bagikan tanah, sawah dan ladang dari bekas tanah-tanah partikelir itu kepada kaum tani tak bertanah dan tani miskin.
5. Menindas membasmi gerombolan-gerombolan Darul Islam dan gerombolan teroris lainnya memberi hak kepada kaum tani untuk angkat senjata membela diri terhadap Darul Islam dan gerombolan teroris lainnya yang mebunuh kaum tani dan yang menghancurkan desa-desa.
6. Mendemokrasikan dan mengorganisasi alat-alat negara. Memecat dari jabatan-jabatan pemerintah, pengkhianat-pengkhianat bangsa, orang-orang reaksioner, penggelap-penggelap dan koruptor-koruptor dan supaya orang-orang ini dihukum. Mendemokrasikan tentara dan mengadakan hubungan antara tentara dan rakyat. Menyingkirkan dari ketentraman pengkhianat-pengkhianat bangsa, koruptor-koruptor, pembela-pembela MMB dan elemen-elemen fasis yang menentang Undang-Undang Dasar, menentang azas-azas demokrasi dari republik dan menghendaki bubarnya parlemen dan berdirinya diktatur militer di negeri kita.

7. Mendemokrasikan pemerintah desa dan daerah-daerah mengadakan pemilihan-pemilihan untuk ini. Membatalkan instruksi Sukiman (yang membekukan dewan-dewan desa), yang dikeluarkan oleh pemerintah Hatta dalam bulan September 1948. Menghidupkan kembali dewan-dewan desa.
8. Meninggikan panen padi dengan jalan menentukan kewajiban-kewajiban kepada pemilik-pemilik perkebunan dan dengan memberikan bantuan kepada kaum tani.
9. Mengembalikan gedung-gedung sekolah yang dipakai untuk keperluan lain kepada badan-badan sekolahan, menambah jumlah sekolah dan jumlah gedung-gedung sekolah, menjamin fasilitas-fasilitas di lapangan pendidikan bagi murid-murid dan mahasiswa dan memperbaiki nasib guru.
10. Melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia – Belanda. Mengadakan hubungan diplomatik biasa antara Indonesia dengan Belanda atas dasar persamaan yang penuh dan saling menguntungkan. Mempertahankan Irian Barat tetap sebagai daerah RI dan mengirim kembali MMB.
11. Menolak untuk mengakui perjanjian San Fransisco dengan Jepang. Menuntut kerugian perang yang adil dari Jepang. Memprotes dipersenjatainya kembali Jepang yang membahayakan keamanan Indonesia dan perdamaian di Asia dan Pasifik.
12. Menjalankan politik perdamaian yang konsekwen. Menentang pemasukan Indonesia ke dalam blok perang dan agresi. Membatalkan perjanjian MSA dengan Amerika Serikat dan apa yang dinamakan “persetujuan tentang bantuan teknik”. Menolak memberikan pangkalan-pangkalan militer kepada negara-negara lain dan menolak Indonesia ambil bagian dalam tiap-tiap aksi blok agresor.¹³

Dengan pendekatan terhadap petani, PKI memperoleh dukungan dalam menghadapi Pemilihan Umum 1955. Apabila ditambah

13. *Berita Indonesia*, 10 Oktober 1953.

dengan kerjasama antara PKI dengan PNI, maka PKI dapat leluasa bergerak di pedesaan. Kesempatan tersebut dipergunakan sebaik-baiknya oleh PKI.

Seperti telah kita ketahui bahwa kabinet-kabinet kita selalu gagal dalam melaksanakan program pemilihan umum tersebut, baik Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo maupun Ali Satroamidjojo (I). Baru pada waktu Kabinet Boerhanuddin Harahap, pemilihan umum dapat dilaksanakan. Kabinet ini dilantik Presiden pada tanggal 12 Agustus 1955. Salah satu Program Pokok dari Kabinet Boerhanuddin Harahap adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum. Dengan kesungguhan dari kabinet ini, pemilihan umum untuk pertama kali dalam sejarah RI tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaannya dilakukan dua kali, pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu. Kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante (Badan Pembuat Undang-Undang Dasar).¹⁴

Untuk dapat mempengaruhi rakyat/masyarakat ini, PKI menjalankan kampanye dengan tiga tema yang menyentuh emosi masyarakat :

Pertama, PKI menampakkan dirinya sebagai pembela Pancasila.

Kedua, PKI menampilkan figur Presiden Sukarno.

Ketiga, menampakkan diri sebagai pembela "kaum tertindas".

Propaganda yang menyentuh emosi rakyat ialah adanya pernyataan, bahwa satu-satunya calon mereka untuk Presiden adalah Bung Kamo, seolah-olah partai lain tidak menghendaki yang demikian. PKI juga membonceng Pancasila untuk mengelabui massa rakyat dalam Pemilu. Dalam pelbagai kampanye, foto Presiden Sukarno dipajang dan dibuat dalam ukuran besar.

Semua tokoh-tokoh PKI turun untuk berkampanye, seperti D.N. Aidit untuk daerah Yogyakarta, Semarang, Purwokerto dan

14. *Indonesia Raja*, 9 September 1955.

Palembang; MH. Lukman untuk daerah Banyuwangi dan Surabaya; Njoto untuk daerah Bandung, Subang, Ciarnis (daerah Priangan), dan Ir. Sakirman untuk mahasiswa di daerah Yogyakarta.¹⁵ Sebagai contoh dalam kampanye di Yogyakarta DN. Aidit berpidato yang intinya mencela Kabinet Masyumi. Ia berbicara di atas panggung raksasa, yang dihiasi oleh gambar-gambar para seniman yang tergabung dalam pelukis rakyat, gambar palu arit, gambar raksasa DN. Aidit sendiri bahkan foto ukuran besar Presiden Sukarno, guna menarik perhatian masyarakat.

Hasil kampanye PKI untuk memenangkan Pemilu tahun 1955 ini cukup mengejutkan golongan non komunis dan golongan anti komunis termasuk PNI sendiri. Di bawah pimpinan Aidit, PKI berhasil keluar sebagai partai ke-4 terbesar di samping PNI, Masyumi dan NU. PKI berhasil mengumpulkan 6 juta suara pemilu.¹⁶ Dengan kemenangannya itu semakin memperkuat kedudukan Aidit, sehingga dalam Kongres Nasional VI PKI pada bulan September 1959, ia terpilih sebagai Ketua CC PKI, yang didampingi oleh MH. Lukman, Njoto, Sudisman, Ir. Sakirman, Njono, B. Oloan Hutapea dan Peris Pardede.

Keberhasilan PKI menjadi partai ke-4 besar dalam Pemilu pertama tersebut adalah juga berkat keuletan PKI dalam usahanya mendekati tiga grup kekuatan yang satu sama lain bersaing mempengaruhi massa tani. Pertama, adalah Lurah beserta pembantu-pembantunya para pamong desa dan golongan tuan tanah. Kedua, adalah dukun dan guru-guru mistik, dalang, dan pendekar pencak silat yang terkemuka. Ketiga, pemuda-pemuda desa, mantan pejuang/gerilyawan, mahasiswa yang gagal, guru sekolah, orang-orang berpendidikan yang memberontak terhadap tradisi desa.¹⁸

Kemenangan PKI merupakan sukses paling menonjol. Mengingat partai tersebut pada bulan Maret 1952 anggotanya hanya sekitar

15. *Harian Rakjat*, 12 September 1955.

16. Nugroho Notosusanto (Editor), *Terciptanya Konsensus Nasional 1966-1969*, PN. Balai Pustaka Jakarta, 1985, hal. 1.

18. Arbi Sanit, *PKI Suatu Analisa Mengenai Sumber Kekuatan Politik di Djawa Tengah dan Djawa Timur Tahun 1951-1965*, Djakarta, 1969, hal. 189 (Skripsi Sardjana Ilmu Politik Universitas Indonesia) (Naskah tidak terbit).

7910 orang, sedangkan pada bulan September 1955 PKI telah berhasil mengumpulkan suara lebih dari 6 juta orang. Kemenangan PKI dalam Pemilu ini menyadarkan golongan-golongan non komunis, PNI, NU bahwa kemenangan kaum komunis adalah berkat membonceng "aliansi" PKI dengan PNI dan NU. Sebaliknya pemimpin PKI Aidit cs pun semakin menyadari bahwa luwes dalam pendekatan, tetapi tegak dalam prinsip membuahkan sukses. Oleh karena itu PKI semakin optimis dapat menyisihkan partai yang lainnya dalam pemilihan umum berikutnya.

Kemenangan PKI pada Pemilu 1955 tersebut menimbulkan kekecewaan pada tiga partai pemenang yang lainnya, baik PNI, Masyumi maupun NU. PNI sebagai pemenang pertama, merasa kecewa karena ditipu oleh PKI melalui kerja sama mereka. Sejak saat itu para pemimpin PNI menyadari bahwa kerjasama dengan PKI berbahaya, sehingga mereka mulai berpikir untuk kembali menggalang kerjasama dengan Masyumi dan NU tanpa PKI. Bagi NU sendiri walaupun banyak peningkatan namun tidak terlalu mencengangkan karena partai NU ini sebelum Pemilu juga sudah banyak pendukungnya. Sedangkan Masyumi sebagai pemenang kedua merasa kecewa karena dukungan rakyat kepada PKI meningkat.

Bagi PKI sendiri kemenangannya dalam pemilu tersebut dinilai cukup baik walaupun belum memuaskan. Aidit dengan bangga mengatakan bahwa PKI sebagai salah satu unsur kekuatan nasional sudah tidak dapat disangkal lagi. Ia mengemukakan bahwa pada akhir tahun 1955 anggota PKI sudah mencapai 1 juta orang. Pendukung PKI yang terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di pulau Jawa, PKI memperoleh 88 % suara. Sisanya 12 % diperoleh di luar Jawa, terutama dari daerah-daerah di mana terdapat banyak penduduk yang berasal dari Jawa yakni di Sumatra Selatan dan Sumatra Utara.

Pada pasca pemilihan umum, walaupun PKI turut keluar sebagai salah satu pemenang utama, namun PKI tidak diikutsertakan dalam kabinet baru yang dibentuk oleh PNI. PNI yang telah merasa tertipu oleh PKI tidak bersedia mengikutsertakan PKI dalam pemerintah. Selain itu dari pihak TNI Angkatan Darat yang sejak lama mengamati-

amati perkembangan PKI dengan cemas, berusaha merintangi PKI mendekatkan diri pada kekuasaan.

2. Mencaplok Organisasi Buruh.

Seusai gencatan senjata dengan Belanda pada bulan Agustus 1949, pimpinan SOBSI melakukan ofensif sekitar bulan November 1949. Mereka menuntut hadiah lebaran. Tuntutan tersebut mendapat dukungan yang luas dari massa pendukungnya. Cabang-cabang mulai di bentuk hampir di setiap ibukota kabupaten, dan mengklaim membawahi 25 serikat buruh lokal serta mempunyai 2½ juta orang anggota. SOBSI adalah organisasi buruh yang federatif di mana organisasi-organisasi buruh bergabung. Sekalipun organisasi ini berjuang untuk kepentingan buruh namun sejak didirikan pada tahun 1945 pimpinannya direbut dan dikuasai oleh orang-orang komunis.

Anggota perorangan SOBSI yang mayoritas berpenghasilan rendah, tingkat kehidupan sosialnya juga rendah. Front persatuan yang digalang oleh PKI melalui buruh (SOBSI) ini semakin meningkatkan aktivitas, aksi dan tuntutanannya sejak organisasi ini menjadi organisasi massa PKI. Organisasi buruh yang tergabung dalam SOBSI adalah, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI), Serikat Buruh Gula (SBG) yang berdiri sejak 1946. Pada tahun 50-an serikat buruh ini mempunyai 700.000 orang anggota. Anggota SOBSI lainnya yang mempunyai cukup banyak anggota adalah Serikat Pegawai Daerah Autonom (SEPDA), yang didirikan pada bulan Juni 1947 dan Sarekat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU). Semua organisasi massa buruh ini merupakan elemen yang sangat penting bagi PKI dalam usahanya menguasai massa di perkotaan dan di pedesaan.

Penguasaan sarana transportasi dan komunikasi menjadi sasaran PKI, karena bidang ini merupakan sarana kunci yang sangat vital dalam suatu negara. Oleh karena itu PKI berusaha sekuat tenaga untuk menguasai sarana komunikasi dan transportasi.¹⁹ Serikat

19. PKI, *Resolusi Tentang Laporan Umum CC PKI kepada Kongres Nasional ke-VI*, Djakarta, 1959, hal. 90.

buruh transport yang secara historis di bawah pengaruh PKI dan bergabung dalam SOBSI adalah : Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), yang didirikan pada bulan Maret 1946 dan Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKSB), Serikat Buruh Pos Telepon dan Telegraf (SBPTT) yang pada tahun 1955 mempunyai 55.000 orang anggota, Serikat Buruh Angkutan Udara (SERBAUD), yang mempunyai anggota tidak lebih dari 3.000 orang, serta Serikat Buruh Kapal Dok dan Pelayaran yang menguasai transportasi laut.

Sampai dengan pertengahan bulan Agustus 1951, SOBSI mengklaim mempunyai 3.000 kader. Sekalipun pemimpin puncak SOBSI telah dipegang oleh orang-orang PKI, namun tidak sampai ke tingkat bawahnya. PKI mulai menancapkan pengaruhnya dalam tubuh SOBSI sejak bulan Maret 1952. PKI mengadakan disiplin partai atau pembersihan terhadap pemimpin SOBSI yang bukan komunis di tingkat bawah. Beberapa pimpinan SOBSI yang tidak setuju dominasi komunis dengan cepat disingkirkan. Kegiatan kader-kader PKI dalam SOBSI diintensifkan. Yang termasuk anggota SOBSI yang lain adalah Serikat Buruh Film Indonesia (SARBUFIS).²⁰ Anggota SARBUFIS pada umumnya adalah para pemain ketoprak atau drama tradisional yang populer di pedesaan Jawa.

Sejak tanggal 1 Maret 1952 CC PKI menyerukan agar SOBSI memainkan peranan dalam front persatuan nasional, dan karakter radikal SOBSI diperbaharui untuk mendukung politik front persatuan nasional PKI. Dengan demikian berarti SOBSI harus bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan non komunis di Indonesia.

Pada bulan September 1952, SOBSI mengadakan konperensi nasional. Konperensi ini menerima kebijaksanaan PKI tentang front persatuan nasional dan SOBSI harus segera menyesuaikan diri. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor :

Pertama : dari segi keanggotaan jumlah anggotanya besar dan hubungannya luas dengan organisasi buruh di luar SOBSI.

20. *Harian Rakjat*, 6 Juli 1960.

Kedua : hampir semua kabinet bekerjasama dengan SOBSI karena mempunyai anggota dari semua golongan.

Ketiga : SOBSI dapat membuat dirinya menjadi moderat, karena itu dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan demikian SOBSI bukan saja efektif untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh, tetapi juga efektif memperjuangkan kepentingan PKI.

Secara umum dapat dikatakan SOBSI telah memberikan keuntungan bagi PKI dalam tiga hal pokok, yaitu memobilisasi dukungan massa bagi PKI, mempermudah pelaksanaan front persatuan nasional dan secara langsung membantu PKI khususnya dalam bidang agitasi dan propaganda.

Di bawah konstitusi baru SOBSI yang dibuat dalam konperensi tahun 1952, keanggotaan SOBSI terbuka untuk semua organisasi buruh, suku, jenis kelamin, agama dan politik. Dengan konstitusi yang baru ini SOBSI mengklaim sebagai pembela kepentingan buruh secara umum. Perjuangan untuk kemerdekaan nasional bukanlah urusan SOBSI atau kaum buruh semata-mata, tapi ia adalah kepentingan dari seluruh golongan yang dirugikan oleh imperialisme, yaitu kaum buruh, kaum tani, kaum intelektual, pengusaha kecil, pengusaha nasional dan golongan-golongan lain.

Untuk ini SOBSI telah menunjukkan bahwa satu-satunya jalan untuk bisa mencapai tujuan itu ialah menggalang dan memperkuat Front Persatuan Nasional, dimana terus menerus menyusun kekuatan Front Persatuan Buruh baik yang tergabung maupun tidak tergabung dalam SOBSI. Sejak Kongres di Malang tahun 1947, SOBSI telah menjadi anggota World Federation Trade Union (WFTU) atau Gabungan Sarekat Buruh Sedunia. Dengan melalui SOBSI kaum buruh Indonesia mempersatukan diri dengan kaum buruh dan rakyat seluruh dunia. Itulah yang ditunjukkan SOBSI dalam garis perjuangannya.²¹

21. *Harian Rakyat*, 15 Februari 1953, World Federation Trade Union



Para wanita berdemonstrasi menuntut turunya harga sandang-pangan.

Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan PKI yang menjalankan strategi kanan, untuk memobilisasi massa dalam rangka menghimpun kekuatan.

Pada Kongres Nasional bulan Januari 1955, Konstitusi SOBSI 1952 diubah. Yang perlu dicatat dalam konstitusi baru ini kata komunisme" diganti "sosialisme", "sentralisme" diganti "demokrasi rakyat". Para pemimpin SOBSI menjelaskan bahwa konstitusi SOBSI 1947, terlalu menekankan kepada "memobilisasi semua buruh untuk mencapai masyarakat sosialis, telah gagal. Tugas para buruh Indonesia tidak hanya menentang kapitalisme dan membangun masyarakat sosialis, tetapi bekerjasama dengan para petani, borjuis kecil dan bukan para komprador, borjuis nasional yang menentang imperialisme dan membangun masyarakat demokratis-sosialistis sebagai langkah pertama menuju masyarakat komunis.

Pada bulan November 1954 secara umum kepemimpinan SOBSI dari tingkat yang paling tinggi sampai terendah sudah didominasi oleh orang-orang PKI.

Dominasi PKI dalam tubuh SOBSI terus berlanjut. Sejak Kongres Kedua SOBSI yang diadakan pada bulan Januari 1955, kepemimpinan SOBSI sepenuhnya diisi oleh orang-orang PKI. Sejak itu setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan pusat SOBSI sesungguhnya merupakan kebijaksanaan pimpinan PKI. Selain itu PKI juga memberikan pelatihan dalam bidang administrasi, keuangan, pelatihan kader-kader, pelatihan anggota dan metode aksi pemogokan.

Sampai tahun 1955, organisasi buruh telah seluruhnya dikuasai oleh PKI melalui pelbagai cara. Pada bulan Februari 1956, Dewan Nasional SOBSI memutuskan untuk memberikan sistem program pendidikan dari tingkat pusat hingga daerah (cabang-cabang). Dalam perkembangan selanjutnya sejak bulan Oktober 1956 sistem pendidikan di SOBSI disesuaikan dengan program pendidikan PKI.

Dalam hubungan ini pendidikan kader tidak hanya melambangkan pengaruh PKI terhadap SOBSI dan anggota serikat buruh lainnya, khususnya ketika sistem pendidikan kader di SOBSI disesuaikan dengan program pendidikan PKI. Para kader SOBSI setelah mengikuti pendidikan berupa indoktrinasi politik, mereka diberi kemudahan untuk berkunjung ke negara-negara blok komunis.

Sebagian program pendidikan SOBSI disebarluaskan melalui media bulanan SOBSI bernama *Bendera Buruh*. Pada bulan Mei 1957 sirkulasi majalah ini hanya 5.500 eksemplar, dan pada bulan April 1958 bertambah menjadi 5.750 eksemplar. Pada tahun 1959 sirkulasinya naik menjadi 15.000 eksemplar. Dengan demikian sejak itu media bulanan *Bendera Buruh* dijadikan sebagai jurnal organisasi buruh.

SOBSI juga meng"klaim" memiliki anggota di "luar buruh" sebanyak 800.000 orang. Mereka itu para pegawai negeri yang tergabung dalam bentuk Serikat Pegawai Pemerintah (SPP), Serikat Buruh Kementerian Pertahanan (SBKP), dan Serikat Buruh Kependaraan (SBK).

Di lingkungan industri, SOBSI menyusun organisasi buruh tekstil, minyak, tambang metal dan rokok. Buruh industri tekstil dan konveksi termasuk batik tergabung dalam Serikat Buruh Tekstil (SB Tekstil). Persatuan Buruh Minyak (PERBUM) diorganisasikan bersama buruh tambang sejak tahun 1956. Buruh industri rokok sejak tahun 1962 ikut pula diorganisasikan.

Yang patut dicatat di sini adalah kesabaran PKI dalam menunggu momentum yang tepat. Dengan dalih disiplin organisasi, pimpinan SOBSI yang tidak sejalan dengan strateginya disingkirkan.

3. Pendekatan PKI Terhadap Petani.

Berdasarkan ajaran Lenin mengenai petani, sebagai kelas revolusioner, sejak tahun 1948 PKI tertarik kepada kekuatan petani. Pada bulan Agustus 1948 Politbiro mengumumkan bahwa tanpa dukungan aktif para petani, revolusi nasional akan gagal. Masalah ini kembali dibicarakan dalam Kongres Nasional V bulan Oktober 1954. PKI kemudian menyusun suatu program agraria, di mana untuk orang miskin, petani kecil dan petani menengah, serta buruh dapat diciptakan aliansi dengan PKI. Pimpinan PKI menyatakan pentingnya aliansi ini sebagai jalan menuju revolusi agraria.

Dalam tulisannya Aidit mengatakan : "Revolusi agraria sesuatu hal yang sangat penting dalam revolusi demokrasi rakyat di Indonesia. Oleh karena itulah bagi PKI kerjasama dengan petani adalah sesuatu yang sangat penting". Ia menambahkan bahwa "para petani itu tidak jarang curiga kepada sesuatu partai". Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun partai yang mengerti dan yang tahu mengenai pertanian, hidup dan tuntutan para petani. Para pemimpin komunis selalu berslogan "semua tanah untuk negara" dan "nasionalisasikan semua tanah", membuat petani curiga sebab mereka tidak mengerti akan hal itu. Selanjutnya, partai tidak teliti dan tidak revolusioner dalam program agraria, yang dapat membantu para petani. Aidit mengoreksi kader-kader partai PKI yang tidak bekerja dengan

serius di lingkungan para petani dan perluasan anggota partai di lingkungan pedesaan, khususnya petani miskin dan buruh tani amat penting. Sejak 1953 PKI benar-benar melaksanakan program agrariannya dengan sasaran petani dan wilayah pedesaan.

Kader-kader PKI mulai masuk desa, mereka menciptakan tuntutan-tuntutan, slogan-slogan menghasut yang dikatakannya berasal dari petani. Bentuk tuntutan itu dapat dibuat berupa slogan. Sebagai contohnya "Turunkan sewa tanah", "Turunkan pajak tanah", "Hapuskan setoran paksa", "Hapuskan kerja rodi", dan lain-lain. Semua slogan tuntutan itu dimaksudkan untuk merangsang para petani menjadi "revolusioner" dan berpihak kepada PKI. Kader-kader PKI dilarang melibatkan diri secara luas dan bertentangan dengan petani. Tujuannya agar tercapai aliansi antara buruh dan petani dalam rangka pelaksanaan strategi front persatuan nasional.

PKI menggolong-golongkan petani atas beberapa tingkatan sosial yang didasarkan pada tanah yang dimilikinya. Sasaran pokok adalah para petani yang tidak punya tanah, mereka sangat peka terhadap masalah pemilikan tanah. Tuntutan yang diciptakan harus berbeda pada tiap tingkatan sosialnya, karena kondisi petani juga berbeda-beda di tiap daerah. Secara sistematis penggolongan petani dimulai awal tahun 1958. Pada tahun tersebut para kader PKI menciptakan tema kampanye "Turun ke desa", "Hidup, makan dan bekerja bersama petani".

Pada Kongres PKI bulan Maret 1954 diumumkan bahwa sekitar 165.206 anggota PKI adalah asli petani. Petani asli ini bekerja dalam bidang kehutanan dan daerah perkebunan gula, di mana SOBSI aktif menggalang mereka.

Pada awal kepemimpinan D.N. Aidit Januari 1951, PKI telah menguasai tiga organisasi petani yaitu RTI (Rukun Tani Indonesia), Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Serikat Tani Indonesia (SAKTI). Pada tanggal 2 Juli 1951 tiga organisasi ini mendirikan organisasi Front Persatuan Tani (FPT) dengan program dan tuntutan yang sama. Selama dua tahun (1951-1953) FPT paling banyak mengeluarkan pernyataan dan tuntutan yang sebagian besar berisi

masalah politik dan sebagian kecil masalah kepentingan petani. Pada tanggal 14 - 20 September 1953 BTI dan RTI mengadakan kongres bersama yang kemudian kedua organisasi sepakat untuk bergabung, di bawah satu nama BTI.²² Pada waktu bergabung, BTI mengaku mempunyai 240.000 orang anggota, sedangkan RTI mempunyai 120.000 orang anggota. Sayap komunis yang lain dalam organisasi petani adalah SAKTI. Setelah mengadakan kongres pada bulan Juni 1955, SAKTI meleburkan diri ke dalam BTI.

Ketika terjadi peleburan antara BTI dan RTI, PKI sedang mempersiapkan diri sebagai kontestan pemilihan umum. Konsentrasi kampanyenya di daerah pedesaan di Jawa. Di sini peranan BTI amat menentukan. Organisasi petani SAKTI berhasil ditaklukkan dan bergabung dengan BTI dalam tahun 1955. SAKTI mempunyai 42 cabang, 378 ranting dengan 200.000 orang anggota. Menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 1955 program BTI tidak berbeda dengan program PKI. BTI mengaku anggotanya berjumlah 3.315.820 orang. Praktis BTI memegang peranan sebagai pemimpin di antara pesaing-pesaingnya dari Masyumi, PNI dan NU.

Pada Kongres VI BTI tanggal 5 - 12 September 1957, Sarjono berhasil menggeser Alimin dari posisi ketua BTI. Setelah kongres, pada kepemimpinan baru BTI didominasi oleh orang-orang yang loyal kepada Aidit. Mereka ditugasi mengintensifkan program agraria, sebagai sarana menguasai petani.

Dalam program agraria ini PKI menanggalkan sama sekali semboyan "kecil tetapi berhasil", yang dianggap hanya membuang-buang waktu. Slogan tuntutan pengurangan sewa tanah saja, dianggap tidak cukup. Tuntutan baru berupa tuntutan pemenuhan kebutuhan lain, seperti pembagian pupuk, memperbaiki saluran air, memperbaiki kolam ikan dan pemasarannya.

Semua tuntutan itu ditujukan kepada pemerintah, karena pemerintah dianggap tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Slogan tuntutan seringkali dibarengi dengan demonstrasi untuk

22. *Harian Rakyat*, 21, 22 September 1953.

meyakinkan petani bahwa PKI memperhatikan dan membela petani. Para kader diinstruksikan agar membantu para petani terutama bila mereka sakit, atau mendapat musibah dan kematian. Pada kesempatan itu kepada petani dipropagandakan bahwa segala penderitaan yang mereka alami itu disebabkan oleh penghisapan (eksploitasi) dan penindasan para tuan tanah. Akibat penindasan para tuan tanah itu, tingkat kesehatan para buruh tani dan petani miskin menjadi sangat buruk. Umur mereka menjadi pendek karena kelelahan, anak-anak mereka bahkan mati sebelum berumur 6 tahun. Istri-istri mereka juga sering meninggal sewaktu melahirkan dan sebagainya.

Para kader PKI dan BTI membatasi ruang lingkup tugasnya mengingat keadaan sosial di pedesaan Jawa relatif tenang tidak diusik, karena para petani perlu dikondisikan sebelum mereka bisa bertindak terhadap para tuan tanah. Kampanye untuk menggerakkan petani (miskin) guna melawan para "tuan tanah", dilakukan secara tidak menyolok.

Dukungan petani terhadap kepemimpinan Aidit sangat penting, sebagai kunci pembuka kemenangan kaum komunis. Kemenangan PKI dalam pemilu tahun 1955 membuat tekanan pemerintah terhadap PKI menjadi longgar. Pemerintah tidak dapat menekan popularitas PKI yang berhasil mendekati golongan petani.

Dukungan petani terhadap kemenangan PKI dalam pemilu tahun 1955 amat besar. Petani memberikan suara sebanyak 16,4% dari jumlah suara yang diperoleh PKI. Peranan dukungan petani juga besar pada PKI ketika diadakan pemilu tingkat daerah tahun 1957. Pada waktu itu petani memberikan dukungan 27,4 persen dari jumlah suara yang diperoleh PKI.

Dalam sistem demokrasi parlementer, PKI mempunyai posisi yang kuat, yang berarti awal dari kaum komunis untuk memasuki pemerintahan yang bersifat koalisi. Sistem demokrasi parlementer memberikan peluang bagi PKI, atas keberhasilannya memperoleh simpati dari petani, karena secara konkrit mereka bekerja di kalangan para petani.

Oleh karena itu tidak heran sejak Kongres ke-5 bulan September 1959, PKI berpendapat bahwa revolusi agraria adalah unsur yang penting dalam revolusi Indonesia,²³ dan petanilah yang mudah dimobilisasi.

4. Pendekatan PKI Terhadap Organisasi Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar.

Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI memperhatikan pemuda dan organisasi massa pemuda. Organisasi Pemuda PKI yang semula bernama Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang didirikan pada bulan November 1945, jumlah anggotanya berkisar antara 50.000 orang sampai 100.000 orang. Ketika terjadi pemberontakan PKI Madiun, hampir semua pemimpin dan anggota Pemuda Sosialis Indonesia terlibat dalam pemberontakan tersebut. Sekalipun terlibat dalam pemberontakan Pesindo tidak dibubarkan.

Pada tanggal 4-12 November 1950 Pesindo mengadakan kongresnya yang ketiga di Jakarta, yang dihadiri oleh 149 cabang. Pada kesempatan ini nama Pesindo diubah menjadi Pemuda Rakyat (PR). Dalam kongres ini, mereka memasang gambar Presiden Soekarno yang berukuran besar di samping gambar Mao Ze Dong (dulu Mao Tse Tung) pemimpin partai komunis Cina. Pemasangan gambar ini merupakan indikasi untuk memperbaiki citra mereka karena pernah terlibat dalam pemberontakan Madiun. Kongres ini dianggap sebagai kemenangan bagi Aidit dan groupnya, yang kemudian menguasainya. Pada kongres ini Wikana yang menentang kebijaksanaan grup Aidit disingkirkan dari kepemimpinan PR.

Setelah kongres November 1950 itu, Pemuda Rakyat (PR) menyebut dirinya bukan organisasi massa PKI, meskipun sehari-hari menyuarakan politik PKI. Selain itu Konstitusi Pemuda Rakyat yang baru membolehkan setiap pemuda dari golongan manapun masuk ke Pemuda Rakyat.

23. *Harian Rakyat*, 2 Januari 1961.

Pada bulan Juni 1953 Dewan Nasional Pemuda Rakyat mengayunkan langkah pertama memperluas keanggotaan dari 70.319 orang menjadi 150.000 orang pada akhir tahun 1953. Kampanye Pemuda Rakyat ke pedesaan rupanya berhasil dengan baik sebab 75% anggotanya adalah petani miskin. Akhir tahun 1955 80% anggotanya adalah petani sedangkan sisanya adalah buruh, karyawan, pelajar dan mahasiswa, dan yang lain adalah pedagang kecil dan nelayan. Dari jumlah itu 5%-nya adalah wanita.

Pada kongres ke-5 Pemuda Rakyat yang diadakan pada bulan Juli 1956, masalah pendidikan kader diangkat sebagai tema kongres. Realisasi dari hasil kongres itu diadakan usaha-usaha menyediakan materi-materi publikasi yang dapat digunakan oleh para kader, tetapi rupanya kurang berhasil. Selama kampanye pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, Komite Eksekutif Pemuda Rakyat menginstruksikan kepada anggotanya untuk mempelajari tulisan Aidit yang berjudul *Untuk kemenangan Front Persatuan Nasional dalam Pemilihan Umum*. Kongres menyebutkan bahwa pendidikan kader hendaknya dikonsentrasikan pada tingkat pusat dan propinsi serta kabupaten dengan cara diskusi kolektif untuk semua pemimpin dan anggota group. Dalam diskusi ini dibicarakan mengenai masalah cara menerapkan teori Marxisme-Leninisme dan hubungannya dengan perjuangan PKI. Di samping itu ditekankan oleh para pemimpin Pemuda Rakyat bahwa kunjungan ke negara-negara blok Soviet adalah sama pentingnya dengan pendidikan. Sebagai contoh pada tahun 1951, 63 orang Pemuda Rakyat dikirim ke Berlin, tahun 1953 sebanyak 600 orang dikirim ke Bukares, 1955 ke Warsawa, tahun 1957 ke Moskow.²⁴

Sampai akhir tahun 1957 telah terbentuk 802 cabang Pemuda Rakyat dan mempunyai 800.000 anggota. Pada bulan Juli 1958 Dewan Nasional mempunyai target 1.200.000 anggota. Pada Seksi Perkotaan, Pemuda Rakyat meluaskan keanggotaannya pada pelajar SLTA dan mahasiswa dan menerbitkan majalah organisasi Generasi Baru.

24. *Harian Rakyat*, 10 Juli 1953, 28 Juli 1955, 10 September 1957 dan 28 Juni 1962.

Aktivitas politik Pemuda Rakyat sejalan dengan kebijaksanaan PKI. Sukatno Sekretaris Jenderal Pemuda Rakyat, menulis pada tahun 1955, bahwa melalui jalan atraksi massa, pemuda mengetahui adanya kebangkitan pemuda dan pelopornya Pemuda Rakyat.

Sebagai contoh, program umum tuntutan Pemuda Rakyat dikemukakan pada kongres bulan Juli 1956, berisi dua puluh tuntutan umum, tujuh tuntutan untuk buruh pemuda, sebelas untuk petani dan lima belas untuk mahasiswa. Ruang lingkup dari tuntutan yang demikian luas ini menyangkut kepentingan buruh muda, seperti perbaikan gaji, keamanan kerja dan kondisi kerja, penghapusan diskriminasi gaji berdasarkan jenis kelamin dan umur, pembagian kebutuhan pokok yang harganya terjangkau dan bea siswa pendidikan dari pemerintah maupun pemilik pabrik.

Program tuntutan yang penting biasanya dilakukan oleh Pemuda Rakyat sendiri, hanya kadang-kadang bekerja sama dengan PKI atau organisasi massa PKI yang lain.

Pemuda Rakyat keanggotaannya terdiri atas pemuda segala lapisan masyarakat. Aktivitasnya di bidang olah raga, menarik perhatian klub-klub olahraga pemuda seperti cabang bola volly, badminton, sepak bola, tenis dan catur. Festival Sport Nasional di bulan November 1958 yang diadakan oleh Pemuda Rakyat diikuti hampir semua organisasi pemuda di Indonesia. Aktivitasnya di bidang budaya belum begitu menonjol.

Di samping pemuda, PKI juga mendekati pelajar. Organisasi pelajar yang didekati adalah Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). IPPI adalah organisasi pelajar yang dibentuk di Yogyakarta bulan September 1945. Dalam organisasi ini anggotanya terdiri para pelajar SLTA dan beberapa di antaranya mahasiswa. Dalam bulan Februari 1948 bersatu dengan Serikat Mahasiswa Indonesia yang kemudian menjadi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). Pada waktu perang kemerdekaan IPPI aktif memobilisasi para pemuda untuk menentang Belanda.

Pada tahun 1950 Sujono Atmo seorang komunis terpilih menjadi pimpinan IPPI. Sejak tahun 1950 itu orang-orang komunis telah menguasai beberapa cabang IPPI di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemimpin-pemimpin non komunis menjadi sadar dan kemudian mencoba untuk merebut IPPI dan dalam pemilihan pengurus IPPI tahun 1954, IPPI bebas dari pengaruh komunis. Namun sesudah itu terjadi perpecahan dalam tubuh IPPI Jakarta, antara yang komunis dan non komunis. Pada tahun 1957, karena pusat tidak dapat mengadakan kongres agaknya takut pemimpinnya jatuh ke tangan orang komunis, maka IPPI Bandung mengambil inisiatif mengadakan kongres yang didukung oleh pemimpin komunis yang lain. Kongres kemudian memilih dewan pengurus baru dan IPPI kemudian terpecah dua yang masing-masing saling mengklaim dirinyalah yang sah.

Pemimpin komunis dari IPPI mengkonsentrasikan kegiatannya pada bidang olah raga, sosial dan budaya dan mereka sering mendapat bantuan dari Pemuda Rakyat. Akan tetapi dalam praktek, IPPI digunakan sebagai alat politik oleh PKI, terutama dalam mendukung program PKI, demonstrasi dan protes-protes. Pendekatan PKI terhadap mahasiswa kurang berhasil karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga sedikit saja mahasiswa yang tertarik pada ideologi komunis. Hal ini akibat dari sikap dan pernyataan para pemimpin PKI, yang bersikap memusuhi golongan intelektual dan menyatakan bahwa ideologi borjuis dan individualisme dominan dalam universitas. Pelajar-pelajar yang memasuki perguruan tinggi semangat progresifnya luntur berganti dengan ideologi borjuis. Untuk mengatasi kendala ini PKI melakukan aksi sosial membantu pelajar yang miskin dengan maksud memelihara kesadaran politiknya.

Awal mula pendekatan baru terhadap mahasiswa, adalah mendirikan organisasi perkumpulan mahasiswa lokal pada tahun 1950 di Bandung, Bogor dan Yogyakarta, yang samasekali tidak nampak komunis. Pada bulan November 1956 oleh organisasi-organisasi lokal itu dibentuk *Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI)* yang jumlah anggotanya 1180 orang.

CGMI menampakkan wajahnya sebagai organisasi mahasiswa yang tidak berpolitik dan netral terhadap agama. Untuk menarik simpati pemuda pelajar, CGMI mengajukan program :

- a. Menentang keras upacara perpeloncoan pada waktu penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
- b. Memperjuangkan "kepentingan mahasiswa", sebagai contoh, delegasi dari CGMI menemui Menteri Pendidikan menuntut penurunan harga buku dan bea siswa diperbesar.
- c. Secara aktif mendukung garis kebijaksanaan Presiden Sukarno dan menentang pemberontakan PRRI/Permesta.
- d. Menentang "budaya Rock-n-roll" dan menganjurkan kembali ke kebudayaan Indonesia sendiri.

Di samping itu sejak tahun 1959 CGMI juga mulai mengorganisasi kelompok belajar (Studie Club) untuk menarik mahasiswa masuk ke kelompoknya.

Dengan semua aktivitasnya ini, CGMI dapat menarik mahasiswa yang baru, karena mempunyai karakter yang unik. Para mahasiswa baru yang belum memiliki kesadaran politik dan agama, mudah terbujuk oleh CGMI, karena CGMI adalah "satu-satunya jalan" bagi mereka.

Ada pertanyaan yang besar mengapa pada periode ini banyak mahasiswa tidak tertarik pada PKI, dan PKI gagal menarik para mahasiswa ke dalam kubu komunis? Jawabannya adalah, pada dekade tahun lima puluhan mayoritas mahasiswa Indonesia berasal dari golongan menengah. Mereka berasal dari keluarga yang mendukung PNI, Masyumi, NU, PSI atau pegawai negeri yang secara tradisi tidak berpartisipasi dalam bidang politik. Di antaranya ada yang berasal dari keturunan bangsawan yang sudah barang tentu sulit dipengaruhi oleh komunis.

Hampir semua pemimpin organisasi pemuda dan mahasiswa menyatakan bahwa program politik kurang sesuai dengan aspirasi kaum muda. Secara umum para pelajar dan mahasiswa, dekade 1950-an cenderung acuh tak acuh dan curiga pada setiap partai politik.

5. Pendekatan PKI Terhadap Organisasi Wanita

Ketika Aidit memegang pimpinan PKI, ia menginginkan agar peranan kaum wanita ditingkatkan karena kaum wanita cukup berperan dalam bidang sosial dan ekonomi. Kaum wanita Indonesia yang bekerja sebagai buruh industri, buruh tani, dan buruh perkebunan yang pada umumnya miskin mudah ditarik pada kegiatan organisasi. Perhatian serius dari pimpinan PKI kepada kaum wanita dimulai pada bulan Januari 1955, karena jumlah anggota PKI wanita sangat kecil.

Dalam *Manifesto Pemilihan Umum PKI* yang dibuat pada bulan Maret 1954 berbunyi "Untuk kaum wanita memilih PKI berarti emansipasi dan jaminan persamaan hak". Di dalam sebuah artikel yang di muat dalam *Harian Rakjat* sebelum pemilihan umum untuk Konstituante bulan Desember 1955,²⁵ jika PKI menang dalam pemilu, PKI menjanjikan akan memperjuangkan persamaan hak dalam empat masalah pokok :

- a. Bidang perkawinan, akan memperjuangkan kebebasan memilih suami, persamaan hak dalam bidang warisan dan perceraian dan hak-hak yang sama bagi anak-anak mereka.
- b. Bidang ekonomi, wanita hendaknya ikut berpartisipasi dalam bidang proses produksi seperti halnya laki-laki.
- c. Bidang perburuhan, tidak ada diskriminasi bagi kaum wanita dengan gaji yang sama.
- d. Bidang pertanian, kaum wanita akan mendapat pembagian tanah yang luasnya seperti kaum pria.

Metode pendekatan yang digunakan oleh PKI untuk menarik simpati kaum wanita tidak berbeda dengan metode pendekatan terhadap buruh dan petani yaitu disesuaikan dengan tingkat sosial ekonominya. Dalam salah satu artikelnya seorang tokoh wanita PKI Setiati Surasto, menyatakan : metode yang digunakan ditujukan kepada tiga kelas sosial, yaitu wanita kelas buruh dan

25. *Harian Rakjat*, 14 Desember 1955.

petani, wanita kelas menengah dan wanita kelas atas. Keanggotaan partai paling bisa diperluas di kalangan kaum wanita adalah kelas buruh dan petani. Namun ada juga kendalanya karena secara umum mereka buta huruf, banyak anak dan sering resah menghadapi masalah ekonomi. Menurut Setiati Surasto salah satu cara untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan membantu mereka pada saat memerlukan bantuan dan diadakannya pertemuan-pertemuan tertutup yang jumlah anggotanya terbatas. Pada pertemuan itu, ditekankan bahwa kemiskinan mereka hanyalah akibat dari penghisapan imperialisme. Masalah kemiskinan yang mereka hadapi dapat dilakukan lewat penyelesaian politik yang dipelopori oleh PKI.

Pendekatan terhadap kelas menengah (pedagang, petani, pelajar) disadari oleh PKI diperlukan waktu yang relatif lama dan perlu kesabaran. Pada dasarnya golongan ini memang tidak suka dengan PKI, di samping itu mereka kurang peduli terhadap lingkungan sosial mereka. Dalam mendekati kelompok ini PKI mencoba menarik mereka dengan cara memberikan penerangan mengenai hak-hak mereka dan membantu masalah kepegawaian dan pensiun.

Terhadap wanita Indonesia yang tergolong intelektual atau mempunyai jabatan yang tinggi dalam birokrasi pemerintahan Indonesia, oleh PKI digolongkan dalam kelompok wanita kelas atas yang memerlukan perhatian khusus. PKI mengakui tidak mudah membuat mereka tertarik pada PKI. Mereka itu bahkan tabu mendengar kata “komunis”, di samping itu bagi para isteri juga takut kedudukan suami mereka tergeser. Salah satu jalan agar mereka tertarik pada PKI ialah mengumpulkan mereka pada suatu tempat tertutup, kemudian diterangkan bahwa komunis itu suatu ideologi yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan sifatnya terbuka. Dengan jalan ini PKI berharap rapat membuat mereka tertarik pada PKI. Setiati, selanjutnya menjelaskan bahwa kaum wanita kelas menengah dan atas ini akan dapat membantu partai dari segi keuangan. Hal ini kiranya dapat membuat mereka merasa ikut berpartisipasi pada masalah-masalah partai. Dengan demikian diharapkan akan tumbuh pada diri mereka rasa memiliki pada partai.

Pada tanggal 26 sampai dengan 30 Mei 1958 diadakan Konperensi Wanita Nasional yang pertama. Pada saat ini sejumlah masalah yang ada hubungannya dengan pertumbuhan jumlah anggota didiskusikan. Pada saat itu Aidit dengan tajam mengatakan kendala terbesar bagi PKI bekerja di kalangan kaum wanita adalah kepercayaan mereka terhadap takdir. Kemiskinan dan kondisi buruk yang mereka alami adalah suatu takdir dari Tuhan dan hal itu tidak bisa diubah oleh manusia. Selanjutnya Aidit mengatakan PKI harus bekerja dengan semangat tidak mengenal menyerah dalam hal meyakinkan kaum wanita bahwa situasi buruk itu, sengaja dibuat oleh segolongan orang. Dengan masuk PKI, kondisi buruk itu dapat diperbaiki. Sudisman menyatakan partai harus memberikan perhatian besar pada masalah-masalah yang erat hubungannya dengan ekonomi yang dihadapi oleh kaum wanita. Suharti, seorang anggota PKI pada konperensi itu memperkenalkan metode yang dapat digunakan untuk menarik perhatian kaum wanita, yaitu dengan cara membentuk kelompok *anjangsono*²⁶. Kelompok ini bertugas membantu mereka pada waktu terkena musibah (kematian atau sakit) atau bila ada acara-acara pesta. Untuk lebih meyakinkan lagi perlu diadakan aksi-aksi untuk membela kepentingan kaum wanita.

Organisasi massa wanita komunis yang mulai berperan adalah Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis), didirikan tanggal 4 Juni 1950. Gerwis didirikan dari hasil peleburan tujuh organisasi wanita yang tersebar di seluruh Jawa yaitu :

- a. Rukun Putri Indonesia (Rupindo).
- b. Persatuan Wanita Sedar, Surabaya
- c. Persatuan Wanita Sedar, Bandung
- d. Gerakan Wanita Rakyat Indonesia
- e. Perdjoangan Putri Republik Indonesia.
- f. Wanita Madura.
- g. Persatuan Wanita Indonesia.

Pada saat peleburan itu anggotanya hanya berjumlah 500 orang.

26. Andjansono adalah kelompok kecil dari Organisasi Ibu-ibu dengan kegiatan sosial. Mereka ini telah digunakan PKI dan ormanya khususnya pada saat Pemilu tahun 1955.

Dalam tahun pertama kegiatan Gerwis boleh dikatakan hanya membuat program yang sederhana yaitu “membuat kaum wanita menjadi sadar politik”. Oleh karena itulah Gerwis dikecam habis-habisan oleh para pemimpin PKI. Pimpinan Gerwis dituding sebagai borjuis. Tujuan Gerwis sebagaimana dikehendaki oleh PKI adalah mendekati kaum wanita miskin. Akan tetapi kenyataannya pimpinan Gerwis tidak turun ke massa wanita. Oleh karena itu pada saat Gerwis mengadakan kongres nasional yang pertama pada bulan Desember 1951, anggotanya tidak lebih dari 6.000 orang.

Kelemahan ini dianalisa oleh Gerwis pada kongres nasional yang pertama. Hasilnya adalah Gerwis, lebih banyak memperhatikan masalah intern organisasi. Maksudnya adalah langsung memperhatikan kepentingan kaum wanita sehari-hari. Peserta kongres juga mengkritik cara kerja yang didasarkan pada pikiran yang sempit dan tidak mengikuti strategi front persatuan, misalnya sikap curiga pada organisasi wanita non-Gerwis.

Meskipun Gerwis mendapat kritikan yang tajam dari peserta kongres bulan Desember 1951 itu, pemimpin-pemimpin Gerwis tetap lamban untuk menarik dukungan massa kaum wanita. Akar dari masalah ini sebenarnya terletak pada tingkat sosial mereka. Para pemimpin Gerwis hampir semuanya termasuk kelas menengah dan secara umum mereka itu segan terjun ke kalangan “rendahan”. Sampai dengan bulan Juni 1953 keanggotaan Gerwis hanya 40.000 orang, namun sudah ada indikasi pekerjaan di kalangan massa sudah dimulai. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan bahwa pada bulan Februari 1953 di antara 7.016 orang anggota Gerwis di Jawa Tengah, sudah membuka 8 Sekolah Taman Kanak-Kanak, 52 buah tempat kursus pemberantasan buta huruf, 29 buah tempat kursus bagi para penyandang cacat dan 17 buah tempat untuk kursus para kader.

Pada bulan Maret 1954 Gerwis mengadakan kongres yang kedua di Jakarta. Anggotanya meningkat menjadi 80.000 orang dan mempunyai 203 cabang. Pada saat Kongres tersebut Umi Sardjono yang menjadi ketua Gerwis mengganti nama Gerwis menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Pengubahan nama

ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesan “karakteristik sempit” dari Gerwis. Konsekuensi dari perubahan nama ini harus diikuti dengan perubahan konstitusi anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Dalam konstitusi baru disebutkan bahwa Gerwani terbuka untuk semua wanita Indonesia, yang sudah berumur 16 tahun dan tidak memihak pada satu partai politik, agama dan suku yang ada di Indonesia.

Pada waktu kongres kedua ini ditargetkan penambahan anggota menjadi 2.5 juta orang sampai kongres berikutnya. Rupanya target ini terlalu tinggi, sebab dalam kenyataannya pada Kongres ketiga Gerwani pada bulan Desember 1957, mereka hanya mempunyai 681.342 orang anggota.

Pada periode kongres kedua dan ketiga Gerwani masih tetap merupakan organisasi massa yang menekankan kegiatannya pada bidang sosial dan ekonomi. Pada saat menjelang Pemilu 1955, terdapat 23.000 orang anggota Gerwani di Pulau Jawa bekerja pada panitia Pemilu. Sebanyak 23 orang anggota Gerwani terdaftar sebagai calon anggota DPR dari PKI dan satu orang terdaftar sebagai calon anggota DPR dari Partai Indonesia Raya (PIR).

Sesudah pemilu 1955, aktivitas Gerwani ditujukan pada pembinaan kader dan masalah-masalah organisasi dan pendidikan. Pada akhir 1957 dicoba membuat metode pendidikan kader yang lebih sistematis untuk sekolah dan kursus di semua tingkat organisasi. Pendidikan kader ini meliputi empat pelajaran pokok yaitu : Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, Sejarah Pergerakan Wanita Nasional dan Internasional, masalah organisasi dan pengembangan Gerwani. Sebagai media untuk memperluas penyebaran ide-ide Gerwani, pada tahun 1955 Gerwani menerbitkan majalah, *Wanita Indonesia*. Oleh karena kurang begitu maju dan terbitnya tidak teratur, akhirnya pada pertengahan tahun 1956 dihentikan. Setelah itu diterbitkan “*Berita Gerwani*” yang peredarannya terbatas hanya 2.000 eksemplar.

Aksi-aksi Gerwani antara tahun 1954-1957 ditekankan pada masalah memperjuangkan hak-hak kaum wanita dan anak-anaknya. Akan tetapi pada saat kampanye pemilu tahun 1955, Gerwani

lebih memfokuskan perhatiannya pada adanya Undang-Undang Perkawinan yang dianggapnya paling mendesak.

Pada tanggal 22-27 Desember 1957 Gerwani mengadakan kongres ketiga. Pada kongres ketiga ini dilaporkan anggota Gerwani berjumlah 681.342 orang. Pada Kongres ini Gerwani membuat 27 program tuntutan antara lain masalah perkawinan, undang-undang perburuhan, emansipasi wanita, pendidikan, pengobatan dan pengontrolan harga-harga kebutuhan pokok. Dengan program ini Gerwani mengharapkan dapat menarik simpati kaum wanita Indonesia dari kelas buruh, petani, sampai kelas menengah.

Dari aktivitas tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa daya tarik Gerwani pada massa wanita adalah karena dilontarkannya janji-janji muluk perbaikan status dan nasib wanita di bidang sosial ekonomi, seperti kegiatan arisan, koperasi kredit, saling bantu membantu pada saat-saat tertentu, pemberantasan buta huruf dan membantu problema-problema wanita lainnya. Peranan Gerwani ini sangat penting bagi PKI terutama dalam hal mempolitikkan masalah-masalah kaum wanita, memobilisasinya untuk mendukung garis politik PKI, mendukung dan membantu ormas PKI lainnya dalam rangka melaksanakan strategi front persatuan PKI.

6. Pendekatan Terhadap Intelektual dan Veteran

Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI berusaha menguasai kaum intelektual dan veteran. Pada bulan November 1952 pemimpin PKI itu menggambarkan perbedaan antara kaum intelektual tua dan muda. Kaum "intelektual tua" secara umum dikatakan "netral", khususnya pada waktu revolusi 1945, dan intelektual muda yang aktif dalam revolusi. Akan tetapi upaya ini tidak berhasil karena intelektual muda tidak tertarik pada PKI. Perbedaan dengan garis pemisah tua dan muda tidak berpengaruh pada mereka, akibatnya pemikiran perbedaan ini ditinggalkan. Pada tahun 1957 PKI meluncurkan pemikiran baru. Dikatakan bahwa kaum intelektual dan pemuda pelajar bukanlah sesuatu kelas dalam masyarakat, jika

dilihat dari asal-usul, kondisi kehidupan dan pandangan politik mereka. Pemikiran baru inipun tidak mendapat perhatian dari pada intelektual, sebaliknya PKI masih tetap mencurigai kaum intelektual. PKI membagi dua kelompok intelektual. Pertama, kaum intelektual yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan kaum buruh (PKI). Mereka ini kemudian berjuang dengan tradisi revolusioner. Kedua, kaum intelektual yang tingkah lakunya tidak revolusioner dan secara politis dan ideologis mewakili kepentingan ekonomi kaum borjuis.

PKI gagal menarik simpati karena dalam prakteknya PKI mencurigai mereka. Kelompok intelektual komunis yang mendapat pendidikan di Nederland (kelompok Nederland) disingkirkan sendiri oleh Aidit Mereka diberi posisi yang tidak strategis dalam PKI, seperti penasehat organisasi, anggota parlemen, atau jabatan lain dalam pemerintahan.

Pendekatan PKI terhadap veteran dilakukan sejak pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Para veteran ini mendirikan pelbagai organisasi veteran. Pada tanggal 30 Desember 1951, sebanyak 149 organisasi veteran yang ada di Indonesia meleburkan diri ke dalam satu organisasi veteran yaitu Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia (Perbepsi). Pada bulan Oktober 1954, Perbepsi telah mempunyai 194 cabang dan 205.740 orang anggota. Pada bulan Desember 1957 jumlah itu bertambah menjadi 300.000 orang anggota. Ketua Perbepsi yang pertama adalah Supardi. Pada tahun 1955 ia terpilih menjadi anggota parlemen sebagai wakil dari veteran. Pada waktu itu ia mengaku sebagai orang tidak berpartai.

Perbepsi dalam programnya mempunyai tiga tuntutan sosial dan ekonomi yaitu :

- a. Pemerintah harus mempunyai program terbaik untuk para veteran.
- b. Kebijaksanaan pemerintah dalam penyelesaian para veteran adalah membua pembagian saham yang diambil dari proyek-proyek pembangunan dan tidak mempertinggi sewa tanah.

- c. Memberikan latihan-latihan untuk para veteran dan rehabilitasi serta pekerjaan untuk veteran yang cacat.

Nilai terbesar dari Perbepsi untuk PKI adalah dia merupakan organisasi para militer yang dapat memberikan bantuan pada PKI, jika sewaktu-waktu terjadi krisis politik. Selama tahun 1953 dan 1954, Perbepsi dengan gigih mencoba meyakinkan pemerintah agar dibentuk milisi rakyat guna menghancurkan *Darul Islam* dan juga pasukan pengaman pemilu. Tentu saja anggota-anggotanya diambil dari para veteran anggota Perbepsi. Usul ini ditolak oleh pemerintah, sebab bagaimanapun pemerintah telah menduga Perbepsi adalah organisasi massa yang terpengaruh PKI.

Pada bulan Juli 1957, CC PKI, setelah mendengar laporan pekerjaan partai terhadap kaum veteran, menyatakan bahwa veteran tidak dapat digunakan sebagai sarana imbalan kekuatan bila situasi politik tidak menguntungkan PKI.

7. Pendekatan PKI Terhadap Seniman dan Budayawan.

Dalam rangka front persatuan nasional, PKI berusaha untuk menarik simpati atau dukungan dari para seniman dan budayawan. Selain itu PKI menganggap bahwa potensi kebudayaan bisa dijadikan suatu kekuatan revolusi yang ampuh. Karena alasan-alasan tersebut, PKI membentuk organisasi *Lembaga Kebudayaan Rakyat* (Lekra) pada tanggal 17 Agustus 1950 di Jakarta. Tokoh pendirinya terdiri dari tiga orang yaitu : DN. Aidit, AS. Dharta dan M.S. Ashar. Slogan yang digunakan pada awalnya adalah "seni untuk rakyat". Dengan dibentuknya Lekra ini, PKI berusaha untuk memasukkan pengaruh Marxisme dalam perkembangan kebudayaan, dan sastra di Indonesia, di samping itu berusaha untuk membangkitkan kesadaran politik di kalangan seniman dan budayawan serta untuk mengubah nasib para seniman. Seniman yang bergabung dalam Lekra antara lain: AS. Dharta dan Boejoeng Saleh (aktivis Serikat Buruh), M.S. Ashar, Iramani alias Njoto (anggota pimpinan CC PKI), S.W. Kuntjahjo, Bachtiar Siagian (petualang), Sobron Aidit (Pelajar), Bakri Siregar (Guru SMA), Banda Harahap (redaktur Harian Rakjat, Medan).

Usaha lain yang dilakukan oleh PKI untuk menarik seniman masuk dalam Lekra adalah dengan cara menyediakan berbagai fasilitas yang baik, seperti mengadakan kunjungan ke luar negeri sebagai hasil kerjasama antara Lekra dan PKI, dengan negara-negara sosialis maupun dengan negara-negara non-sosialis. Pada mulanya yang dikirim ke luar negeri hanyalah seniman-seniman yang tergabung dalam Lekra saja, tetapi sejak tahun 1955, seniman yang bukan Lekra pun turut dalam rombongan yang dibina Lekra.

Dalam perkembangan selanjutnya, PKI menganggap bahwa slogan dan Mukadimah Lekra tahun 1950 kurang sesuai dengan program PKI. Dengan adanya anggapan ini, maka dikeluarkan Mukadimah Lekra 1956 yang dimaksudkan untuk menarik lebih banyak golongan dan lapisan seniman. Selain itu untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia pada waktu itu. Sedangkan mengenai slogan "Politik adalah Panglima" baru dilaksanakan setelah Kongres Nasional I Lekra di Solo pada tahun 1959. Beberapa tokoh PKI memberi perhatian cukup besar terhadap karya-karya seni, khususnya mengenai sastra. DN. Aidit, Njoto, dan Sudisman sering muncul dalam gelanggang kreasi puisi. Dari ketiga tokoh tersebut, ternyata Njoto yang mendapat tugas menggarap para seniman dalam menghasilkan suatu karya sastra. Njoto dinilai sedikit banyak menguasai kritik seni, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang politik budaya dan seni sastra. Ia dapat berbicara dalam bahasa seniman untuk mempengaruhi seniman agar tertarik pada PKI dan Lekra. Kekurangan-kekurangan di bidang teknis seni, ditutupi dengan prinsip bahwa : "Tahu politik", "Tahu segala"nya.

Prinsip tersebut dianut oleh tokoh, pimpinan dan sastrawan Lekra. Akibatnya banyak seniman muda yang berbakat dalam Lekra tidak mengabdikan bakatnya yang besar dalam bidang seni tetapi sebaliknya menekankan kegiatannya pada bidang politik. Prinsip tersebut mendapat tantangan dari para sastrawan muda kreatif, seperti Ajip Rosidi, Nugroho Notosusanto, WS. Rendra, SM. Ardan, Toha Muchtar, dan menjadikan Lekra sebagai lawannya.

Akibat dari kurangnya pengetahuan teknis seni, maka timbullah anggapan bahwa seniman-seniman PKI (yang tergabung dalam Lekra) belum mampu mencernakan dan menerapkan sastra Marxis yang diakui sebagai anutannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil karya mereka yang dimuat dalam majalah Zaman Baru dan Harian Rakjat, di mana karya-karya mereka hanyalah hasil jiplakan dari majalah Soviet Literature dan Chinese Literature. Karena tujuan politiknya adalah mengubah imbang kekuatan, masalah mutu seni dianggap tidak penting. Demikian pula Mukadimah organisasi Lekra sendiri, hanyalah jiplakan dari *Demokrasi Baru*, tulisan Mao Ze Dong (pemimpin Komunis Cina), sehingga tema realisme sosialis yang dijadikan metode kerja tidak pernah terjabar secara jelas dan cukup dimengerti oleh para seniman. Oleh karena itu PKI gagal menarik tokoh-tokoh seniman dan sastrawan ke pihaknya, sekalipun diberikan kemudahan-kemudahan untuk berkreasi.

BAB V

AKSI-AKSI PKI DALAM BADAN LEGISLATIF

1. Aksi-aksi PKI dalam Parlemen.

Dalam sistem demokrasi liberal, maka golongan-golongan yang dianggap membawa aspirasi-aspirasi dan aliran dalam masyarakat diwakili secara proposional dalam parlemen. Dalam hal ini golongan komunis tidak terkecuali, mereka mempunyai wakil dalam parlemen. Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapatkan jatah dalam parlemen dan dalam lembaga-lembaga perwakilan di daerah sejak masa RIS. Sekalipun jumlah kursi yang didapat oleh PKI tidak banyak, tetapi peristiwa ini membawa dampak politis dan strategis yang sangat penting bagi langkah PKI selanjutnya. Hal ini berarti diterimanya kembali kehadiran kaum komunis di tengah-tengah masyarakat dan hak hidupnya diakui tanpa syarat. Dengan demikian, dosa-dosanya sebagai pemberontak pada tahun 1948 di Madiun, tidak lagi dipermasalahkan, lepas dari tanggung jawabnya secara hukum. Dalam waktu singkat PKI dapat muncul kembali praktis tanpa tantangan dari golongan non-komunis. Walaupun, ada pendapat, bahwa gerakan komunis lebih mudah diawasi bila mereka diberi legalitas. Sebagian lagi berpendapat, bahwa walau bagaimanapun PKI adalah partai kecil dan lemah sehingga tidak merupakan bahaya karena PKI telah banyak kehilangan tokoh-tokohnya yang mati tertembak dalam pemberontakan di Madiun yang menyebabkan organisasinya berantakan dan anggotanya tinggal beberapa ribu orang.

Pendapat tersebut dipergunakan sebaik-baiknya oleh PKI dibawah kepemimpinan DN. Aidit untuk bangkit dan mengembangkan kembali partainya melalui jalan damai (jalan parlementer). Jalan damai tersebut bermakna kesementaraan karena *pertama*, bagi PKI jalan damai sebagai suatu penipuan (desepsi) guna mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat, sekalipun secara ideologis tetap menempuh jalan kekerasan (revolusioner) untuk mencapai tujuan akhirnya, yakni merebut kekuasaan negara;

kedua, menggunakan lembaga perwakilan (DPR) untuk memperoleh kemenangan dari sisi lain, yaitu masuk ke dalam kekuatan sosial politik lain, agar dapat mempengaruhi dan kalau mungkin menguasai organisasi lain itu, untuk mendukung kepentingan politik PKI dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.¹

Masuknya PKI dalam parlemen dimulai sejak dilantiknya Parlemen dan Senat RIS. Dewan Perwakilan Rakyat RIS tersebut mewakili seluruh rakyat Indonesia, dan anggotanya berjumlah 156 orang anggota.²

Dalam parlemen RIS tersebut terdapat tiga fraksi yakni Fraksi Islam, Fraksi Nasionalis dan Fraksi Sosialis. Fraksi Islam ini memperjuangkan ideologi Islam yang didukung oleh partai Masyumi, PSII dan NU; Fraksi Nasionalis didukung oleh PNI dan PIR sedangkan Fraksi Sosialis didukung oleh PKI dan partai Buruh. Anggota parlemen RIS dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Pebruari 1950 bertempat di gedung "Concordia" Jalan Sipayers no. 1 Jakarta (sekarang Departemen Keuangan, Jalan Dr. Wahidin 1). Kemudian pada keesokan harinya, 16 Pebruari 1950, Parlemen RIS mengadakan sidangnya yang pertama kali.

Dalam sidang parlemen pertama ini berbicara wakil-wakil dari berbagai daerah. Masalah yang menjadi perdebatan adalah mengenai soal kedudukan negara-negara bagian berhubungan dengan diajukannya rencana undang-undang oleh pemerintah mengenai perubahan susunan kenegaraan di berbagai daerah. Wakil-wakil dalam parlemen baik wakil dari pihak Republik (RI) maupun wakil-wakil di luar daerah Republik (negara-negara) menghendaki hapusnya negara-negara boneka Belanda.

Mr. Sartono dari fraksi nasional terpilih sebagai Ketua Parlemen RIS dalam pemilihan yang berlangsung tanggal 21 Pebruari 1950. Pada keesokan harinya 22 Pebruari 1950 dilakukan pemilihan Wakil

1. Zulfikar Ghazali, "PKI dan DPR RI 1950 -1966. Memahami Strategi Jalan Parlementer PKI". Dimuat dalam *PERSEPSI* Edisi Khusus, Juni 1992, hal. 236.

2. Sekretariat DPR-GR, *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, 1970, hal.94.

Ketua dan Sekretaris Jenderal Parlemen, masing-masing terpilih Mr. Tambunan (Wakil Ketua I), Arudji Kartawinata (Wakil Ketua II) dan Mr Sumardi sebagai Sekretaris Jenderal.³ Pimpinan Parlemen tersebut disahkan oleh Presiden Sukarno pada hari itu juga dengan Keputusan Presiden RIS No. 99 tahun 1950.⁴ Sebagai Ketua Senat terpilih M.A. Pellaupessy dan wakilnya Mr. Teuku Moh. Hasan.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan sejak tanggal 17 Agustus 1950, maka anggota-anggota parlemen dan Senat RIS semua menjadi anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia (DPRS-RI).

Dalam sidang terbuka parlemen pada bulan Oktober 1951, PKI mengajukan mosi agar persetujuan KMB segera dibatalkan. Mosi itu diajukan oleh anggota PKI Peris Pardede cs. Mosi Pardede tersebut disokong oleh "fraksi kiri" sepenuhnya. Tujuan dari mosi ini tidak lain, PKI ingin tampil kembali secara parlementer. Mosi Pardede menghendaki perubahan posisi kabinet Natsir dan pembatalan perjanjian KMB dengan segala konsekuensinya, didukung pula oleh PSI.⁵

Sementara itu Program Kabinet Natsir tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan. PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta dalam kabinet, karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai. PNI sebagai partai oposisi, melalui anggotanya di Parlemen S. Hadikusumo, menyampaikan mosi kepada pemerintah yang isinya tentang pencabutan PP No. 39 tahun 1950 mengenai pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) dengan alasan tidak demokratis. Mosi yang terkenal dengan mosi Hadikusumo ini dimajukan dalam sidang Parlemen tanggal 12 Januari 1951. Mosi di tanda tangani oleh S. Hadikusumo (PNI), Sutarjo (PIR), Karnadijaya (Parindra), Tejasukmana (Partai Buruh), Aruji Kartawinata (PSII), Tambunan

3. Bintan R: Saragih SH, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987 hal. 116.

4. Sekretariat DPR-GR, *op. cit.*, hal 98.

5. *Sin Po*, 9 Oktober 1951.

(Parkindo), Abdulhayat (Buruh), Abdulrachman (Tani), Tjugito (PKI), K. Werdoyo (Buruh) dan Moch. Enoch (Parki).⁶ Mosi Hadikusumo mendesak kepada pemerintah supaya :

1. Secepat mungkin mencabut PP. 39/1950 dan lain-lain peraturan semacam itu.
2. Mengganti peraturan-peraturan tersebut di atas dengan UU pemilihan atas peraturan pemilihan yang demokratis.
3. Membubarkan DPR Daerah yang telah terbentuk menurut peraturan-peraturan pemerintah tersebut di atas.⁷

Parlemen membahas mosi Hadikusumo tersebut pada sidang tanggal 19 Januari 1951. Setelah melalui perdebatan yang menegangkan, akhirnya sidang parlemen tanggal 22 Januari 1951 menerima baik Mosi Hadikusumo. Namun pemerintah (kabinet) tidak dapat melaksanakan mosi itu karena alasan juridis formal dan politis. Antara pemerintah dan parlemen terjadi perbedaan faham (pandangan).

Penerimaan mosi Hadikusumo oleh Parlemen tersebut menimbulkan reaksi spontan, dan ketegangan-ketegangan politik di daerah-daerah sukar dihindarkan.

Karena berbagai masalah, akhirnya PM. Natsir menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 20 Maret 1951 kepada Presiden Soekarno. Berdasarkan keputusan Presiden No. 43 tahun 1951, maka sejak 21 Maret 1951 Kabinet Natsir didemisionerkan, sambil menunggu kabinet baru dibentuk.

Kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dengan wakilnya Suwiryo dari PNI. Dalam programnya Kabinet Sukiman banyak meneruskan kebijaksanaan kabinet sebelumnya. Kabinet Sukiman memulai tugasnya masih berhadapan dengan masalah pemogokan buruh, yang merupakan masalah yang cukup serius. Sukiman mengambil alih pelaksanaan Keputusan Militer Nomor 1 dari pemerintahan Natsir. Pelaksanaan keputusan ini tidak meredakan situasi malahan

6. *Abadi*, 1 Pebruari 1951.

7. *Abadi*, 20 Januari 1951.

menambah ketegangan situasi. Pemimpin PKI (Aidit) melihat posisi pemerintah yang dalam keadaan sulit kemudian melancarkan kembali aksi-aksi tuntutan baru, dalam rangka mencari popularitas, yakni menuntut tunjangan lebaran bagi kaum buruh Islam. Tuntutan tersebut diikuti dengan aksi-aksi pemogokan sehingga melumpuhkan Jawatan Kereta Api, perjalanan menggunakan bus dan perjalanan melalui jalur laut, pabrik-pabrik gula, perusahaan-perusahaan minyak, dan perkebunan-perkebunan. Oleh karena Keputusan Militer No.1 sudah dilaksanakan, maka terjadilah bentrokan-bentrokan dengan pihak militer/penguasa.

Dengan adanya tindakan penangkapan oleh Kabinet Sukiman terhadap orang-orang PKI yang lebih dikenal dengan Razia Agustus, terjadi reaksi dari fraksi PKI dalam Parlemen, di antaranya oleh Ir. Sakirman (Ketua Fraksi PKI dalam Parlemen), Ny. Mudigdo (anggota Fraksi PKI), Sidik Kertapati (Tani). Ir. Sakirman memprotes keras penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang PKI, dan meminta supaya para tahanan tersebut segera di keluarkan dan direhabilitasi.⁸ Sidik Kertapati menyatakan perlakuan-perlakuan para petugas pemerintah sewaktu ia ditahan sangat tidak demokratis tetapi fasistis, sedang Ny. Mudigdo mengatakan bahwa penangkapan-penangkapan dilakukan tanpa dasar hukum.⁹ Ia meminta kepada pemerintah agar membentuk panitia pemeriksa tahanan terdiri dari anggota DPR dan dalam hal ini PKI sanggup memberi bantuan. Tanggapan di luar Fraksi PKI, muncul dari Mr. Sunarjo (PNI) yang meminta kepada pemerintah agar terdakwa yang tidak bersalah segera dilepaskan, dan yang salah diadili dalam sidang terbuka di muka hakim dengan pembelaan secukupnya.¹⁰

Selain itu secara diam-diam PKI mengorganisasi anggota-anggota keluarga yang terkena Razia Agustus dan mengadakan demonstrasi bersama ke Kejaksaan Agung, untuk menuntut keluarganya yang ditahan segera dibebaskan.¹¹ Untuk meredam reaksi-reaksi dan

8 . *Sin Po*, 16 Pebruari 1952.

9 . *Sin Po*, 21 Januari 1952.

10 . *Sin Po*, 16 Pebruari 1952.

11. *Sin Po*, 27 Oktober 1952.

kritik tersebut, pada tanggal 29 Oktober 1951, PM Sukiman dalam sidang parlemen menjelaskan pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan-tindakan pemerintah.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Mr. Soebardjo menandatangani persetujuan Mutual Security Act (MSA) dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran di Indonesia. Persetujuan ini mendapat reaksi besar dari Parlemen. Fraksi PKI yang dipimpin oleh Ir. Sakirman memberikan reaksi paling keras. Ia menuduh bahwa negara-negara yang menerima MSA, akan kehilangan kedaulatan, kemerdekaannya dan dengan demikian akan menjadi negara jajahan Amerika di mana akan dapat dilakukan eksploitasi sepenuhnya atas kekayaan benda dan tenaga manusia negeri-negeri yang terjajah itu untuk kepentingan peperangan dunia yang baru. Oleh karena itu PKI mengajak semua partai-partai/golongan-golongan di seluruh Indonesia untuk bersatu dalam front nasional anti fasis guna menolak MSA tersebut dan lain-lain persetujuan yang merugikan rakyat Indonesia.¹²

Kerasnya kritik terhadap persetujuan tersebut, menyebabkan Menlu Mr. Soebardjo mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Pebruari 1952. Akibat peristiwa itu kabinet Sukiman mengalami krisis. Dengan adanya krisis tersebut Masyumi maupun PNI yang merupakan partai pendukung kabinet menyarankan supaya PM. Sukiman menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 1952 PM. Dr. Sukiman meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri.¹³

Kabinet baru yaitu Kabinet Wilopo, mulai bekerja sejak tanggal 3 April 1952.¹⁴ Berbeda dengan kabinet terdahulu, Kabinet Wilopo mendapat dukungan dari PKI, SOBSI, Tani, maupun Masyumi dan PNI di Parlemen.¹⁵ Perubahan sikap PKI maupun SOBSI dalam parlemen tersebut, merupakan peristiwa yang penting. Oleh

12. *Sin Po*, 27 Pebruari 1952.

13. *Sin Po*, 23 Pebruari 1952.

14. Departemen Penerangan, *Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945-1970*, Pratnya Paramita, Djakarta, 1970 hal. 15.

15. *Sin Po*, 20 Juni 1952.

karena untuk pertama kalinya sejak jatuhnya kabinet Mr. Amir Sjarifuddin pada tahun 1948, PKI dan SOBSI menyatakan menyokong kabinet.

Pada tanggal 8 April 1952, Sekretaris Biro SOBSI telah menyampaikan surat kepada Perdana Menteri Wilopo dan menyatakan harapan dan selamat atas terbentuknya Kabinet Wilopo tersebut. Bahkan mereka menilai susunan Kabinet Wilopo lebih progresif.¹⁶ Dukungan terhadap Kabinet Wilopo juga disampaikan oleh Ir. Sakirman, Ketua Fraksi PKI dalam Parlemen dan K. Werdayo (Ketua Fraksi Buruh dalam Parlemen) dalam sidang Parlemen tanggal 19 Juni 1952. Keduanya berpendapat dan "memuji" bahwa Kabinet Wilopo lebih demokratis daripada kabinet-kabinet sebelumnya.

Hal yang sangat penting untuk dicatat, jasa Kabinet Wilopo adalah penyusunan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Pada tanggal 25 November 1952, Kabinet Wilopo memajukan rencana undang-undang pemilihan umum, berdasarkan pilihan langsung kepada parlemen. Selanjutnya pada tanggal 27 November Parlemen mengadakan sidang untuk membahas rencana Undang-Undang Pemilu tersebut. RUU itu dibahas oleh Parlemen selama 18 minggu. Perhatian dari Fraksi Parlemen sangat besar, hampir semua Fraksi memajukan amandemen, yang jumlahnya mencapai 200 untuk RUU yang tidak lebih dari 110 pasal. Fraksi PKI memajukan ± 100 amandemen dengan maksud untuk mengulur waktu, namun hal tersebut dapat dielakkan dan hasilnya pada tanggal 4 April 1953 undang-undang tersebut selamat dan diterima Parlemen. Undang-undang yang dihasilkan adalah Undang-Undang No.7 /1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dikeluarkan pada tanggal 4 April 1953 dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 29 tahun 1953.¹⁷

16. *Sin Po*, 9 April 1952.1.

17. Badaruzzaman Busyairi, Boerhanuddin Harahap, *Pilar Demokrasi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hal. 89.

Sekalipun mula-mula PKI mendukung Kabinet Wilopo, akhirnya PKI menarik dukungannya karena dianggap merugikan PKI. Kabinet Wilopo pun tidak lama umurnya, karena terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 dan persoalan tanah di Sumatra Timur atau Peristiwa Tanjung Morawa pada tanggal 16 Maret 1953 menyebabkan Kabinet Wilopo jatuh.

Peristiwa ini oleh PKI diangkat menjadi isu politik nasional. Masuknya Peristiwa Tanjung Morawa ke dalam Parlemen diajukan oleh Serikat Tani Indonesia (SAKTI), yang lebih dikenal dengan sebutan mosi Sidik Kertapati.¹⁸ Mosi tersebut menuntut agar pemerintah menghentikan sama sekali usaha pengosongan tanah yang diberikan kepada Deli Planters Vereniging (DPV) sesuai dengan keputusan pemerintah masa Kabinet Sukiman. Semua tahanan yang ada sangkut pautnya dengan Peristiwa Tanjung Morawa itu segera dibebaskan. Mosi Sidik Kertapati menjadi perdebatan dalam parlemen antara PNI dengan Masyumi. Bahkan PNI Sumatera Utara mengancam akan keluar dari PNI, apabila Fraksi PNI dalam Parlemen tidak mau mendukung mosi Sidik Kertapati. Sebagian besar anggota DPP PNI mendukung usul agar Gubernur A. Hakim meletakkan jabatannya. Akan tetapi usul ini tidak bisa diterima oleh pihak Masyumi.

Melihat perkembangan yang demikian, maka Dewan Partai PNI memutuskan untuk mendesak kedua partai pendukung kabinet agar kabinet mengundurkan diri saja. Pada tanggal 2 Juni 1953,¹⁹ sebelum Parlemen mengadakan pemungutan suara terhadap mosi Sidik Kertapati, Kabinet Wilopo memutuskan untuk membubarkan diri.

Setelah Kabinet Wilopo jatuh, PKI mengeluarkan pernyataan yang menuntut pembentukan kabinet baru tanpa diikuti sertakannya Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia). PKI menuntut dibentuknya kabinet Front Persatuan di mana turut serta semua elemen yang "demokratis dan progresif" termasuk wakil-wakil dari kaum buruh dan tani. Kabinet baru yaitu Kabinet Ali

18. *Ibid.*

19. *Ibid.*, hal. 144.

Sastroamidjojo (PNI), susunan anggotanya dianggap oleh PKI memenuhi sebagian besar dari tuntutananya. Oleh karena itu PKI menyatakan sampai batas-batas tertentu memberikan dukungannya kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Dukungan PKI terhadap Kabinet Ali Sastroamidjojo disampaikan dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah dalam sidang pleno terbuka parlemen pada tanggal 29 Agustus 1953. Oleh Ir. Sakirman Ketua Fraksi PKI dalam parlemen²⁰. Kabinet Ali Sastroamidjojo ini dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 31 Juli 1953.

Selama masa Kabinet Ali, PKI memberikan dukungannya secara gigih pada PNI, walaupun diketahui oleh umum bahwa kabinet itu banyak terjadi korupsi, sehingga keadaan ekonomi terus menerus merosot yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat dan juga bagi massa PKI sendiri. Namun demikian PKI tetap membela Kabinet Ali tersebut.

Setelah Kabinet Ali jatuh, diganti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi). Kabinet yang dipimpin oleh Masyumi dan didukung oleh PSI ini mendapat oposisi keras dari PKI. Kabinet Burhanudin Harahap berjasa dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama pada tanggal 29 September 1955, sekalipun hasil pemilu itu tidak menguntungkan Masyumi maupun PSI. Pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

Sebagai penggantinya dibentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang besar, di mana ketiga partai besar yaitu PNI, Masyumi dan NU memperkuat jajaran kabinet ini. Susunan Kabinet Ali II secara resmi diumumkan pada tanggal 20 Maret 1955 namun Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini mendapat tantangan dari PSI dan PKI karena kedua partai tersebut tidak diikuti sertakan.

20. *Harian Rakjat*, 31 Agustus 1953, hal.1.

Kabinet Ali menghadapi pelbagai masalah yang berat. Ada beberapa peristiwa penting yang perlu dicatat antara lain, lahirnya gerakan kedaerahan, diucapkannya Konsepsi Presiden mengenai demokrasi terpimpin, Kabinet Gotong Royong, dan diberlakukannya Undang-Undang Keadaan Bahaya sejak Maret 1957.

Schubungan dengan situasi negara dilanda perpecahan politik, ideologi dan gerakan kedaerahan, Presiden Sukarno melontarkan Konsepsi Presiden pada bulan Pebruari 1957 dengan judul Menyelamatkan Republik Proklamasi.²¹ Dalam konsepsinya itu Presiden mengisyaratkan Demokrasi Terpimpin akan dilaksanakan di Indonesia. Dalam rangka pelaksanaannya Presiden merasa perlu untuk membentuk kabinet gotong royong dan sebuah dewan nasional yang di dalamnya akan duduk wakil-wakil semua golongan fungsional.



Rapat umum dalam rangka mendukung Konsepsi Presiden Sukarno

21. Nugroho Notosusanto, *Tercapainya Konsensus Nasional, 1966-1969*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 2.

Presiden Sukarno tanpa “tedeng aling-aling” (tirai) menghendaki agar orang-orang PKI duduk dalam kabinet gotong royong. Mengenai hal itu Presiden mengatakan antara lain sebagai berikut :

“Yah saya tahu, terhadap kepada PKI, ada beberapa saudara-saudara atau pihak yang berkeberatan Apakah kita dapat terus menerus mengabaikan satu golongan yang di dalam pemilihan umum mempunyai suara enam juta”.²²

Bagi PKI sendiri, konsepsi Bung Karno itu sangat menguntungkan. Oleh karena itu PKI segera menyatakan dukungannya walaupun masih dalam suasana pro dan kontra konsepsi Presiden, dan pada bulan Maret 1957 Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB) diumumkan. Melalui undang-undang itu untuk sementara kegiatan semua partai politik dibekukan.

Gagasan akan dibentuknya kabinet gotong royong sama artinya dengan dibentuknya pemerintahan koalisi nasional. Pemerintahan koalisi nasional merupakan jalan lebar menuju Front Persatuan Nasional yang sudah lama di idam-idamkan oleh PKI.²³

Selama masa Demokrasi Liberal ini, PKI menggunakan jalan damai (parlementer), karena kenyataan yang dihadapi PKI seperti Razia Agustus tahun 1951 (pada masa Kabinet Sukiman), disusul dengan berlakunya Undang-Undang Keadaan Bahaya 1957. Peranan PKI mulai meningkat tatkala eksekutif berada pada tangan kaum nasionalis kiri, yaitu dalam masa pemerintahan Ali Sastroamidjojo (1953-1955), di mana PKI secara tidak langsung duduk dalam jabatan eksekutif pula.

Dukungan PKI melalui parlemen kepada Kabinet Ali amat semakin jelas. PKI semakin memperkuat strategi jalan parlementer melalui dukungan tanpa reserve gagasan dan keinginan pribadi Presiden Sukarno, yang tertuang dalam Konsepsi Presiden 1957.

22. Presiden Sukarno, *Menjelamahkan Republik Indonesia*, Kementrian Penerangan, Djakarta, 1957, hal. 13.

23. DN. Aidit, *Menuju Indonesia Baru*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955, hal. 957.

2. Aksi-Aksi PKI Dalam Konstituante.

Setelah pemilihan umum untuk anggota DPR bulan September tahun 1955, pemilihan tahap berikutnya adalah pemilihan umum anggota konstituante pada bulan Desember 1955. PKI dalam pemilihan umum untuk anggota konstituante itu masih tetap termasuk dalam kelompok empat besar. Jumlah anggota DPR terpilih sebanyak 257 anggota, maka untuk anggota konstituante sebanyak dua kali, yaitu 514. PNI mendapat anggota sebanyak 119 anggota, Masyumi 112 anggota, NU 91 anggota dan PKI mendapat sebanyak 80 anggota.

Pelantikan anggota Konstituante dilakukan pada tanggal 10 November 1956 oleh Presiden Sukarno, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Bandung. Tugas utama anggota Konstituante adalah menyusun konstitusi baru bagi Republik Indonesia. Pada tanggal 20 November 1956, dilakukanlah pemilihan Ketua Konstituante dengan hasil sebagai berikut :

Ketua	: Mr. Wilopo (PNI).
Wakil Ketua I	: Prawoto Mangkusasmito (Masyumi).
Wakil Ketua II	: KH. Faturachman Kafrawi (NU).
Wakil Ketua III	: Dr. Leimena (Parkindo).
Wakil Ketua IV	: Ny. Ratu Aminah Hidayat (IP-KI). ²⁴

Selama pelaksanaan sidang Konstituante, hampir semua materi pokok dapat diselesaikan dalam musyawarah untuk mufakat secara demokratis. Semua telah menyetujui bentuk negara Republik Indonesia Kesatuan - Bendera Merah Putih - Bahasa Nasional Indonesia - lagu Indonesia Raya - Lembaga-Lembaga kenegaraan - Azas dasar hukum lain-lain.

Pada tanggal 4 November 1959 ketika sidang membicarakan mengenai "Dasar Negara" mulailah timbul perbedaan-perbedaan pendapat yang semakin lama semakin tajam dan melebar. Timbulnya perbedaan-perbedaan itu karena adanya keinginan yang berbeda dari masing-masing golongan tentang Dasar Negara :

24. *Bintang Timur*, - 23 November

- a. Golongan yang menginginkan Pancasila sebagai Dasar Negara didukung oleh PNI, PKI, Khatolik, Parkindo dan partai” kecil lainnya.
- b. Golongan yang menginginkan Islam sebagai Dasar Negara didukung oleh Masyumi, NU, PSII dan Perti.
- c. Golongan yang menginginkan Sosial Ekonomi sebagai Dasar Negara didukung oleh partai Murba.²⁵



Beberapa surat kabar organisasi massa PKI, yang isinya banyak menyesatkan rakyat.

Dalam usaha untuk meyakinkan pendapatnya masing-masing golongan menampilkan juru bicaranya yang paling dipercaya di kalangan mereka. PKI menampilkan antara lain Ir. Sakirman, Wikana, Njoto dan Kyai Dasuki Siradj. PNI menampilkan antara lain Suwiryo, Roeslan Abdulgani, Arnold Mononutu, Kartono dan Nur St. Iskandar. Masyumi menampilkan antara lain Muhammad Natsir, Mr. Kasman Singodimedjo, Hamka, Zaenal Abidin Achmad, Osman Raliby, Prof. KH. Kahar Muzakkir dan KH. Isa Anshary. NU menampilkan antara lain KH. Wahab Chasbullah, KH. Masjkur,

25. *Warta Bandung*, 4 November 1957.

H. Zainul Arifin, KH. Syukri Gozali dan Saifuddin Zuhri. PSI menampilkan antara lain Sutan Takdir Alisjahbana dan Sudjatmoko. IP-KI menampilkan antara lain Firmansyah dan Hamara Effendi. Katholik menampilkan antara lain Prof. Suhardi dan I.J. Kasimo. Parkindo menampilkan antara lain Ds. Rumambi dan Locallo. Acoma menampilkan Sudjono, dan GPPS menampilkan Asmara Hadi. Perdebatan seru terjadi antara pendukung Pancasila sebagai dasar negara dengan pendukung Islam sebagai dasar negara.

Dalam pemandangan umum babak pertama, Ir. Sakirman mengemukakan, bahwa PKI menerima Pancasila tanpa perubahan dan mengajak semua fraksi dalam Konstituante secara aklamasi menerima Pancasila. Dalam menjelaskan mengapa PKI menerima Pancasila, Ir. Sakirman memajukan kupasan tentang tujuan revolusi Indonesia serta pengalaman-pengalaman di waktu permulaan revolusi. Dalam hubungan ini, Ir. Sakirman mengupas pendapat Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa Pancasila adalah faktor penting dari revolusi 17 Agustus 1945.

Menurut Ir. Sakirman, sebetulnya PKI menginginkan supaya Ketuhanan Yang Maha Esa diganti sila kemerdekaan beragama dan berkeyakinan hidup, formasi ini menurut Ir. Sakirman kecuali bersifat harian, cocok dengan pengalaman serta kebutuhan dan lebih sesuai dengan pikiran-pikiran yang hidup dalam Komisi I dan Panitia Persiapan Konstituante (PPK) serta lebih tepat jiwanya dengan ide yang orisinil Bung Kamo mengenai Sila Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain.²⁶ Di sini dikutip inti pidato Ir. Sakirman tentang Pancasila menurut tafsirannya :

“Yakni bahwa pada masa peralihan dari jaman kolonial dan setengah feodal ke jaman nasional, yaitu ke jaman kemerdekaan penuh di lapangan politik dan ekonomi seluruh Indonesia, *Pancasila dapat dijadikan alat penting* dan menentukan dalam perjuangan untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan di kalangan rakyat banyak”. Pokok pikiran PKI yang disuarakan oleh Ir. Sakirman ini

26. *Warta Bandung*, 13 November 1957.

yang bisa kita tangkap adalah *Pancasila dapat dijadikan alat yang penting dan menentukan*.

Jurubicara PKI yang lain, Wikana dalam uraiannya menekankan harus adanya titik pertemuan seperti yang dialami selama ini, yaitu Pancasila. Tentang Pancasila dan Proklamasi, Wikana menguraikan pengalamannya sendiri di hari-hari sebelum dan saat Proklamasi. Dikatakan, bahwa memang *bukan Pancasila yang melabirkan Proklamasi kemerdekaan*, tetapi yang sudah jelas ialah bahwa *revolusi kita dimulai dengan persatuan*, dan persatuan. itu ialah Pancasila. Wikana tidak sependapat dengan golongan yang berpendapat, bahwa Pancasila yang dijadikan dasar Republik Indonesia itu sudah lahir seluruhnya sebelum Proklamasi, yang disebut Jakarta Charter. Menurut Wikana, lepas sama sekali dari apa yang disebutkan *Panitia Persiapan Kemerdekaan* di jaman Jepang.

Njoto menyatakan bahwa PKI ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan mengajak semua fraksi yang ada di dalam Konstituante termasuk Masyumi untuk menerima Pancasila tanpa perubahan.

Mengapa PKI menerima Pancasila, menurut Njoto alasannya nyata sama benar dengan alasan-alasan Kaum Nasionalis, Katholik, Hindu Bali, Animisme dan umat polytheis lainnya serta Kaum Atheis yang tergabung dalam partai apapun, yaitu demi keutuhan serta untuk mengeyahkan sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme di tanah air dan untuk menegakkan, seperti yang dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kaum Protestan dan Khatolik telah menyatakan bahwa Pancasila dapat dipertanggungjawabkan kepada agama dan Tuhannya, PKI pun dapat mempertanggungjawabkan penerimaan Pancasila terhadap Sosialisme.²⁷

Alasan PKI mengajak semua fraksi di dalam Konstituante untuk menerima Pancasila tanpa perubahan dinyatakan oleh Njoto, karena PKI yakin tidak ada seorang anggota pun di dalam majelis

27. *Warta Bandung*, 28 November 1957.

Konstituante tidak menganut prinsip hormat-menghormati dan harga-menghargai. Oleh karena faktor inilah menurut Njoto yang paling dibutuhkan bagi kelangsungan hidup bangsa. Saling hormat menghormati dan saling harga-menghargai terhadap kepercayaan dan keyakinan lain menurut PKI adalah seperti oksigen karena tanpa dia tak mungkin hidup. Selanjutnya mengingat sebagian besar golongan menganut azas kemerdekaan beragama serta menyetujui perumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka PKI demi penghormatan serta penghargaan kepada fraksi-fraksi lain, menganjurkan Pancasila diterima secara aklamasi, tanpa perubahan.

Di dalam perdebatan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara, PKI menampakkan diri sebagai pembela dan pendukung Pancasila. Mengapa? Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa PKI sejak periode awal konsolidasinya sampai tahun 1959, secara konsisten mengikuti garis kanan (Stalin) dengan program front persatuannya. PKI menampilkan wajah demokratis untuk menghapus citranya yang buruk di masa lalu, sekalipun PKI telah menjadi salah satu pemenang dalam Pemilihan Umum 1955. PKI tidak mau mengorbankan program maksimumnya, karena suksesnya program minimumnya program front persatuan dipertahankan. Selanjutnya setelah dikaji secara cermat, ternyata PKI berbeda dengan golongan lain dalam menafsirkan Pancasila. PKI mempunyai tafsiran sendiri yang dipertanggungjawabkan kepada sosialisme (baca komunisme), sebagaimana ditegaskan oleh Njoto. PKI juga menganggap bahwa Pancasila adalah alat untuk mencapai kemakmuran, bukan sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa.

Pada tanggal 11 Desember 1958 pada saat masa Sidang Panitia Persiapan Konstituante akan berakhir terjadilah situasi baru, yaitu sehubungan dengan masuknya usul tunggal dari "blok pendukung Pancasila" antara lain terdiri dari PNI, PKI, Murba, GPPS dan sejumlah fraksi kecil lainnya yang secara bersama-sama mengajukan satu rumusan untuk Mukadimah Undang-Undang

Dasar yaitu supaya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Proklamasi 1945 selengkapnya dijadikan Mukadimah Undang-Undang Dasar yang akan datang.²⁸



Kampanye pemilihan umum PKI di Bali dan Solo.

Pada umumnya terciptanya suatu rumusan tunggal ini mendapat sambutan dari kalangan luas di gedung Konstituante sebagai suatu kemajuan yang pesat. Dengan demikian, maka di antara pendukung Pancasila tidak akan terjadi perbedaan rumusan satu sama lain. Terjadinya satu rumusan merupakan suatu toleransi yang sangat besar terhadap golongan manapun juga karena Pembukaan (Mukadimah) Undang-Undang Dasar 1945 itu milik seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian penerimaan Mukadimah itu sebagai dasar negara tidak merugikan, tidak menyalahkan, serta memenangkan siapapun, melainkan merupakan keputusan yang berisi toleransi sedalam-dalamnya.

28. *Warta Bandung*, 4 Maret 1959.

Dengan masuknya rumusan tunggal dari blok pendukung Pancasila itu, maka pada tanggal 3 Maret 1959 para pendukung Islam mengadakan rapat kemudian menyatakan, bahwa Liga Muslimin yang terdiri dari NU, PSII, Perti, Masyumi dan PPTI tetap memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Dengan demikian, telah jelas bahwa kompromi, musyawarah mengenai dasar negara sudah tertutup. Toleransi yang ditawarkan oleh pendukung Pancasila tidak mendapat sambutan dari pihak pendukung Islam.²⁹

Pada tanggal 6 Maret 1959 diadakanlah pertemuan antara pemerintah yang diwakili Perdana Menteri Djuanda, Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi, Wakil Perdana Menteri II Dr. Leimena, Menteri Penerangan Sudibyo dan Menteri Negara Muhammad Yamin dengan Presidium Dewan Konstituante. Dalam pertemuan ini yang menjadi masalah pokok adalah usul menetapkan UUD 1945 sebagai UUD tetap, dan Presiden akan berpidato di muka Dewan Konstituante untuk menganjurkan kembali ke UUD 1945.

Semula Sidang Pleno Konstituante ditetapkan pada tanggal 29 April 1959, dengan acara mendengarkan pidato Presiden Sukarno sebagai acara yang bersifat khusus. Akan tetapi Mr. Wilopo selaku ketua Dewan Konstituante dengan Persetujuan Panitia Musyawarah Dewan Konstituante, menyarankan agar acara itu tidak diadakan dalam Sidang Khusus, melainkan sebagai acara Sidang Pleno. Dengan demikian Sidang Pleno Dewan Konstituante itu akan berlangsung secara resmi.

Rencana Sidang Pleno tanggal 29 April 1959 yang telah disetujui itu dibatalkan, karena adanya rencana Presiden pergi ke luar negeri pada akhir bulan April 1959. Pada tanggal 14 Maret 1959 Pemerintah sekali lagi mengadakan pertemuan dengan pimpinan Dewan Konstituante dan Panitia Musyawarah Konstituante, mengusulkan agar Sidang Pleno Dewan Konstituante dimajukan pada tanggal 22 April 1959.

29. *Warta Bandung*, 7 Maret 1959.

Pada tanggal 22 April 1959 Presiden menyampaikan amanatnya. Dalam pidato yang memakan waktu kira-kira dua setengah jam itu, Presiden meminta kepada anggota Dewan untuk menetapkan UUD 1945 sebagai UUD tetap. Menurut Presiden hanya dengan jalan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itulah kita akan dapat menyelesaikan tingkatan revolusi yang ada sekarang. Dalam pidatonya yang berjudul "Respublica sekali lagi Respublica" ini, Presiden juga mengatakan bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti kita kembali kepada demokrasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang dinamakan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"³⁰ dan inilah yang kemudian dimaksudkan dengan Demokrasi Terpimpin.

Pada tanggal 29 April 1959 dimulailah pemandangan umum babak pertama untuk membicarakan anjuran Presiden untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sejak dimulainya pembahasan tentang anjuran Presiden itu, suasana sidang sudah nampak adanya dua pendapat yang saling bertentangan. Kelompok Islam tetap memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok Nasionalis Non Islam yang memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara dan ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tanpa perubahan.

Njoto, Wikana, Karel Supit wakil dari PKI di dalam perdebatan itu menegaskan bahwa tidak mungkin konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru, karena itu usul dari pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 masuk akal dan PKI mendukung sepenuhnya.

Saifuddin Zuhri dari NU mengatakan, bahwa di dalam istilah "Demokrasi Terpimpin terdapat perkataan Demokrasi", karena itu merupakan hal biasa apabila diperbincangkan di dalam lembaga demokrasi tertinggi. Ia mengusulkan agar *Piagam Jakarta (Jakarta Charter)* dicantumkan di dalam Konstitusi Proklamasi yang akan

30. *Warta Bandung*, 22 April 1959.

diberlakukan. Demikian juga Mansur juru bicara NU menginginkan agar Piagam Jakarta sebagai “Pokok-Pokok Kaidah Azas Negara, Sumbernya Undang-Undang”. Selain itu juga diusulkan pasal-pasal di dalam Konstitusi Proklamasi harus diubah dan disesuaikan dengan Piagam Jakarta.

Prawoto Mangkoesasmito, dari Masyumi, mengusulkan agar Konstituante setidaknya-tidaknya masih terus bekerja sampai tahun 1960, untuk melanjutkan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Menurut pendapat Prawoto andaikata usul ini diterima, maka soal kembali ke Konstitusi Proklamasi mungkin dapat terlaksana, tetapi tidak pada waktu pemimpin-pemimpin Indonesia sekarang ini berkuasa. Mereka tidak akan mampu menghidupkan kembali jiwa 1945. Hamka, dari Fraksi Masyumi juga mengatakan terus terang, bahwa dengan kembalinya Konstitusi Proklamasi dengan sistem “Demokrasi Terpimpin” akan timbul diktator.³¹

Pada tanggal 21 Mei 1959 Pemerintah dalam hal ini Perdana Menteri Djuanda memberikan keterangan lagi kepada Dewan Konstituante agar UUD 1945 dijadikan UUD tetap sebagaimana telah diamanatkan Presiden Sukarno pada tanggal 22 April 1959 yang lalu. Dengan demikian pemerintah mengharapkan pada HUT RI tahun 1959 dapat kita rayakan di bawah naungan UUD 1945.

Setelah mendengar keterangan ini, maka tokoh-tokoh partai Islam seperti NU dan PSII merasa optimis dapat mengatasi keadaan. Menurut pendapat mereka dalam waktu singkat mereka akan membuat pernyataan, tetapi sebelum itu mereka menyatakan akan mengadakan rapat dulu. Mereka jadi optimis karena pemerintah menyatakan bahwa Piagam Jakarta sebagai bagian yang historis dari UUD 1945, tidak akan dihapuskan karena ia tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945.

Pada tanggal 25 Mei 1959 Dewan Konstituante memulai lagi pemandangan umum babak penegasan tentang anjuran pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945, namun hasilnya tetap sama saja

31 . *Warta Bandung*, 8 Mei 1959.

seperti babak pertama yang lalu yaitu kelompok Islam tidak setuju untuk kembali kepada UUD 1945 dan kelompok Non Islam setuju untuk kembali kepada UUD 1945 dengan tanpa perubahan. Yang termasuk kelompok Islam itu ialah Masyumi, NU, PSII, Perti, dan AKUI tetapi ada juga partai Non Islam yang mendukung kelompok ini yaitu Partai Buruh, PIR-H, Fraksi Lima, Gerpes, PPTI. Kelompok Non Islam terdiri dari : PNI, PKI, Republik Proklamasi, Parkindo, Katholik, PSI, Persatuan Irian Barat, GPPS, Murba, Golongan Eropa, P3RI, Baperki, Permai, dan lain-lain.³² Demikianlah bahwa masing-masing pihak tetap bersikap keras pada pendiriannya masing-masing.

Pemerintah gelisah dan memperingatkan Konstituante, jika anjuran pemerintah tidak diterima, maka berbagai kemungkinan bisa terjadi. Pemerintah menyerahkan mandatnya kembali, ataupun Konstituante dapat dibubarkan, karena keduanya tidak dapat bekerjasama. Pertentangan antara Dewan Konstituante dan pemerintah tentu akan berlanjut juga di DPR. Sebab perbandingan fraksi dalam DPR hampir sama dengan perbandingan fraksi-fraksi di dalam Dewan Konstituante.

Pada tanggal 30 Mei 1959 diadakan pemungutan suara terhadap usul dari Blok Islam tentang dimasukkannya Piagam Jakarta ke dalam Mukadimah UUD 1945 dan memasukkan hukum Islam di dalam Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 . Usul Amandemen Blok Islam hasilnya adalah 201 suara setuju dan 265 suara menolak.

Ketika ternyata usul Blok Islam kalah suara dan usulnya ditolak, maka Ketua Umum NU KH. Wahab Chasbullah marah dan mengatakan : "kalau Dewan Konstituante menolak amandemen Blok Islam, maka Blok Islam yang disokong oleh 85 % rakyat Indonesia akan menolak secara keseluruhan UUD 1945 dan menyalahkan pihak yang menerimanya apabila terjadi suatu junta militer".³³ Pada hari yang sama (tanggal 30 Mei 1959) diadakanlah pemungutan suara mengenai usul pemerintah tentang kembali ke UUD 1945.

32. *Suluh Indonesia*, 9 Mei 1959.

33. *Suluh Indonesia*, 1 Juni 1959.

Hasilnya 269 suara setuju dan 199 suara menolak. Sedang jumlah suara yang dibutuhkan $\frac{2}{3} \times 474$ jumlah anggota yang hadir, yaitu 316 suara.

Pemungutan suara kedua dilakukan pada tanggal 1 Juni 1959 dengan hasil 264 suara setuju dan 204 suara menolak. Suara yang dibutuhkan agar usul diterima ialah $\frac{2}{3} \times 468$ anggota yang hadir, yaitu 312 suara.

Pemungutan ketiga (terakhir) diadakan pada tanggal 2 Juni 1959. Adapun hasilnya 263 suara setuju dan 203 tidak setuju, padahal yang diperlukan $\frac{2}{3} \times 468$ anggota yang hadir, yaitu 312 suara.³⁴

Setelah pemungutan suara ketiga atau terakhir selesai, Mr. Wilopo menyarankan agar Dewan Konstituante mengadakan reses, dan Pimpinan Dewan Konstituante merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah.

Usul Ketua Konstituante ini kemudian ditanda tangani oleh 57 orang anggota. Di antara mereka ini telah berbicara Sudiono Djojoprajitno (Murba), Hamara Effendi (IPKI), Asnawi Said (GPPS) dan Anwar Sanusi (PKI). Sudiono Djojoprajitno mengatakan bahwa meskipun Dewan Konstituante tidak dapat memenuhi syarat dua pertiga suara dari yang ditentukan oleh Pasal 137 UUD 1950 untuk diterimanya sebagai UUD tetap, tetapi hendaknya suara itu jangan sia-sia dan tetap dijadikan keputusan Dewan Konstituante. Hamara Effendi menyatakan agar Konstituante membubarkan diri saja. Akan tetapi Anwar Sanusi wakil PKI di Konstituante mengatakan agar Konstituante meneruskan sidang-sidangnya karena PKI ingin agar dalam hal menetapkan UUD 1945 itu dilakukan secara konstitusional.³⁵

Demikianlah ada beberapa usul yang dilakukan oleh anggota Konstituante ketika untuk ketiga kalinya Dewan Konstituante gagal

34. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid II, Jakarta 1960, hal. 575, 591, 602, 618.

35. *Suluh Indonesia*, 4 Juni 1959.

menetapkan UUD 1945 secara konstitusional. Namun ketua Dewan tetap pada pendiriannya agar Dewan Konstituante reses dan para pemimpinnya supaya mengadakan perundingan dengan pemerintah, tentang status Dewan Konstituante.

Sementara itu, karena situasi yang tidak menentu di dalam Dewan Konstituante, maka *Fraksi PKI, dan PNI mengumumkan bahwa untuk selanjutnya tidak akan menghadiri sidang-sidang Konstituante lagi*. Dengan demikian, maka quorum tidak akan dapat tercapai. Oleh karena itu Dewan tidak dapat bersidang dengan sah.³⁶ Karena suasana yang demikian ini, semua orang mengarahkan pandangannya kepada Presiden Sukarno yang sedang mengadakan kunjungan ke negara-negara Skandinavia, Italia, Amerika Latin, Turki dan Uni Soviet. Sementara itu di Tokyo Presiden Sukarno mendengar hasil pemungutan suara di Konstituante. Perdana Menteri Djuanda menjelaskan, bahwa keputusan terakhir ada di tangan Presiden Sukarno. Ketua PNI mengirimkan kawat kepada Presiden Sukarno di Tokyo yang isinya mengharap agar Presiden mengeluarkan dekritnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan juga membubarkan Konstituante.³⁷

Setibanya di tanah air pada tanggal 28 Juni 1959, Presiden langsung menyatakan janji akan mengambil keputusan yang tegas dalam waktu singkat mengenai masalah kembali ke UUD 1945.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno membubarkan Konstituante melalui Dekrit Presiden dan menyatakan UUD 1945 berlaku. Naskah Dekrit itu berbunyi :

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Menetapkan pembubaran Konstituante.

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

36. Muhammad Yamin, *op.cit.*, hal 620 – 625.

37. *Suluh Indonesia*, 28 Juni 1959.

terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 1959
Atas Nama Rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Sukarno

BAB VI

PENUTUP

Dari uraian di depan, kita bisa mengenali berbagai tahap dan upaya PKI dalam memanfaatkan situasi dan kondisi sosial-politik-ekonomi-budaya di tingkat pusat dan di daerah. Sikap tidak tegas pemerintah yang tidak menghukum PKI selaku partai yang melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948, memberikan keuntungan besar bagi PKI. PKI berhasil melakukan konsolidasi, dengan membangun kembali partainya berdasarkan strategi komunisme internasional di mana kaum borjuis nasional dihalalkan untuk dirangkul dan dijadikan kawan. Strategi itu disebut dengan strategi front persatuan, tujuannya untuk merebut imbalan kekuatan, karena PKI merasa masih lemah.

Kemelut politik dan keamanan dalam negeri yang tak kunjung selesai pada periode 1950-1959 memberikan peluang bagi PKI untuk muncul kembali dalam gelanggang politik nasional. Kemenangan PKI sebagai salah satu partai besar, di samping Masyumi, PNI, dan NU, mengejutkan semua pihak, karena PKI sukses dalam programnya merangkul borjuis nasional, masyarakat di pedesaan dan partai-partai politik dengan dalih front persatuan.

Dalam rangka strategi front persatuan ini, PKI menampilkan sikap demokratis, sebagai partai yang menghormati demokrasi. Karena hanya bersikap demikian PKI memperoleh simpati dan menepis kecurigaan dari partai-partai lawannya. Sejak DN. Aidit mengambil alih kepemimpinan PKI pada awal 1951 aksi-aksi teror PKI secara bertahap dihentikan, PKI melaksanakan "Jalan Baru", lebih mengutamakan "Jalan Damai" dalam parlemen dan aksi politik lainnya secara terbuka. Namun ada peristiwa yang diabaikan pada saat itu. Pada tanggal 13 September 1953, DN. Aidit mengeluarkan statemen "Peringatan Peristiwa Madiun secara intern". Statemen ini secara terbuka menantang pemerintah RI, dan berani menyatakan bahwa pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah akibat provokasi Pemerintah. Statemen yang lebih berani lagi diucapkan oleh DN. Aidit pada bulan Desember 1954, adalah "Revolusi Agustus 1945 hanyalah gladiresik dari revolusi sebenarnya yang akan

datang". Sekalipun statemen-statemen Aidit tersebut mendapat kritik dari pelbagai media massa, namun segera dilupakan. Karena oleh golongan lain, PKI dianggap kecil dan lemah.

Di samping menampakkan sikap demokratis dan terbuka, pada periode 1950-1959, PKI menghasilkan konsep-konsep revolusi dalam rangka program maksimumnya, yaitu merebut kekuasaan politik, baik secara politis maupun dengan kekuatan militer. Pada tahun 1954 dihasilkan metode revolusi yang dinamakan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP), suatu metode gabungan antara taktik blok di dalam (bloc within) dengan penyusunan kekuatan bersenjata. Untuk memaksimalkan dalam pencapaian suara dalam Pemilu 1955 PKI melakukan pendekatan terhadap berbagai clemen masyarakat seperti buruh, petani, pemuda, wanita, intelektual, veteran, seniman serta dalam Badan Legislatif. Selain itu pada tahun 1954 PKI mengeluarkan tesis tentang Masyarakat Indonesia, yang berjudul Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI) yang mengetengahkan kekuatan, sasaran dan perspektif revolusi Indonesia.

Mengenai masalah ideologi negara pada sidang-sidang konstituante, PKI tampil sebagai pendukung Pancasila. Penampilan itu dinyatakan hanya karena menghormati partai lain. Namun di balik itu, PKI tidak ingin Konstituante (lembaga pembentuk Undang-Undang Dasar) itu berhasil menciptakan Undang-Undang Dasar baru. Dalam Sidang Konstituante bulan Juni 1959, PKI mendukung anjuran pemerintah untuk kembali ke UUD 45, didasarkan atas pertimbangan politis, dan strategis front persatuannya. PKI ingin memperoleh simpati dari mayoritas pendukung UUD 1945 dan dari Presiden Sukarno. Karena sejak Dekrit Presiden bulan Februari 1957, PKI merupakan salah satu pendukungnya, dengan harapan PKI akan memperoleh kedudukan lebih baik dalam Kabinet "Gotong Royong" dan demokrasi terpimpin yang termuat dalam konsepsi Presiden itu.

Pada periode berikutnya, PKI mencari jalan sendiri karena imbalan kekuatan yang diupayakan telah tercapai, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB) sejak tahun 1957.

DAFTAR SUMBER

BUKU

- Aidit, DN., *Konstitusi Partai Komunis Indonesia*, Depagitrop CC PKI, Djakarta, 1951
- , *Menuju Indonesia Baru*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955
- , *Lahirnya PKI dan Perkembangannya (1920-1955)*, Pidato untuk memperingati Ulang Tahun ke 36 PKI, tanggal 23 Mei 1955 di Djakarta, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955.
- , *Djalan ke Demokrasi Rakjat bagi Indonesia*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955
- , *Masjarakat Indonesia Baru dan Revolusi Indonesia*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, -1957
- , *Kibarkan Tinggi Panji Revolusi*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964
- Amin SM, Mr., *Dibawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Bulan Bintang, Djakarta, 1967
- Brackman, Arnold C., *Indonesian Cummunism, a History*, Frederik, A. Praeger, Publisher, New York, 1963
- Busyairi Baddaruzzaman, *Boerhanoeddin Harahap, Pilar Demokrasi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989
- Departemen Agitasi dan Propaganda CCPKI, *ABC Politik*, Djakarta, 1965
- , *Program Partai Komunis Indonesia*, Tjetakan ke 11, Departemen Penerangan RI, *Almanak Lembaga-Lembaga Negara dan Kepartaian*, Departemen Penerangan RI, Djakarta, 1961
- Departemen Penerangan, *Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945-1970*, Pradnya Pramita, Djakarta, 1970
- Harsono, Ganis, *Cakrawala Politik Era Sukarno*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985

- Hindley Donald, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1961
- Ismail, Yahja, *Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia*, Kuala Lumpur, 1972
- Kementerian Penerangan, *Kepartaian di Indonesia*, Yogyakarta, 1955
- Kopkamtib, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia*, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jakarta 1978
- Lukman, MH, *Tentang Front Persatuan Nasional*, Jajasan Pembaruan, Tjetakan ke 2, Djakarta, 1962
- , *Konstitusi PKI*, Depagitprop CC PKI, Djakarta, 1959
- Nalenan, Drs., *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot*, Gunung Agung, 1981
- Nasution, AH., *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran I*, Seruling Masa, Djakarta, 1967
- Njoto, *Pidato Pengantar Untuk Rencana Perubahan Program PKI*, Depagitprop CCPKI, Djakarta, 1959
- Notosusanto, Nugroho, (Editor), *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- PKI, *Tuntutan untuk Pekerdja di kalangan Kaum Tani*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955
- , *Resolusi Tentang Laporan Umum CCPKI kepada Kongres Nasional ke VI*, Djakarta, 1959
- Panitia Peringatan 70 tahun *Wilopo*, *Wilopo 70 Tahun*, Gunung Agung, Jakarta, MCMLXXIX, 1979
- Peter Edman, *Komunisme Ala Aidit, Kisah Partai Komunis Indonesia di bawah Kepemimpinan DN. Aidit 1950-1965*, Center for Information Analysis, 2005
- Salam, Abdul, *Sejarah Partai Komunis Cina*, (Makalah tidak diterbitkan)
- Sanit, Arbi, "PKI, Suatu Analisa Mengenai Sumber Kekuatan Politik di Djawa Tengah dan Djawa Timur tahun 1951 - 1965",

Skripsi Sardjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Djakarta, 1969 (tidak diterbitkan).

Saragih, R. Bintang SH., *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987

Sekretariat DPR-GR, *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, 1970

Soekarno Presiden, *Menyelamatkan Republik Indonesia*, Kementrian Penerangan, Djakarta, 1957

Soemadi, Drs., *Peranan Kalimantan Barat dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*, Yayasan Tanjung Pura, 1974

SUADI, *Nasakom*, Djilid III, Staf Umum Angkatan Darat, Djakarta-1958

Sudisman, *Konsolidasi Kerapihan dan Militansi Organisasi Partai*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964

Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid III, Djakarta, 1960

DOKUMEN

Arsip Nasional RI, "Arsip Kabinet Perdana Menteri dan Presiden Tahun 1950 - 1959".

Arsip Nasional RI, "Rapat Istimewa Kabinet", 18 Agustus 1951

SURAT KABAR

Abadi, 1951, 1953

Antara, 1951

Bintang Timur, 1951, 1956, 1964

Berita Indonesia, 1953

Harian Rakjat, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965

Indonesia Raja, 1955, 1957

Keng Po, 1951

Merdeka, 1951

Mimbar Umum, 1953
Pedoman, 1950, 1951
Pelopop, 1965
Sin Po, 1951, 1952
Suluh Indonesia, 1957, 1959
Warta Bandung, 1957, 1959
Waspada, 1952

MAJALAH

Persepsi, Desember 1989 dan Edisi Khusus, Juni 1992
Prisma, Juli 1982 dan April 1992

MANUSKRIP

D. Soegondo (Kolonel), "Komunisme di Indonesia" (Manuskrip),
Mabes ABRI - Lembaga - Pertahanan Nasional, 1981
Tjugito, "Masalah-masalah Angkatan Darat" (Manuskrip) tanpa
tahun penerbitan.

WAWANCARA

Wawancara dengan Letjen.. Pur. A. Tahir, Jakarta, 21 Mei 1992

INDEKS

A

Abdulgani Roeslan, 97

Abdulhayat, 86, 88

Abdulrachman, 86, 88

Aceh, 45, 49

Achmad, Zainal Abidin, 9, 32, 97

Acoma, 96, 98

Adji, Rustam, ketua PKI Deli Serdang, 31, 33

Agitasi, 6, 7, 8, 9, 109, 111

Agitprop , Agitasi dan Propaganda, 8, 9

agraria, 62, 64, 68, 70

Aidit, DN, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 35, dst

Aidit. Sobron, 82

Ajitorop Jusup, 18,22

aklamasi, 96, 98, 100

aktif, 37, 41, 62, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 77, 80

aktivitas, 9, 11, 57, 76, 77, 79, 80

AKUI, 102, 105

aliansi, 45, 49, 56, 60, 62, 63, 66, 67

Alimin, 4, 6, 7, 8, 11, 21, 46, 47, dst

Alisjabana, Sutan Takdir, 95

Alkap, 23, 25

ALS , Ailegemelene Landbouw Syndicaat , Sindikat Perusahaan
 Perkebunan, 13, 14, 15, 17
 amandemen, 9, 11, 89, 91, 103, 105
 Amerika, 53, 57, 88, 90, 105, 107
 Amerika Latin, 105, 107
 Amerika Serikat, 53, 57, 88, 90
 Angkatan Bersendjata, 3, 7, 40
 Angkatan Perang, 18, 21, 105, 107, 108
 Animis, 92
 Anjangsono, 67
 Anshary, KH Isa, 95, 97
 antek, 48, 52
 aparat, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia, 5, 7
 APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, 5, 7
 Arab, 18, 20
 Ardan, SM, 80, 83
 Arifin, H Zainul, 95, 98
 Ashar, MS., 79, 82
 Asia, 41, 46, 53, 57
 asing, 3, 6, 7, 16, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 54
 aspirasi, 7, 70, 83
 Atheis, 97, 99
 Atmo Sujono, 61
 Ayam Partai, 35

B

Balai Kota Jakarta Raya, 48, 52
Bandung, 12, 23, 50, 54, 69, 74, dst
Banyuwangi, 18, 20, 54, 59
Baperki, 103, 105
basis, 37, 41
Beijing, 34, 38
Belanda, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 39, dst
Bendera Buruh, 61, 65
Berita Gerwani, 76, 79
Berlin, 67, 71
Bintang Merah, Majalah PKI, 6, 8
birokrasi, 3, 73, 76
Bogor, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 69, 73
Bojonegoro, 24, 26
Bolshevik, (partai), 35
borjuis, 5, 10, 34, 35, 37, 38, 45, 60, dst
BTI, Barisan Tani Indonesia, 11, 12, 13, 14, 19, dst
Bukares, 67, 71
bumerang, 14, 16

C

CCPKI, Central Commite PKI, 109, 110, 111, 112
cendekiawan, 5, 7
CGMI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, 69, 70, 73, 74
Chasbullah, K-H Wahab, 95, 97, 103, 105
Chie Chian Than, 22, 24

Chinese Literature, 84
 Cianjur, 12, 14
 Cilincing, 16, 18
 Cina, 5, 10, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 44, 68, 83, 112
 Cochran, Merle (Dubes AS), 90
 Komite Eksekutif Pemuda Rakyat, 60
 Komite Propinsi, 36, 40
 Komite Pulau, 37, 41
 Concordia, 84, 86
 Cordian, E., 15, 17
 Coup d'etat, 19
 Creatic, 76
 CR, Komite Resort, 39
 CSS, Komite Sub Seksi, 38, 39
 CS, Komite Seksi, 38, 39
 Chung Hua Cik Kong Hui, Persatuan Buruh Tani Cina, 29

D

dalih, 13, 15, 25, 27, 30, 41, 45, 62, dst
 dampak, 12, 14, 83, 85
 Darusman, Maruto (kelompok Nederland), 8, 10
 Deli Serdang, 29, 31, 32, 34
 demokrasi, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, dst
 demokrasi liberal, 1, 6, 8, 34, 83, 85
 Demokrasi Terpimpin, 92, 94, 101, 102, 103, 104
 demokratis, 8, 10, 11, 13, 19, 22, 39, 43, 60, 64, dst

demonstrasi, 30, 32, 64, 69, 73, 87, 89
 desepsi, 83, 85
 Dewantara, Ki Hajar, 96, 98
 Dharta, AS, 82
 didemosionerkan, 89
 diintensifkan, 58, 63
 diktator, 102
 diskriminasi, 68, 71
 DI/TII, Darul Islam / Tentara Islam Indonesia, 20, 24, 53
 Djaetun, 7, 9
 Djojopranoto, Sudiono, 21
 Djojosukarto, Sidik, 45, 46
 Djokosudjono (PKI 35), 8, 9
 Djuanda (perdana menteri), 100, 102
 dominan, 27, 69
 dominasi, 7, 60
 DPRDS, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara, 85
 DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, 28, 32, 76, 84, 85, 86, 87, dst
 DPV, Deli Plantern Vereniging, 90

E

Effendi, Hamara, 96, 104
 eksekutif, 93
 eksemplar, 61, 76
 eksploitasi, 65
 emansipasi, 42, 71, 76

emosi, 34, 54
empat bukit setan, 41
Enoch, Moch, 86, 88
Erningpraja, Ahem, 15, 17
Eteh, 17, 19

F

fasistis, 87, 89
FDR, Front Demokrasi Rakyat, 47, 51
Federasi, 22, 24
federatif, 57, 61
Feodallisme, 6, 36, 37, 38, 40, 45, dst.
Firmansyah, 96, 98
Fistadjid, Kuntri, 23, 26
fleksibel, 4, 6
fleksibilitas, 37
formal, 35, 37, 86, 88
FPT, Front Persatuan Tani, 63, 67
fraksi, 8, 10, 45, 49, 84, 85, 86, 87, dst.
Fraksi Lima, 103, 105
Front Persatuan Nasional, 5, 39, 40, 42, 46, 47, 51, 59, dst.
fundamental, 34, 38

G

gamblang, 17, 20

Garut, 12, 14

Gedung Kesenian Jakarta, 47, 51

Generasi Baru (majalah), 67, 71

Gerakan Wanita Rakyat Indonesia, 74, 77

Gerpes, 103, 105

Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, 24, 26, 75, 76, 77, 79, 80

Gerwis, Gerakan Wanita Indonesia Sedar, 11, 13, 74, 75, 77, 78

Gerwis, Gerakan Wanita Sosialis, 11, 13

global strategy, 41, 46

Go Hauw Gie, 24, 26

Golongan Eropa, 103, 105

Gozali, KH Syukri, 95, 98

GPPS, 96, 98, 100, 103, 104, 105, 106

H

Hadi, Asmara, 96, 98

Hadikusumo S., 85, 86, 87, 88

Hakim, Abdul (Gubernur Sumatra Utara), 26, 28, 30, 92

Halim, Dr.A, 13, 15

Hamka, 95, 97, 102, 104

Harahap, Mt. Boerhanoeddin (kabinet), 54, 79, 91

Harahap, Banda, 79, 82

Hardi, Mr (Waperdam I), 100, 102
Hari Pahlawan, 94, 96
Harian Rakjat, 17, 20, 21, 22, 24, 25, dst.
Hasan, Mr. Teuku, 85, 87
Hatta, Moh. (wakil presiden), 4, 6, 25, 28, 48, 52, 53, 57
hechtenis (kurungan), 13, 15
Hidayat, Ny. Ratu Aminah, 94, 96
Hindu Bali, 97, 99
historis, 57, 62, 102, 104
Hutapea, Oloan, 24, 26, 55, 59

I

ideologi, 1, 2, 4, 22, 35, 37, 69, dst
Ilham, Parjani, 24, 26
illegal, 36
imperialisme, 6, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 61, 62, 74
Imperialisme Barat, 5
imperialisme-kapitalisme, 37, 41
individualisme, 69, 73
Indonesia, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dst
insiden, 31, 34
intelektual, 2, 10, 51, 61, 71, 75, 79, 80, dst
intensif, 17, 19
intervensi, 19, 21
IP-KI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, 96, 98
IPPI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, 68, 69, 72, 73
Iramani, 79, 82

Irian Barat, 47, 51, 53, 57, 103, 105
Iskandar, Nur St., 95, 97
Italia, 105, 107

J

Jakarta, 8, 22, 23, 25, 34, 37, dst.
Jakarta Charter, 97, 99, 101, 103
Jalan Jambi, 16, 18
Jawa, 5, 14, 20, 25, 47, 51, 52, dst
Jawa Barat, 14, 25, 49
Jawa Tengah, 3, 5, 45, 49, 53, 56, 60, 68, 73, 78
Jawa Timur, 18, 20, 23, 26, 49, 53, 56, 60, 68, 73
Jawatan Perikanan Deli Serdang, 29, 31
Jawatan Pertanian Deli Serdang, 29, 31
Jepang, 26, 53, 97
junta militer, 38, 42, 103, 105
Jurnal organisasi buruh, 61

K

Kafrawi, KH Faturachman, 94, 96
Kali Sindang, 16, 18
Kambing Partai, 36, 40
KAN, Kesatuan Aksi Nasional, 19, 21
kapitalis birokrat, 37, 41, 49, 53
karakter, 39, 43, 58, 62, 70, 74
Karnadidjaja, 79

Karim, DP, A, 21, 23
 Kartawinata, Arudji, 85, 86, 87
 Kartono, 95, 97
 Kasimo, IJ, 96, 98
 Kartakusumah, R Atung, 21, 23
 Katholik, 96, 97, 98, 99, 103, 105
 Kebun Partai, 36, 40
 Kediri, 24
 kepala batu, 1
 Kertapati, Sidik, 21, 23, 87, 89, 90, 92
 KKPT, Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah, 31
 KMB, Konferensi Meja Bundar, 5, 14, 25, 39, 51, 85
 KMKBDR, Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya, 16, 21
 KMKBM, Komando Militer Kota Besar Medan, 23, 25
 KMK, Komando Militer Kota, 16, 17, 18, 19
 KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, 3, 5, 8, 10
 KN, Komite Nasional Indonesia, 5
 koalisi, 5, 7, 25, 27, 46, 50, 65, dst
 kolektif, 37, 41, 67, 71
 komprador, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 62
 komunikasi, 6, 8, 57, 61
 komunis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 17, 22, dst.
 Konperensi Wanita Nasional, 73, 77
 Konsepsi Presiden, 92, 93, 94, 95
 konsolidasi, 1, 11, 13, 24, 26, 33, 35, 36, 37, 39, 40
 Konstituante, 56, 69, 73, 91, 96, 98, 99, 100, 101, 102, dst

kontestan, 64, 68
kontradiksi, 9, 10
konveksi, 62, 66
Koraga, 29, 32
Korea Utara, 24, 26
korupsi, 91, 93
kriminal, 4, 6
Kuntjahjo, SW., 79, 82

L

legal, 33, 34, 35, 37, 38, 39
legalisasi, 16
Lci Tun Tjong, 23, 25
Leimena Dr, 94, 96, 100, 102
Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, 79, 80, 81
Lenin, 30, 32, 33, 37, 40, 42, 44, 46, 49, 53, 62, 66
Liga Muslimin, 46, 50, 99, 102
Locallo, 96, 98
loyal, 64, 68
Lubis, Bachtiar (Mayor), 16
Lubuk Pakam, 19, 21, 30, 32, 34
Lukman, 5, 8, 9, 10, 13, 37, 39, 44, 56, 57, 112

M

- Madiun, 3, 4, 24, 33, 35, 47, 66, 83
Malang, 23, 26, 59, 63
manifesto, 71
Mansur, 101, 104
Mao Tse Tung / Mao Ze Dong / Mao Tse Dong, 70, 84
Marhaenis, 50, 54
Marxisme-Leninisme, 10, 39, 45, 71
Masjkur, KH., 95, 97
Masyumi, 12, 36, 47, 48, 50, dst.
MB, Mobiele Brigade Kepolisian, 18
Medan, 25, 30, 32, 81
memprovokasi, 27, 29
Menyelamatkan Republik Proklamasi, 92, 94
MIRI, Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia, 38, 40, 42, 108
Mononutu, Arnold, 95, 110
Moskow, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 67, 71
MS, Xarim, 23, 25
MSA, Mutual Security Act, 55, 90
Muchtar, Toha, 82
Mudigdo, Ny., 23, 89
Munir, 6, 8
Murba (partai), 23, 97, 100, 105, 106
Musso, 8, 26
Muzakkir, Prof. KH. Kahar, 97
Prawoto Mangkusasmito, 96

N

Nasution, AH Kolonel / Kepala Staf Angkatan Darat, 18, 21
Natsir, (perdana menteri), 17, 26, 56, 87, 88, dst.
Nederland, 10, 80
New York Times, 27
Ngadiman, 8, 10
Nitimihardjo, Maruto, 23
Njono, 13, 57
Njoto, 8, 9, 13, 37, 39, 56, 57, dst.
Notosusanto, Nugroho, 57, 82, 94, 112
NU, Nahdhatul Ulama, 47, 57, 58, 66, 72, 86, dst.

O

obsesi, 37, 41
ofensif, 57, 61
oposisi, 4, 6, 85, 87, 91, 93
OSC, Onder Seksi Comite, 32, 34
otokritik, 6, 7, 8

P

P3RI, 103, 105
Palembang, 12, 14, 54, 59
pamflet, 31, 34
Pancasila, 3, 4, 56, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 110
Panitia Pembela Hari Proklamasi, 48, 52

Pardede, Peris, 6, 8, 21, 23, 55, 59, 85, 87
 Parindra, 85, 87
 Parkindo, Partai Kristen Indonesia, 86, 88, 94, 95, 96, 97, 98
 pasca, 56, 60
 Patumbak, 28, 30, 31
 pelembagaan negara, 10
 Pellaupessy MA, 74
 Pemuda Rakyat, 20, 68, 69, 70, 71
 Perbepsi, Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia, 80, 81
 PERBUM, Persatuan Buruh Minyak, 62, 66
 PERBURI, Perserikatan Buruh Republik Indonesia, 21, 23
 Perdjongan Putri Republik Indonesia, 76
 PERMAI, Persatuan Marhaenis Indonesia, 50, 52
 Persatuan Irian Barat, 103, 105
 Persatuan Wanita Sedar (Bandung), 74, 77
 persuasif, 28, 30
 Pertani, Persatuan Tani Indonesia, 29
 Perti, Persatuan Tarbiah Islamiah, 48, 97, 101, 104
 Persatuan Wanita Sedar (Surabaya), 76
 Persindo, Pemuda Sosialis Indonesia, 68
 PGT, Persatuan Guru Tuna, 24, 25
 Piagam Jakarta, 103, 104, 105
 PIR - H, 78, 86, 87
 PIR, Partai Indonesia Raya, 68, 74, 79
 PKI, Partai Komunis Indonesia, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dst.
 PMK, Panitia Musyawarah Dewan Konstituante, 102
 PM, Polisi Militer, 22, 88, 90

PNI, Partai Nasional Indonesia, 12, 36, 47, 48, 49, dst.
 pohon partai, 40
 Politbiro, 7, 9, 21, 26, 64
 polytheis, 97, 99
 PPDI, Persatuan Pamong Desa Indonesia, 52
 PPK, Panitia Persiapan Konstituate, 98
 PPTI, Perkumpulan Pemuda Tiongkok Indonesia, 24, 101, 105
 Priangan, 52, 53, 56
 Propaganda, 8, 9, 51, 56, 111
 Protestan, 99
 PRRI/Permesta, 72
 PSII, Partai Serikat Islam Indonesia, 47, 86, 88, 97, 101, 104
 PSI, Partai Sosialis Indonesia, 28, 50, 53, 72, 87, 92, 93, 94, 97, 105
 Purwokerto, 54, 58

Q

quorum, 102

R

Radi, ketua PKI distrik Bandung, 23, 25
 Raliby, Osman, 95, 97
 rasional, 37, 41, 50, 54
 Rasjad, Sabilal, 49
 razia, 19, 23, 26, 40
 RC, Ranting Comisariat, 34
 Rendra, WS, 80, 83

reses, 104, 105
resolusi, 14, 16
Republika, 93
revolusi, 6, 11, 13, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, dst
Revolusi Demokratis, 34, 37, 38, 41
Revolusi Demokrasi Baru, 34, 38
Revolusi Demokrasi Rakyat, 34, 38
Revolusi Sosialisme Komunisme, 34, 38
revolusioner, 28, 39, 43, 44, 45, 51, dst.
RIS, Republik Indonesia Serikat, 7, 8, 85, 86, 87
RI, Republik Indonesia, 7, 10, 14, 21, 23, 24, dst
Rock n roll, 62
Roem, Moh, 4, 6
Rosidi, Ajip, 80, 83
Royen, 4, 6
RRC, Republik Rakyat Cina, 41, 46
RTI, Rukun Tani Indonesia, 29, 32, 65, 66
Rumambi, DS, 96, 98
Rupindo, Rukun Putri Indonesia, 74, 77
Rusia, 42, 46

S

Said, Asnawi, 104, 106
Sakirman, Ir, 10, 23, 56, 57, 89, 90, 91, 93, dst
SAKTI, Sarekat Tani Indonesia, 65, 66, 92
Saleh, Boejoeng, 79, 82

Salim, H Agus, 46, 50

Sanusi, Anwar, 33, 34, 106

Sapulidi, Sanusi, 31, 32, 34, 35

SARBUFIS, Serikat Buruh Film Indonesia, 58, 62

SARBUPRI, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 59

Sardjono Umi, 77

Sarekat Buruh Kapal Dok dan Pelayaran, 52

Sarjono, 64, 68

Sartono, Mr, 84, 86

Sastroamidjojo, Ali, 38, 55, 91, 93, 95

SB Kempen, Serikat Buruh Kementrian Penerangan, 19, 21

SB Tekstil, Serikat Buruh Tekstil, 62, 66

SBG, Serikat Buruh Gula, 57, 61

SBKA, Serikat Buruh Kereta Api, 24, 26, 57, 62

SBKB, Serikat Buruh Kendaraan Bermotor, 19, 21

SBKP, Serikat Buruh Kementerian Pertahanan, 61, 65

SBK, Serikat Buruh Kependaraan, 61, 65

SBPTT, Serikat Buruh Pos Telepon dan Telegraf, 62

SBPU, Serikat Buruh Pekerja Umum, 57, 61

SEBDA, Serikat Buruh Daerah Otonom, 12, 14

Sei Chian Tan, 24, 26

Semarang, 54, 58

SEPDA, Serikat Pegawai Daerah, 57, 61

SERBAUD, Serikat Buruh Angkutan Udara, 58, 62

Serikat Buruh Pegawai Negeri, 25, 27

Serikat Mahasiswa Indonesia, 68, 72
 Setiadjud, Kelompok Nederland, 8, 10
 Siagian, Bachtar, 79, 82
 Siauwi Giok Tjan, 21, 23
 Sidharta, 35
 Simatupang TB / Jenderal Mayor Kepala Staf Angkatan Perang, 20
 Sin Po, (koran PKI), 6, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, dst
 Singodimedjo, Mr. Kasman, 95, 97
 Siradj, Kyai Dasuki, 95, 97
 Siregar, Bakri, 81
 Situmeang, 21, 23
 SI, Sarikat Islam, 46, 50
 Sjahrir, 48, 52
 Sjarifuddin, Amir, 91
 Skandinavia, 107
 Sumadi, 10, 23
 SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, 13, 14, 21, 23, 25, 26, 27, 29, dst.
 SOB, Staat van Oorlog en Beleg, 53
 Soebardjo, Mr, 88, 90
 Soeprapto, (Jaksa Agung), 21
 Soewono, 21, 23
 soko guro, 10
 Solo, 80, 83, 101
 Sophiaan, Mnai, 47, 51
 Soviet Literatur, 72

Sovyet/Soviet, 20, 43
SPP, Sarekat Pegawai Pemerintah, 63
Stalin, 32, 35, 40, 100
Statement, 48
Studie Club, (kelompok belajar), 70, 74
Subang, 23, 25, 54, 59
Subianto, 17, 19
Subijakto R / Kepala Staf Angkatan Laut, 20
Subroto, Gatot, 19
Sudibyo, 100, 102
Sudisman, 9, 38, 39, 57, 75, 82
Sudjatmoko, 97
Sudjono, 23, 98
Sudjono, Djoko, 23
Suhardjono, 23
Sukanto / Kepala Kepolisian Negara, 21
Suhardi, Prof, 98
Suharti, 75
Sukarno (Presiden), 24, 40, 49, 50, 56, 57, dst.
Sukatno, 68, 72
Sukiman, (perdana menteri), 20, 23, 27, 36, 55, 56, 88, dst.
Sulawesi Selatan, 47
Sumadi, 10, 23,
Sumadi Achmad, 10, 32, 97
Sumantri, 19
Sumardi, 50, 87
Sumardi, Mr, 74

Sumarto, Siswo, 25
Sumatera Utara, 25, 92
Sumatera, 14, 21, 22, 23, 25, 92
Sumatera Selatan dan Utara, 50
Sumatera Timur, 14, 21, 22, 25, 92
Sumedang, 12, 14
Sunarjo, Mr, 89
Sunarto, Tjokro, 25
Supardan, Hutomo, 23
Supardi, 78, 81
Suparna, 15, 17
Supit, Karel, 103
Supranoto, 21, 24
Surabaya, 19, 25, 26, 56, 76
Surakarta, 3, 5
Surasto, Setiati, 73, 74
Suryadarma / Komodor / Kepala Staf Angkatan Udara, 20
Surono, 24, 26
Suroso, RP, 15, 17
Susanti, 47
Sutarjo, 85, 87
Sutomo, 24, 26
Suwirjo, 20
Suwiryo, 86, 88, 95, 97
Suyono, 23, 26

T

- tabu, 73, 76
- taktik, 3, 6, 13, 28, 35, 36, 43, dst
- Tambunan, Mr, 85, 86, 87
- Tan Lieng Djie, 10
- Tanjung Morawa, 28, 30, 31, 32, 34, 52, 92
- Tanjung Priok, 18, 19, 20, 23, 27
- Tasikmalaya, 12, 14
- Taswin, 21, 23
- Tejasukmana, 86, 87
- Tendi, 29, 32
- tentara reguler, 5, 7
- The New Time, 23
- Thio Tji Nam, 21
- Tiongkok, 22, 24, 26
- Tirtoprodjo, Soesanto, 4, 6
- Tjugito, 21, 23, 47, 51, 86, 88
- TNI - Angkatan Darat, 40, 58
- Tokyo, 105, 107
- toleran, 11, 13
- toleransi, 35, 39, 99
- transportasi, 57, 58, 61, 62
- trauma, 47, 51
- Tsar, 42, 46
- Turki, 105, 107

U

Uni Sovyet / Soviet, 41, 45

universitas, 40, 44, 69, 73

Utaryo, 47, 51

UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, 34, 38

UUKB, Undang-Undang Keadaan Bahaya, 93, 95, 108

V

Vital, 13, 52, 76

Vries de CFH, 75, 78

W

Wanita Indonesia, 76, 77, 78

Wanita Madura, 74, 77

Warsawa, 67, 71

Werdojo K, 20, 76, 77, 79, 82

Widjajasastra, Ruslan, 26

Wikana, 25, 68, 97, 99, 103

Willem, 31, 34

Wilmeer, 15, 17

Wilopo, 36, 48, 56, 90, 91, 92, 96, 102, 106, 112

Y

Yamin, Muhammad, 102, 106, 107, 113

Yogyakarta / Yogya, 5, 9, 25, 56, 57, 70, 71, 112

yuridis, 79

Z

Zaman baru (majalah), 72

Zdhanov, 33, 37

Zuhri Shaifuddin, 97, 103

Alam demokrasi liberal di Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959, memberi peluang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk melakukan konsolidasi setelah terpuruk akibat pemberontakan yang dilakukannya di Madiun tahun 1948. Pada Juli 1950 tokoh-tokoh muda yang muncul seperti DN. Aidit, MH. Lukman, Nyoto, Sudisman dan lain-lainnya berupaya menyatukan kembali seluruh potensi partai.

Dibawah kepemimpinan DN. Aidit, PKI berhasil membangun kembali partainya. Melalui Politbiro baru, PKI menjalankan strategi Front Persatuan Nasional dan memusatkan perhatian pada perumusan taktik utama, bentuk perjuangan dan bentuk organisasi. Pada bulan Agustus 1951 PKI melancarkan kerusuhan-kerusuhan di berbagai tempat seperti di Jakarta dan Bogor. Peristiwa tersebut ditanggapi oleh Kabinet Sukiman dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah-rumah para pemimpin PKI. Peristiwa itu oleh PKI disebut sebagai "Razia Agustus 1951". Dalam peristiwa tersebut DN. Aidit meloloskan diri ke Moskow, dan muncul kembali tahun 1953 dengan membawa konsep baru yang dikenal dengan Jalan Demokrasi Rakyat Bagi Indonesia. Melalui konsep ini DN. Aidit menerapkan jalan revolusioner dan parlementer sebagai upaya memperbaiki kesalahan pendahulunya.

Dengan berdasar Marxisme-Leninisme dan analisis mengenai situasi dan kondisi Indonesia sendiri CC PKI dibawah pimpinan DN. Aidit menyusun program partai yaitu membina Front Persatuan Nasional yang berdasarkan persatuan kaum buruh dan kaum tani dengan membangun partai massa yang terkonsolidasi baik di lapangan ideologi politik dan organisasi.

Melalui program tersebut, PKI pada Pemilihan Umum 1955 berhasil menarik pemilih yang besar, sehingga termasuk salah satu dari empat partai besar pemenang Pemilu. Meskipun demikian PKI gagal masuk dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang merupakan koalisi PNI-Masjumi dan NU. PKI terus berupaya mengembangkan pengaruhnya, sehingga ketegangan politik semakin meningkat. Dengan alasan untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari perpecahan maka Presiden Soekarno pada 21 Februari 1957 mengeluarkan Konsepsi Presiden yang mengisyaratkan akan dilaksanakan demokrasi terpimpin dan perlu dibentuk Kabinet Gotong Royong serta sebuah Dewan Nasional yang didalamnya duduk wakil-wakil semua golongan fungsional. PKI menyambut baik gagasan presiden tersebut karena melalui pemerintahan koalisi nasional tersebut dapat dibentuk Front Persatuan Nasional. Dalam situasi itu Konstituante hasil Pemilu 1955 tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), sehingga terjadi dalam Parlemen dan Konstituante itu dimanfaatkan oleh PKI dalam mewujudkan obsesi politik PKI. Ketegangan mereda setelah Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit kembali ke UUD 1945.

Bagaimana pergulatan politik PKI dan manuver-manuver apa yang dilakukannya untuk bangkit kembali dari kehancuran akibat pemberontakannya di Madiun, sehingga dalam waktu singkat dibawah kepemimpinan DN. Aidit, PKI dapat masuk di Parlemen dan Konstituante di jawab dalam buku ini.

ISBN 978-602-95565-2-0



9 786029 556520

Disusun Oleh : Pusjarah TNI

Diterbitkan Oleh : Pusjarah TNI, bekerjasama dengan :
Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)

Desain Visual & Tata Letak : Sidisi, Jakarta
(Materi Slap Cetak)